



**KABUPATAEN KARIMUN**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024**

Disusun Oleh :  
**Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Karimun**



[organisasi.karimu@gmail.com](mailto:organisasi.karimu@gmail.com)

[www.instagram.com/ Bagor\\_karimun](https://www.instagram.com/Bagor_karimun)



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kita ucapkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya yang tak terbatas sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Karimun Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian 17 sasaran strategis yang mendukung visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Karimun, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Penyusunan laporan ini juga mencerminkan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel, sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan berwawasan dunia (*dynamic governance*).

Sejalan dengan peningkatan akuntabilitas dan capaian kinerja, LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2024 menyajikan informasi mengenai hasil pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, laporan ini juga mencakup evaluasi terhadap capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk mencapai target tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif guna penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024**

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



KABUPATEN KARIMUN



Semoga LKJIP Kabupaten Karimun Tahun 2024 yang disusun pada Tahun 2025 sampai bulan maret nanti dapat berjalan dengan lancar dan semoga bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pengambil kebijakan dalam menciptakan program yang tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Tanjung Balai Karimun,      Maret 2025

**BUPATI KARIMUN**

**ISKANDARSYAH**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan institusi pemerintah melaporkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi *core* instansi pemerintah atas penggunaan anggaran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian kinerja yang terukur dan bersifat *outcomes* menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga bisa terus meningkatkan kinerjanya sesuai peran yang diemban.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kinerja Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang telah dicanangkan pada tahun 2024.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Karimun tahun 2024 yang berjumlah 25 (100%), dengan

kinerja yang memenuhi kriteria sangat tinggi 18 (72,00%), kriteria tinggi 4 (16,00%) dan kriteria sedang 3 (12,00%). Rincian dari capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Nilai investasi tercapai 162,38 %.
- b. Rasio SDM Kebudayaan berprestasi tercapai 125,00%.
- c. Indeks Pelayanan Publik tercapai 124,50%
- d. Rasio KK yang terlayani infrastruktur dasar tercapai 111,51%
- e. Indeks Reformasi Birokrasi tercapai 109,42%.
- f. Indek Kualitas Udara tercapai 102,19%.
- g. Rata-rata lama sekolah tercapai 101,83%.
- h. Nilai Manajemen Resiko Indeks tercapai 101,36%
- i. Angka Harapan Hidup tercapai 100,21%
- j. Rasio konektivitas angkutan darat tercapai 100%.
- k. Indeks Pembangunan Gender tercapai 99,81%.
- l. Indeks Pembangunan Pemuda tercapai 98,90%.
- m. Indeks Kualitas Lahan tercapai 98,57%.
- n. Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercapai 96,69%.
- o. Angka Harapan Lama Sekolah tercapai 96,34%.
- p. Indeks Kualitas Air tercapai 95,68%

- q. Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah tercapai 93,30%.
- r. Tinglat Pengangguran Terbuka tercapai 92,00%
- s. Luar Ruang Terbuka Hijau tercapai 89,46%.
- t. Persentase PPKS Mandiri tercapai 84,39%.
- u. Rasio konektivitas angkutan laut tercapai 82,60 %.
- v. Nilai LPPD tercapai 80,15.
- w. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah tercapai 72,05%.
- x. Laju Pertumbuhan Penduduk tercapai 69,41%.
- y. Rasio Panjang Jalan dalam kondisi baik tercapai 58,29%.

Capaian kinerja dengan persentase tertinggi menunjukkan hasil yang sangat positif di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam investasi, pelayanan publik, infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan daerah. Nilai Investasi (162,38%), Investasi yang meningkat tajam menunjukkan tingginya daya tarik daerah bagi investor. Faktor utama yang berkontribusi adalah kebijakan pro-investasi, kemudahan perizinan, serta perkembangan sektor industri, pariwisata, dan infrastruktur. Dengan meningkatnya investasi, pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih cepat dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Rasio

SDM Kebudayaan Berprestasi (125,00%), Capaian ini menunjukkan bahwa semakin banyak individu yang berprestasi di bidang kebudayaan. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam menyediakan pelatihan, pendanaan, dan penghargaan bagi pelaku seni dan budaya. Prestasi di sektor kebudayaan juga mencerminkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya daerah. Indeks Pelayanan Publik (124,50%), Peningkatan layanan publik mencerminkan perubahan yang signifikan dalam efisiensi birokrasi. Digitalisasi layanan, kemudahan akses, serta peningkatan responsivitas aparatur menjadi faktor utama keberhasilan ini. Dengan meningkatnya indeks pelayanan publik, masyarakat merasakan kemudahan dalam berbagai layanan administratif. Rasio KK yang Terlayani Infrastruktur Dasar (111,51%), Keberhasilan ini menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang mendapatkan akses ke infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi. Peningkatan ini memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan kenyamanan hidup. Indeks Reformasi Birokrasi (109,42%), Capaian ini menunjukkan efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Transparansi, efisiensi layanan, dan penerapan kebijakan berbasis teknologi menjadi faktor utama dalam peningkatan indeks ini. Indeks Kualitas Udara



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



KABUPATEN KARIMUN



(102,19%), Peningkatan kualitas udara menandakan bahwa upaya pengurangan polusi dan penghijauan berhasil diterapkan dengan baik. Kebijakan pengendalian emisi, pengelolaan limbah industri, serta peningkatan ruang hijau turut berkontribusi dalam pencapaian ini. Nilai Manajemen Risiko Indeks (101,36%), Manajemen risiko yang optimal menunjukkan kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, bencana, dan faktor sosial lainnya. Peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan telah berjalan dengan efektif. Rata-rata Lama Sekolah (101,83%), Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat, didukung oleh akses yang lebih baik terhadap sarana pendidikan. Pemerintah telah memberikan berbagai program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk mendorong peningkatan ini. Angka Harapan Hidup (100,21%), Kualitas layanan kesehatan yang semakin baik dan pola hidup yang lebih sehat berdampak pada meningkatnya angka harapan hidup. Penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas menjadi faktor utama dalam pencapaian ini. Rasio Konektivitas Angkutan Darat (100%), Aksesibilitas transportasi darat telah mencapai target penuh, menandakan perbaikan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang semakin baik. Hal ini mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja

dengan persentase tertinggi menunjukkan bahwa daerah telah mengalami kemajuan pesat di berbagai sektor, terutama dalam investasi, pelayanan publik, pendidikan, dan infrastruktur. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya capaian kinerja dengan persentase menengah ini menunjukkan progres yang signifikan dalam berbagai sektor. Namun, upaya berkelanjutan dan perbaikan di area-area tertentu masih diperlukan untuk mencapai target yang lebih tinggi dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif. Indeks Pembangunan Gender (99,81%), Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan di daerah tersebut hampir sepenuhnya inklusif bagi perempuan dan laki-laki. Kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan mencerminkan upaya pemerintah dalam mengurangi disparitas gender. Meskipun hampir mencapai target, masih diperlukan perhatian untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada terus mendukung kesetaraan gender secara berkelanjutan. Indeks Kualitas Lahan (98,57%), Pengelolaan lahan yang hampir mencapai target optimal menunjukkan keberhasilan dalam mencegah degradasi lahan serta memastikan keberlanjutan pertanian dan kawasan hijau. Upaya konservasi, reboisasi, dan praktik pertanian berkelanjutan berperan penting dalam pencapaian ini. Namun, tetap diperlukan



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



KABUPATEN KARIMUN



pengawasan dan perencanaan yang baik untuk menjaga kualitas lahan dari ancaman seperti urbanisasi dan deforestasi. Indeks Pembangunan Pemuda (98,90%), Capaian ini mengindikasikan bahwa pemuda di daerah tersebut mendapatkan akses yang luas dalam pendidikan, lapangan kerja, dan program pengembangan diri. Program pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, dan inisiatif kewirausahaan bagi pemuda telah berkontribusi pada peningkatan ini. Meski demikian, masih ada ruang untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (96,69%), Sektor ini tetap menjadi penyumbang utama ekonomi daerah, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, akses ke teknologi modern, dan fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi kinerja sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan dukungan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Indeks Kualitas Air (95,68%), Kualitas air yang mendekati target mencerminkan upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pengolahan limbah yang efektif, konservasi sumber daya air, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air berkontribusi pada pencapaian ini. Namun, tantangan seperti polusi industri dan domestik masih memerlukan perhatian untuk mencapai kualitas air yang optimal. Persentase

PAD terhadap Pendapatan Daerah (93,30%), Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai hampir seluruh target menunjukkan efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi. Ini mencerminkan kemandirian fiskal daerah yang semakin baik. Namun, untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu menggali potensi sumber pendapatan lain serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat Pengangguran Terbuka (92,00%), Penurunan angka pengangguran menunjukkan perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja. Namun, angka ini masih menunjukkan bahwa ada tantangan dalam menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan dan berkualitas. Pemerintah perlu fokus pada pengembangan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Luas Ruang Terbuka Hijau (89,46%), Upaya dalam penyediaan ruang hijau telah berjalan dengan baik, mendekati target yang ditetapkan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) penting untuk kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam pengelolaan dan perawatan RTH, terutama di area perkotaan yang padat, masih perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan fungsionalitasnya. Persentase PPKS Mandiri (84,39%), Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengalami peningkatan, namun masih memerlukan lebih banyak program pemberdayaan. Pelatihan

keterampilan, akses ke modal usaha, dan pendampingan sosial dapat membantu PPKS mencapai kemandirian yang lebih baik. Penting juga untuk menghilangkan stigma sosial yang mungkin menghambat integrasi mereka ke dalam masyarakat. Rasio Konektivitas Angkutan Laut (82,60%), Konektivitas angkutan laut yang meningkat menunjukkan perbaikan dalam aksesibilitas antar pulau dan wilayah pesisir. Namun, infrastruktur pelabuhan dan akses ke daerah terpencil masih perlu ditingkatkan. Peningkatan ini penting untuk mendukung perdagangan, pariwisata, dan mobilitas penduduk di wilayah kepulauan. Nilai LPPD (80,15%), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih ada aspek administratif yang perlu diperbaiki. Evaluasi rutin, peningkatan kapasitas aparatur, dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dapat meningkatkan nilai LPPD di masa mendatang.

Kemudian capaian kinerja dengan persentase rendah menyoroti area-area yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut untuk mencapai target pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (72,05%), menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di daerah tersebut masih menghadapi tantangan signifikan. IKPS adalah indikator yang mengukur efektivitas pemerintah dalam mengelola sampah, mencakup aspek

pengurangan, penanganan, dan pemrosesan akhir sampah. Nilai ini berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 50,70%, namun masih menunjukkan perlunya perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian ini antara lain:

- **Infrastruktur Pengelolaan Sampah:** Keterbatasan fasilitas seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), dan bank sampah dapat menghambat pengelolaan sampah yang efektif.
- **Partisipasi Masyarakat:** Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya turut berkontribusi pada rendahnya kinerja pengelolaan sampah.
- **Kapasitas Pemerintah Daerah:** Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di tingkat pemerintah daerah dapat mempengaruhi implementasi program pengelolaan sampah yang efektif.

Dalam meningkatkan IKPS, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan infrastruktur, edukasi, dan regulasi terkait pengelolaan sampah. Laju Pertumbuhan Penduduk (69,41%), Laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 69,41% dari target yang ditetapkan menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dari yang diharapkan. Faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk meliputi:

- Angka Kelahiran: Penurunan angka kelahiran akibat program keluarga berencana yang efektif atau perubahan preferensi masyarakat terhadap jumlah anak.
- Migrasi: Urbanisasi atau perpindahan penduduk ke daerah lain untuk mencari peluang ekonomi atau kualitas hidup yang lebih baik dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah.
- Kebijakan Kependudukan: Kebijakan pemerintah terkait perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pembangunan ekonomi turut mempengaruhi dinamika pertumbuhan penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk yang lebih rendah dapat berdampak pada struktur demografi, ketersediaan tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan dinamika pertumbuhan penduduk yang terjadi. Sedangkan Rasio Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (58,29%), menunjukkan bahwa lebih dari setengah jaringan jalan di daerah tersebut berada dalam kondisi baik, namun masih ada sekitar 41,71% jalan yang memerlukan perhatian. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2023, 94,2% dari 47.604,34 km panjang jalan nasional Indonesia kondisinya sudah baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi jalan meliputi:

- Pemeliharaan Rutin: Kurangnya pemeliharaan rutin dapat mempercepat kerusakan jalan.
- Beban Lalu Lintas: Volume dan beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dapat menyebabkan kerusakan lebih cepat.
- Kondisi Alam: Faktor cuaca dan kondisi tanah dapat mempengaruhi umur teknis jalan.

Dalam meningkatkan rasio jalan dalam kondisi baik, pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran pemeliharaan, melakukan perencanaan transportasi yang efektif, dan memastikan kualitas konstruksi jalan sesuai standar yang ditetapkan.

Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat keterkaitan indikator kinerja OPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), serta diterapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja online yang berbasis website. Langkah ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR GAMBAR	Xviii
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Karimun	2
1.3 Potensi Unggulan Daerah	8
1.4 Aparat Pemerintah	14
1.5 Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) Organisasi	17
1.6 Isu Strategis	18
1.7 Struktur Organisasi	19
1.8 Maksud dan Tujuan	20
1.9 Tistematika Penyajian	21
<b>BAB 2 : PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>23</b>
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Rencana Kinerja	25
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
<b>BAB 3 : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>31</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	34
<b>BAB 4 : PENUTUP</b>	<b>215</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Pernyataan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Ibukota Kecamatan Serta Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Karimun Tahun 2024	2
Tabel 1.2.	Persentase Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024	4
Tabel 1.3.	Luas Wilayah Kabupaten Karimun Menurut Kecamatan Tahun 2024.	5
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Karimun Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2024	6
Tabel 1.5.	Data Hasil Perekaman e-KTP Kabupaten Karimun menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2024	7
Tabel 1.6.	Data Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Kabupaten Karimun menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2024	8
Tabel 1.7.	Volume dan Nilai Produksi Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024	9
Tabel 1.8.	Volume dan Nilai Produksi Hasil Olahan Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024	10
Tabel 1.9.	Jumlah Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2017 s.d. 2024	10
Tabel 1.10.	Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Selama Tahun 2024	11
Tabel 1.11.	Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan Tahun 2022 s.d. 2024 (Ton per Ha)	12
Tabel 1.12.	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan Di Kabupaten Karimun Tahun 2022 s.d. 2023 (Ton)	12
Tabel 1.13.	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Kabupaten Menengah Tahun 2020- 2023	13
Tabel 1.14.	Perkembangan Jumlah UKM Kabupaten Karimun Tahun 2016-2024	14
Tabel 1.15	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d 2024	15
Tabel 1.16	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d 2024	16
Tabel 1.17.	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d 2024	16
Tabel 1.18.	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun	19
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun 2021-2026	25

Tabel 2.2.	Program Yang Mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024	26
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja	31
Tabel 3.2.	Pencapaian IKU Bupati Tahun 2024	32
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Nilai Investasi	36
Tabel 3.4.	Rencana Investasi Kabupaten Karimun Tahun 2024	37
Tabel 3.5.	Realisasi Tambahan Investasi di Kabupaten Karimun Tahun 2024	38
Tabel 3.6.	Realisasi Investasi di Kabupaten Karimun Tahun 2024	38
Tabel 3.7.	Perbandingan Total Realisasi Investasi di Kabupaten Karimun Tahun 2022, 2023 dan 2024	38
Tabel 3.8.	Persentase Kenaikan Nilai Investasi di Kabupaten Karimun Thn 2024	39
Tabel 3.9.	Analisa Efisiensi di Kabupaten Karimun Tahun 2024	39
Tabel 3.10.	Target dan Capaian Nilai PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2024.	41
Tabel 3.11.	Nilai PDRB Kabupaten Karimun tiap Sektor Tahun 2024	42
Tabel 3.12.	Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun Menurut jenis Tanaman dan Kecamatan Tahun 2023 s.d.2024 (Ton per Ha)	43
Tabel 3.13.	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2023 s.d.2024 (Ton)	44
Tabel 3.14.	Populasi Ternak Besar menurut Jenis Di Kabupaten Karimun Tahun 2024 s.d.2024	44
Tabel 3.15.	Data Produk Ternak di Kecamatan Di Kabupaten Karimun pada Tahun 2024	45
Tabel 3.16.	Volume dan Produksi Perikanan 2017 s.d. 2024	46
Tabel 3.17.	Volume dan Nilai Produksi Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024	49
Tabel 3.18.	Jumlah Armada Penangkapan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2024	50
Tabel 3.19.	Volume dan Nilai Produksi Hasil Olahan Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024	51
Tabel 3.20.	Jumlah Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2017 s.d. 2024	52
Tabel 3.21.	Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Selama Tahun 2024	53
Tabel 3.22.	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya yang Mendukung Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	54
Tabel 3.23.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024	55
Tabel 3.24.	Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun tahun 2024	56
Tabel 3.25.	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Karimun tahun 2019 – 2024 Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun	56

Tabel 3.26.	Capaian Target, Realisasidan Kontribusi Sektor Penerimaan Pendapatan Daerah KabupatenKarimun Tahun 2024	60
Tabel 3.27.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun	63
Tabel 3.28.	Persentase KK yang terlayani SPAM di Kabupaten karimun Tahun 2024	65
Tabel 3.29.	Persentase Penduduk Beraksis Air Bersih	66
Tabel 3.30.	Kinerja Keungan dalam Mencapai Sasaran Strategi Meningkatnya Akses KebutuhanInfrastuktur Dasar Masyarakat Yang Merata Kabupaten Karimun Tahun 2024...	67
Tabel 3.31.	Capaian Masing-Masing Indikator Sasaran Terwujudnya Prasarana PenghubungYang Optimal Tahun 2024...	68
Tabel 3.32.	Proporsi Panjang Jalan Beraspal berdasarkan kondisi di Kabupaten Karimun	69
Tabel 3.33.	Pulau-Pulau Berpenghuni Yang Terlayani Trayek/Transportasi laut Reguler Tahun 2018 s.d 2024	70
Tabel 3.34.	Tabel Data Trayek Angkutan Umum Perkotaan dan Kabupaten.	72
Tabel 3.35.	Tabel Dukungan Anggaran Sasaran “Terwujudnya Prasarana Penghubung Yang Optimal” Tahun 2024	76
Tabel 3.36.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung Indikator Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan Darat antara lain	76
Tabel 3.37.	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	78
Tabel 3.38.	Analisis Efisiensi Sasaran	84
Tabel 3.39.	Capaian Indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah	88
Tabel 3.40.	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karimun	90
Tabel 3.41.	Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 Dengan Target Tahun 2026	90
Tabel 3.42.	Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 Kabupaten Karimun Dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.....	91
Tabel 3.43.	Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karimun Tahun 2024	92
Tabel 3.44.	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karimun	93
Tabel 3.45.	Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 Dengan Target Tahun 2026	93
Tabel 3.46.	Perbandingan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 Kabupaten Karimun Dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional	94
Tabel 3.47.	Capaian Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Kesetaraan Gender	95
Tabel 3.48.	Indikator Variabel Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Karimun Tahun 2023	97

Tabel 3.49.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Karimun Tahun 2019-2022	97
Tabel 3.50.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2022	99
Tabel 3.51.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Yang Mendukung Indikator IPG	100
Tabel 3.52.	Perkembangan IPM, IPG dan IDG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023	103
Tabel 3.53.	Capaian Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Pengendalian Penduduk	104
Tabel 3.54.	Data Penduduk Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2023	105
Tabel 3.55.	Data Kelahiran di Kabupaten Karimun Tahun 2023	107
Tabel 3.56.	Data Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2023	108
Tabel 3.57.	Data Kematian Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2023	109
Tabel 3.58.	Data Penduduk Pindah Datang di Kabupaten Karimun Tahun 2023	110
Tabel 3.59.	Data Penduduk Pindah Keluar Kabupaten Karimun Tahun 2023	111
Tabel 3.60.	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda	112
Tabel 3.61.	Tingkatan Status Indeks Pembangunan Kepemudaan	113
Tabel 3.62.	Nilai Aktual Indikator pada Dimensi Pendidikan	114
Tabel 3.63.	Analisis Penentuan Indikator Inti Setiap Domain	114
Tabel 3.64.	Total persentase dari masing-masing Domain	115
Tabel 3.65.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	117
Tabel 3.66.	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda	118
Tabel 3.67.	Data Prestasi/Penghargaan Pelaku Budaya Kabupaten Karimun	119
Tabel 3.68.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran (IKU) Dengan Kinerja Keuangan Tahun 2024	121
Tabel 3.69.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Yang Mendukung Indikator Program Pengelolaan Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karimun	122
Tabel 3.70.	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	129
Tabel 3.71.	Capaian Kinerja PPKS yang Mandiri	131
Tabel 3.72.	Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Karimun	131
Tabel 3.73.	Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	133
Tabel 3.74.	Analisis Efisiensi Sasaran 12	135
Tabel 3.75.	Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	138
Tabel 3.76.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin	138
Tabel 3.77.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun lalu (baseline)	139
Tabel 3.78.	Target Perjanjian Kinerja dengan Target di RPJMD	140

Tabel 3.79.	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah (PKP) Tahun 2024	140
Tabel 3.80.	Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis	141
Tabel 3.81.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	142
Tabel 3.82.	Indikator Kinerja	149
Tabel 3.83.	Pengukuran Capaian Kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun Tahun 2023	150
Tabel 3.84.	Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kabupaten Karimun Tahun 2023	152
Tabel 3.85.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya/Anggaran Terhadap Sasaran Strategis "Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2023	154
Tabel 3.86.	Indikator Kinerja Utama	161
Tabel 3.87.	Hasil Analisis Indeks Pencemaran (Pij) Air Tahun 2023	164
Tabel 3.88.	Hasil Analisis Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Karimun Tahun 2023	164
Tabel 3.89.	Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Karimun Tahun 2023	165
Tabel 3.90.	Hasil Perhitungan Kualitas Udara (Rata-rata Konsentrasi NO2 dan SO2) Tahun 2023	168
Tabel 3.91.	Hasil Analisis Indeks Kualitas Udara (IKU) Kab. Karimun Tahun 2023	169
Tabel 3.92.	Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Karimun Tahun 2023	169
Tabel 3.93.	Hasil Analisis Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kab. Karimun Tahun 2023	171
Tabel 3.94.	Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Karimun Tahun 2023	171
Tabel 3.95.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya/Anggaran Terhadap Sasaran Strategis "Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2023	173
Tabel 3.96.	Capaian Indikator	179
Tabel 3.97.	Capaian Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Karimun	181
Tabel 3.98.	Komponen Penilaian Pengungkit dan Hasil Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2023	182
Tabel 3.99.	Jumlah Pegawai yang Menyampaikan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2023	182
Tabel 3.100.	Nilai MRI Kabupataen Karimun Tahun 2024	184
Tabel 3.101.	Nilai MRI Kabupataen Karimun Tahun 2022 s/d2024	185
Tabel 3.102.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung Indikator Indeks Reformasi Birokrasi	187
Tabel 3.103.	Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024	188

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



Tabel 3.104.	Nilai indeks Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Oleh Kementerian PAN RB Tahun 2024	189
Tabel 3.105.	Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Karimun oleh Ombudsman RI Tahun 2023	189
Tabel 3.106.	Kategori Mutu Pelayanan	190
Tabel 3.107.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan berdasarkan masing-masing Unsur Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024	190
Tabel 3.108.	Capaian Rata-rata Lama Waktu Pelayanan Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024	192
Tabel 3.109.	Interval Nilai Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Lama Waktu Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2023	193
Tabel 3.110.	Capaian Rata-rata Lama Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024	193
Tabel 3.111.	Data Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 17 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024	195
Tabel 3.112.	Data Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 17 pada RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun Tahun 2024	198
Tabel 3.113.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2024	200
Tabel 3.114.	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2024	201
Tabel 3.115.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023	202
Tabel 3.116.	Anggaran Belanja Operasional	203
Tabel 3.117.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran (IKU) dengan Kinerja Keuangan Tahun 2023	207

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2024	34
Grafik 3.2.	Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun Tahun 2019 – 2024	59
Grafik 3.3.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2024	79
Grafik 3.4.	Angka Harapan Hidup Provinsi Kepri Tahun 2024	80
Grafik 3.5.	Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Tahun 2021 s.d 2024	81
Grafik 3.6.	Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Karimun Tahun 2019 s/d. 2024	89
Grafik 3.7.	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karimun Tahun 2019 s/d. 2024	92
Grafik 3.8.	Capaian IPG, IDG dan IPM Kabupaten Karimun Tahun 2020-2023	102
Grafik 3.9.	IPG, IPM Dan IDG Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kab/Kota Tahun 2022	103
Grafik 3.10.	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Karimun Tahun 2020 – 2023	106
Grafik 3.11.	Grafik prestasi/ penghargaan pelaku budaya Kabupaten Karimun	120
Grafik 3.12.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021-2023	139
Grafik 3.13.	Jawaban Responden per Unsur Pelayanan	196
Grafik 3.14.	Nilai IKM DPMPTSP	197

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Karimun	Hal 3
Gambar 3.1	Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs) Kabupaten Karimun Tahun 2019 s/d 2023	96



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/ Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja

yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya

**Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepadapublik.

## 1.2. Gambaran Umum Kabupaten Karimun

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 13 Januari 2012 secara administratif Kabupaten Karimun mengalami pemekaran dari 12 Kecamatan menjadi 14 kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 desa, dengan ibukota

Kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel 1.1. dibawah ini :

Tabel 1.1

Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Ibukota Kecamatan Serta Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Wilayah AdminisTrasi	Ibukota Kecamatan	Jumlah				
		Kelurahan	Desa	RW	RT	Pulau
Moro	Moro	2	3	27	68	36
Durai	Durai	-	4	14	39	47
Kundur	Tanjung Batu Kota	3	3	51	144	-
Kundur Utara	Tanjung Berlian	1	4	41	84	-
Kundur Barat	Sawang	1	4	44	111	11
Karimun	Tanjung Balai	6	3	24	106	-
Buru	Buru	2	2	29	64	7
Meral	Meral	6	-	30	119	4
Tebing	Tebing	5	1	25	75	6
Meral Barat	Darussalam	2	2	19	55	19
Belat	Sebele	-	6	28	65	22
Ungar	Sungai Buluh	1	3	23	47	26
Selat Gelam	Parit	-	3	16	36	24
Sugi Besar	Rawa Jaya	-	7	23	65	49
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>42</b>	<b>394</b>	<b>1.078</b>	<b>251</b>

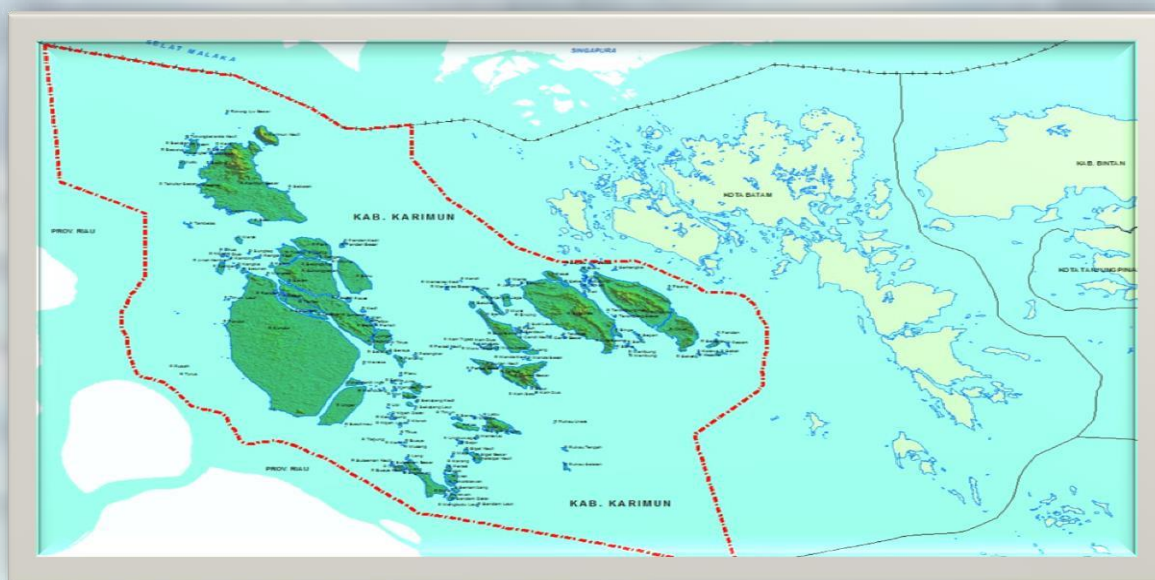
Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, 2024

### 1.2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Karimun merupakan kabupaten pemekaran yang terbentuk berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999 dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan ibukota kabupaten terletak pada Kota Tanjung Balai. Wilayah Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 00° 24' 36" LU sampai 01° 13' 12" LU dan 103° 13' 12" BT sampai 104° 00' 36" BT dan termasuk kedalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan maritim. Hal ini dikarenakan letaknya yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia, serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam dan Bintan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Karimun adalah sebelah utara berbatasan

langsung dengan Selat Singapura (Philip Channel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan. Kabupaten Karimun secara keseluruhan memiliki luas wilayah 7.984 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari luas perairan seluas 6460 Km<sup>2</sup> (80,91%) dan luas daratan 1524 Km<sup>2</sup>(19,09%). Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 249 buah pulau yang seluruhnya sudah memiliki nama, namun baru sebanyak 39 pulau di antaranya yang sudah berpenghuni. Dua pulau terbesar di wilayah ini menjadi sentra berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga pemukiman penduduk, yaitu Pulau Karimun dan Pulau Kundur. berikut peta wilayah Kabupaten Karimun :

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Karimun**



*Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, 2025*

Adapun luas wilayah dan jumlah pulau berdasarkan

Kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut ini :

**Tabel 1.2**

**Persentase Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024**

Kecamatan	Daratan		Lautan		Jumlah Pulau
	KM <sup>2</sup>	%	KM <sup>2</sup>	%	
Moro	1.166,80	76,56	1.668,44	25,83	36
Durai	52,00	3,41	1.480,54	22,92	47
Kundur	34,30	2,25	449,93	6,96	-
Karimun	49,90	3,27	404,06	6,25	-
Kundur Utara	29,50	1,94	509,15	7,88	-
Kundur Barat	21,70	1,42	267,12	4,13	11
Buru	17,80	1,17	366,88	5,68	7
Meral	80,00	5,25	515,41	7,98	4
Tebing	72,00	4,72	798,47	12,36	6
Meral Barat	NA	NA	NA	NA	19
Belat	NA	NA	NA	NA	22
Ungar	NA	NA	NA	NA	26
Selat Gelam	NA	NA	NA	NA	24
Sugi Besar	NA	NA	NA	NA	49
<b>JUMLAH</b>	<b>1.524,00</b>	<b>19,09</b>	<b>6.460,00</b>	<b>80,91</b>	<b>251</b>

**Sumber :** Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, 2024

Secara umum Kabupaten Karimun memiliki karakteristik wilayah dataran yang datar dan landai serta berada pada ketinggian antara 2 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga wilayah yang memiliki karakteristik berbukit-bukit dengan kemiringan

sampai dengan 40° serta berada pada ketinggian antara 20 sampai 500 meter. Kabupaten Karimun juga memiliki sebuah gunung yaitu Gunung Jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air. Disamping itu terdapat pula beberapa pulau yang memiliki rawa-rawa.

### 1.2.2. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan pelaku sekaligus asaran pembangunan. sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya (meliputi kuantitas, distribusi, komposisi, dan kualitas). untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka

memperoleh subyek yang berkualitas.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Karimun secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga mengakibatkan penumpukan konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah tertentu. Ketidakmerataan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah

satu diantaranya adalah potensi wilayah yang dimiliki. Luas wilayah di Kabupaten Karimun

menurut Kecamatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.3

**Tabel 1.3**  
**Luas Wilayah Kabupaten Karimun Menurut Kecamatan Tahun 2024**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
Moro	2329.43
Durai	319.36
Kundur	479.04
Kundur Utara	1277.44
Kundur Barat	958.08
Karimun	292.46
Buru	399.2
Meral	319.36
Tebing	399.2
Meral Barat	319.36
Belat	558.88
Ungar	319.36
Selat Gelam	26.9
Sugi Besar	21.93
<b>TOTAL</b>	<b>7.984</b>

*Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, 2025*

Jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2024 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang mengadakan registrasi penduduk dengan Sistem Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik berjumlah **273.946** jiwa. Penduduk Kabupaten Karimun berasal dari berbagai suku bangsa (heterogen) dan lebih didominasi oleh suku Melayu.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Karimun pada tahun 2024 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun adalah **76.208**, KK (68.717) laki-laki dan (16.734)

perempuan tersebar di dua belas kecamatan di Kabupaten Karimun. Kecamatan dengan jumlah terbanyak adalah Kecamatan Meral sebanyak **54.428** KK diikuti oleh Kecamatan Karimun yaitu **47.743** KK, sedangkan Kecamatan Selat Gelam yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit memiliki jumlah KK sebanyak **4.193** KK. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah KK di Kabupaten Karimun pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.4. dibawah ini :

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Karimun Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN KK LAKI-LAKI	BERDASARKAN KK PEREMPUAN	JUMLAH KK
1	MORO	11.453	2.989	789	3.778
2	KUNDUR	31.421	8.177	2.373	1.055
3	KARIMUN	47.743	12.288	3.835	16.123
4	MERAL	54.428	13.751	3.515	17.266
5	TEBING	36.535	9.363	2.260	11.623
6	BURU	10.584	2.880	713	3.593
7	KUNDUR UTARA	13.106	3.429	890	4.319
8	KUNDUR BARAT	19.452	5.233	1.223	6.456
9	DURAI	6.451	1.716	464	2.180
10	MERAL BARAT	17.713	4.676	965	5.641
11	UNGAR	5.967	1.654	460	2.114
12	BELAT	6.795	1.836	483	2.319
13	SELAT GELAM	4.193	1.119	316	1.435
14	SUGIE BESAR	8.105	2.198	482	2.680
<b>TOTAL</b>		<b>273.946</b>	<b>71.309</b>	<b>18.768</b>	<b>90.077</b>

**Sumber :** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Walaupun Kabupaten Karimun masih tergolong sebagai kota kecil, namun melihat fungsi daerah ini sebagai daerah transit maka akan menimbulkan berbagai permasalahan mendasar terkait dengan kependudukan. Migrasi penduduk yang masih saja berlangsung serta besarnya persentase usia produktif di Kabupaten Karimun dapat menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memberikan tekanan yang besar terhadap sumber daya dan daya dukung alam yang tersedia. Kedekatan Kabupaten Karimun dengan negara tetangga Singapura dan

Malaysia serta Kota Batam sebagai pusat industri, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya sebagian wilayah Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB). Semakin menimbulkan permasalahan-permasalahan kependudukan. Kabupaten Karimun juga sudah melaksanakan perekaman data penduduk berdasarkan perekaman e-KTP yang mulai dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2012 sampai dengan tahun 2024. Untuk mengetahui lebih jelas penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP dapat dilihat pada table 1.5 dibawah ini :

Tabel 1.5

Data Hasil Perekaman e-KTP Kabupaten Karimun  
menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN	PERSENTASE (%)	SISA PEREKAMAN
1	MORO	8.262	8.241	99.74	21
2	KUNDUR	23.676	23.636	99.83	40
3	KARIMUN	34.569	34.490	99.77	79
4	MERAL	38.266	38.197	99.81	69
5	TEBING	25.174	25.133	99.84	41
6	BURU	7.852	7.843	99.88	9
7	KUNDUR UTARA	9.703	9.690	99.86	13
8	KUNDUR BARAT	14.162	14.115	99.66	47
9	DURAI	4.749	4.744	99.89	5
10	MERAL BARAT	12.008	11.983	99.79	25
11	UNGAR	4.488	4.483	99.88	5
12	BELAT	5.036	5.033	99.94	3
13	SELAT GELAM	3.098	3.098	100.00	0
14	SUGIE BESAR	5.908	5.908	100.00	0
TOTAL		196.951	196.594	11.281	357

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah hasil perekaman e-KTP Kabupaten Karimun Tahun 2024 mencapai 110,103% dari jumlah wajib KTP sebanyak 196.951 orang dengan melakukan perekaman sebanyak 156,832 orang. Dari data tersebut hanya tersisa perekaman sebanyak 357 orang atau 251,12% sehingga perlu

dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat agar segera melakukan perekaman KTP. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun melakukan penerbitan terhadap akta kelahiran dan akta perkawinan.

Tabel I.6

Data Penduduk Berdasarkan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Kabupaten Karimun menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH AKTA KELAHIRAN	JUMLAH AKTA PERKAWINAN
1	MORO	5.844	4.136
2	KUNDUR	17.490	13.257
3	KARIMUN	25.286	16.639
4	MERAL	32.427	19.833
5	TEBING	21.859	14.555
6	BURU	5.708	4.075
7	KUNDUR UTARA	7.652	5.556
8	KUNDUR BARAT	11.339	8.604
9	DURAI	3.346	2.779
10	MERAL BARAT	10.349	7.029
11	UNGAR	3.053	2.661
12	BELAT	3.685	2.752
13	SELAT GELAM	2.225	1.637
14	SUGIE BESAR	3.783	3.412
TOTAL		154.046	106.925

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahun 2025

### 1.3. Potensi Unggulan Daerah

#### 1.3.1. Sektor Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Karimun yang merupakan wilayah kepulauan memiliki luas perairan jauh lebih luas dari daratan dimana luas wilayah perairan seluas 80,91 % dan daratan seluas 19,09 %. Hal ini tentu menjadikan wilayah Kabupaten Karimun memiliki potensi perikanan yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Pada sektor perikanan, Kabupaten Karimun memiliki potensi yang strategis untuk bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Adapun potensi perikanan yang dapat dikembangkan adalah dari sub sektor perikanan tangkap dan subsektor perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap memiliki volume produksi yang sangat besar dibandingkan usaha perikanan lainnya. Produk perikanan tangkap merupakan sumber utama untuk kebutuhan konsumsi ikan Kabupaten Karimun serta daerah sekitarnya. Selain itu ikan segar maupun olahannya juga diekspor dengan Negara tujuan Singapura dan Malaysia. Tingginya produksi perikanan tangkap Kabupaten

Karimun juga seiring dengan besarnya jumlah masyarakat Kabupaten Karimun yang melakukan aktivitas sebagai nelayan.

Dari jumlah produksi yang sudah diketahui, maka akan dijabarkan jumlah

produksi di Kabupaten Karimun yang ada pada 14 kecamatan setiap sektor tangkap dan budidaya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.7.**  
**Volume dan Nilai Produksi Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024**

Kecamatan	Penangkapan		Budidaya	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Kecamatan Karimun	4.435	176.259.936.000	58,20	1.149.912.000
Kecamatan Meral	10.094	398.715.639.000	349,17	6.899.475.000
Kecamatan Tebing	2.504	84.545.300.000	116,39	2.299.825.000
Kecamatan Kundur	322	9.795.488.000	139,67	2.759.790.000
Kecamatan Moro	6.440	250.004.244.000	-	-
Kecamatan Durai	560	19.023.943.000	116,39	2.299.825.000
Kecamatan Buru	1.974	70.754.068.000	-	-
Kecamatan Kundur Barat	1.128	36.086.755.000	58,20	1.149.912.000
Kecamatan Kundur Utara	464	12.630.517.000	93,11	1.839.860.000
Kecamatan Meral Barat	667	21.351.936.000	34,92	689.947.000
Kecamatan Belat	1.244	34.396.045.000	-	-
Kecamatan Ungar	1.655	44.433.278.000	58,20	1.149.912.000
Kecamatan Sugi Besar	3.413	122.342.525.000	139,67	2.759.790.000
Kecamatan Selat Gelam	3.673	132.689.462.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>38.573</b>	<b>1.413.029.136.000</b>	<b>1.163,90</b>	<b>22.998.249.000</b>

**Sumber :** Dinas Perikanan Kab. Karimun, Tahun 2025

Dilihat dari tabel diatas, jumlah produksi perikanan di Kecamatan Meral memiliki Volume produksi tertinggi di sektor penangkapan (10.094 ton) dan memiliki volume produksi tertinggi di sektor budidaya (349,17). Sedangkan untuk volume produksi terendah disektor penangkapan berada di Kecamatan Kundur sebesar (322 ton) dan untuk volume terendah disektor budidaya berada di Kecamatan Meral Barat sebesar

(34,92 ton). Data perkembangan nilai produksi hasil olahan perikana menurut kecamatan di Kabupaten Karimun pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.8.

Volume dan Nilai Produksi Hasil Olahan Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Kecamatan	Produksi Hasil Olahan Perikanan	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Kecamatan Karimun	26,22	2.448.825.000
Kecamatan Meral	81,58	5.995.800.000
Kecamatan Tebing	7,32	878.400.000
Kecamatan Kundur	5,84	657.825.000
Kecamatan Moro	112,24	13.468.800.000
Kecamatan Durai	9,78	781.800.000
Kecamatan Buru	57,93	4.074.000.000
Kecamatan Kundur Barat	10,01	626.295.000
Kecamatan Kundur Utara	0	-
Kecamatan Meral Barat	3,29	377.400.000
Kecamatan Belat	3,27	130.800.000
Kecamatan Ungar	5,20	275.250.000
Kecamatan Sugi Besar	-	-
Kecamatan Selat Gelam	-	-
Jumlah	322,67	29.715.195.000

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Karimun, Tahun 2025

Dilihat dari tabel diatas, jumlah volume produksi tertinggi pada produksi hasil olahan perikanan berada di kecamatan Moro sebesar (112,24 ton), sedangkan volume produksi terendah pada produksi hasil olahan perikanan berada di Kecamatan Belat sebesar (3,29 ton) dan ada tiga (3) kecamatan yang tidak memproduksi hasil olahan perikanan

di antaranya kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Sugi Besar dan Kecamatan Selat Gelam.

Selanjutnya potensi unggulan dari sektor perikanan ini dapat dilihat dari jumlah Ekspor usaha perikanan. Berikut jumlah data ekspor perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.9.

Jumlah Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2017 s.d. 2024

NO	URAIAN	PRODUKSI (Ton)								PENINGKATAN/ PENGURANGAN (%)
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1.	Jumlah ekspor perikanan budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah ekspor perikanan tangkap	10.111	7.000,014	4.961,66	4.192,63	3.858	1.134,54	703,26	734,77	4,48 %
3.	Jumlah ekspor pengolahan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JUMLAH

10.111

7.000,014

4.961,66

4.961,66

3.858

1.134,54

703,26

734,77

4,48 %

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Karimun, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Tangkap mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya :

1. Hasil Tangkapan Ikan untuk Kualitas Grade A (Kualitas Ekspor) menurun.
2. Permintaan Konsumen (Luar Negeri) Komoditi Perikanan Tangkap berkurang.
3. Nelayan tidak membongkar Ikan yang kualitas Ekspor di Karimun.

Dengan adanya kejadian tersebut yang menyebabkan ekspor perikanan turun

setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan upaya sebagai berikut :

1. Nelayan di syaratkan untuk membongkar ikan di Karimun baik untuk keperluan ekspor maupun tidak.
2. Bantuan dari Pemerintah terkait peningkatan Sarana Penangkapan Ikan yang bisa menangkap ikan lebih jauh lagi diatas 12 mill sehingga kualitas Ikan yang ditangkap merupakan kualitas Grade A yaitu Kualitas Ekspor.

Sedangkan untuk Perkembangan produksi dan nilai eksport perikanan per-triwulan untuk tahun 2023 di Kabupaten Karimun disajikan dalam table berikut:

Tabel 1.10

Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Selama Tahun 2024

NO	BULAN	VOLUME (Ton)	NILAI (Rp.)
1	JANUARI-MARET	163,56	2.950.500.000
2	APRIL-JUNI	162,10	3.240.200.000
3	JULI-SEPTEMBER	208,69	4.588.010.000
4	OKTOBER-DESEMBER	200,42	4.518.030.000
JUMLAH		734,77	15.296.740.000

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Karimun, Tahun 2025

### 1.3.2. Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian Kabupaten Karimun memiliki potensi yang cukup strategis untuk bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Adapun potensi pertanian yang dapat

dikembangkan adalah produksi tanaman pangan dan produksi tanaman perkebunan rakyat. Untuk mengetahui dengan jelas produksi tanaman pangan di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 11.

Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun  
Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan Tahun 2022 s.d. 2024 (Ton per Ha)

Komoditas	Jagung		Talas		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Kacang Tanah	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
JUMLAH	455,7	378,1	0,5	0,5	773,3	798,2	32,8	83,9	24,7	45,0

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun, Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Produksi tanaman Jagung sebesar 455,7 ton pada tahun 2023, tahun 2024 tanaman Jagung sebesar 378,1 ton, penurunan jumlah produksi sebesar 5,87 % dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pertanian akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan ini berdampak terhadap jumlah luas tanam yang diusahakan petani.

Produksi tanaman Talas sebesar 0,5 ton pada tahun 2023, tahun 2024 tanaman Talas sebesar 0,5 ton, tidak ada mengalami penurunan dan kenaikan jumlah produksi. Produksi tanaman Ubi Kayu sebesar 773,3 ton

pada tahun 2023, tahun 2024 tanaman ubi kayu sebesar 798,2 ton, kenaikan jumlah produksi Ubi kayu sebesar 31,05 %.

Produksi tanaman Ubi Jalar sebesar 32,8 ton pada tahun 2023, tahun 2024 tanaman Ubi Jalar sebesar 83,9 ton, kenaikan jumlah produksi Ubi Jalar sebesar 64 %. Sedangkan untuk Produksi tanaman Kacang Tanah sebesar 24,7 ton pada tahun 2023, tahun 2024 tanaman Ubi Jalar sebesar 45,0 ton, kenaikan jumlah produksi Ubi Jalar sebesar 1,21 %. Angka ini diharapkan terus meningkat seiring dengan input sarana produksi untuk menunjang usaha tani kelompok tani di Kabupaten Karimun .

Tabel. 1.12

Produksi Tanaman Perkebunan  
Di Kabupaten Karimun Tahun 2022 s.d. 2023(Ton)

Kecamatan	Karet		Kelapa		Cengkeh		Kopi		Lada		Gambir	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
JUMLAH	5.097,44	5.613	2.738,65	2.192,60	-	1,72	-	0,37	1.31	3,92	379,52	470

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun, Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk produksi komoditas perkebunan

tahun 2024 di Kabupaten karimun sebanyak 3.484 Ton, atau 42,06 persen pencapaian

dari tahun 2023, dikarenakan banyaknya tanaman karet tua dan stagnannya harga karet dipasaran, petani cenderung mengusahakan komoditas hortikultura

### 1.3.3 Sektor Industri Kecil Menengah (IKM)

Pelaku usaha sektor industri kecil menengah di Kabupaten Karimun dari tahun 2020 s.d 2022 mengalami sedikit pertumbuhan. Hal ini menunjukkan jumlah pelaku usaha sektor industri kecil menengah

seperti durian yang mempunyai potensi dan prospek pendapatan petani yang lebih menjanjikan.

masih terus bertambah dari tahun ke tahun. Adapun perkembangan pelaku usaha sektor industri kecil menengah di Kabupaten Karimun dari tahun 2020 s.d. 2022 dapat dilihat pada table 1.13. dibawah ini :

**Tabel 1.13**  
**Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Kabupaten**  
**Menengah Tahun 2020- 2023**

No	Kecamatan	Industri Kecil dan Menengah (IKM)				Pertambahan IKM Tahun 2023
		Tahun 2020 (pelaku usaha)	Tahun 2021 (pelaku usaha)	Tahun 2022 (pelaku usaha)	Tahun 2023 (pelaku usaha)	
1	Karimun	211	216	240	270	34
2	Meral	198	201	255	221	5
3	Meral barat	69	72	93	101	10
4	Tebing	258	260	174	260	0
5	Kundur	231	231	276	231	0
6	Kundur Barat	109	111	114	111	0
7	Kundur Utara	91	93	92	93	0
8	Buru	105	105	136	125	20
9	Moro	121	123	106	123	0
10	Durai	38	38	38	38	0
11	Belat	32	32	51	32	0
12	Ungar	84	85	46	85	0
13	Sugi Besar	NA	NA	NA	NA	NA
14	Selat Gelam	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Jumlah</b>		<b>1547</b>	<b>1567</b>	<b>1621</b>	<b>1690</b>	<b>69</b>

**Sumber :** Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025

Dari table 1.13. diatas analisa atas capaian indikator Sasaran Strategis II bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan IKM berjumlah 1621 IKM, sementara pada tahun

2023 berjumlah 3054 IKM. Maka jumlah pertumbuhan IKM tahun 2022 sebanyak 1883 IKM dengan persentase 53,7%.

### 1.3.3. Sektor Usaha Kecil Menengah

Pertumbuhan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Karimun senantiasa mengalami perkembangan, munculnya UKM yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan dengan ditandainya perkembangan kategori usaha. Jenis usaha mikro adalah yang paling banyak ditemukan di kalangan pelaku UKM Kabupaten

Karimun, yakni jenis usaha antara lain usaha perdagangan, sektor produksi makanan kemasan, aneka usaha serta para pelaku kerajinan dan beberapa lainnya. Berikut ditampilkan perkembangan jumlah UKM Kabupaten Karimun tahun 2016-2023 pada tabel 1.14 dibawah ini :

**Tabel 1.14.**  
**Perkembangan Jumlah UKM Kabupaten Karimun Tahun 2016-2024**

TAHUN	JUMLAH UMKM	PERKEMBANGAN (%)
2016	3556	40%
2017	5184	7%
2018	5444	10%
2019	8032	53%
2020	8032	0 %
2021	8032	0 %
2022	8032	0 %
2023	19.143	238%

*Sumber: Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan,ESDM Kabupaten Karimun Tahun 2025*

### 1.4. Aparat Pemerintah

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Karimun didukung oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun jumlah Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebanyak 5.082 (Empat ribu tiga ratus dua puluh empat) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.15.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d 2024

NO	GOLONGAN PNS	2020	2021	2022	2023	2024
		( Orang )	( Orang )	( Orang )	( Orang )	( Orang )
1	Golongan I	54	43	34	34	24
2	Golongan II	877	814	850	744	651
3	Golongan III	2.419	2.411	2.551	2.518	2.522
4	Golongan IV	532	509	520	481	458
5	PPPK	-	43	366	937	1.427
	<b>Jumlah</b>	<b>3.882</b>	<b>3.777</b>	<b>4.321</b>	<b>4.704</b>	<b>5.082</b>

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Desember Tahun 2024*

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan I tahun 2020 sebanyak 54 orang, tahun 2021 sebesar 43 Orang, Tahun 2022 sebanyak 34 orang, tahun 2023 sebanyak 34 orang dan tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 24 Orang. Jumlah pegawai Golongan II juga mengalami penurunan dari tahun ketahun, untuk tahun 2020 sebanyak 877 orang, tahun 2021 sebanyak 814 orang, di tahun 2022 sebanyak 850 orang, di tahun 2023 sebanyak 744 dan di tahun 2024 sebanyak 651. Sedangkan jumlah pegawai untuk Golongan III mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2020 sebanyak 2.419 orang, tahun 2021 sebanyak 2.411. tahun 2022 sebanyak 2.551, tahun 2023 sebanyak 2.518 dan di tahun 2024 sebanyak 2.522 serta pegawai untuk Golongan IV juga mengalami

peningkatan yang signifikan, untuk tahun 2020 sebanyak 532 orang, tahun 2021 sebanyak 509, tahun 2022 sebesar 366, tahun 2023 sebanyak 481 dan di tahun 2024 sebanyak 458. Ditambah dengan PPPK tahun 2021 berjumlah 43 orang, tahun 2022 sebanyak 366 orang, tahun 2023 sebanyak 937 dan tahun 2024 sebanyak 1.427.

Jabatan Struktural yang terdiri dari Eselon II sebanyak 35 ( Tiga puluh lima) orang, Eselon III sebanyak 168 ( Seratus enam puluh delapan ) orang, Fungsional Setara Eselon III Sebanyak 3 (Tiga ) Eselon IV sebanyak 314 (Tiga ratus empat belas) orang dan Fungsional Setara Eselon IV Sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima orang).

**Tabel 1.16.**

**Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d 2024**

No	JENIS JABATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tenaga Guru	1.541	1.501	1.904	2.226	2.268
2	Tenaga Kesehatan	493	505	765	754	813
3	Tenaga Teknis / Adm Lainnya	1.848	1.771	1.652	1.724	2.001
	<b>Jumlah</b>	<b>3.882</b>	<b>3.777</b>	<b>4.321</b>	<b>4.704</b>	<b>5.082</b>

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Desember Tahun 2024*

Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari Jabatan Tenaga Guru mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 1.541 orang sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.268, persentase kenaikan sebesar 212 %, Jabatan Tenaga Kesehatan juga mengalami peningkatan dari tahun 2020

sebanyak 493 orang, sampai dengan tahun 2024 sebanyak 813 orang dengan persentase peningkatan sebesar 154%, sedangkan untuk jabatan Tenaga Teknis /Administrasi Lainnya dari tahun 2020 sebanyak 1.848 orang samapi dengan tahun 2024 sebanyak 2.001 orang dengan persentase peningkatan sebesar 1208%.

**Tabel 1.17.**

**Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d 2024**

No	Pendidikan Terakhir	2022	2023	2024
1	DOKTORAL ( S3 )	7 Orang	6	6
2	PASCA SARJANA ( S2 )	320 Orang	324	323
3	SARJANA ( S1 )	2374 Orang	2842	3246
4	DIPLOMA ( D-IV )	104 Orang	112	120
5	DIPLOMA ( D-III )	597 Orang	604	640
6	DIPLOMA ( D-II )	203 Orang	154	118
7	DIPLOMA ( D-I )	8 Orang	7	7
8	SLTA	655 Orang	610	581
9	SLTP	42 Orang	35	32
10	SD	11 Orang	10	9
	<b>Jumlah</b>	<b>4321 Orang</b>	<b>4704 Orang</b>	<b>5082 Orang</b>

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun Desember Tahun 2024.*

Tingkat Pendidikan ditahun 2024 terdiri dari SD sebanyak 9 (Sembilan) orang, SMP sebanyak 32 (Tiga Puluh dua ) Orang, SMA sebanyak 581 (Lima Ratus Delapan Puluh Satu) orang, D1 sebanyak 7 (Tujuh) orang, D2 sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) orang, D3 sebanyak 640 (Enam Ratus Empat Puluh) Orang, D4 sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) orang, S1 Sebanyak 3246 ( Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh enam Ribu) Orang, S2 sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh Tiga) orang, S3 sebanyak 6(Enam) orang.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional, serta pemberian hukuman dan pembinaan.

a. Pemberian Penghargaan Tahun 2024 :

- 1) Satya Lencana dengan masa kerja 10 tahun,

jumlah : 98 ( Sembilan Puluh Delapan) orang.

- 2) Satya Lencana dengan masa kerja 20 tahun, jumlah : 75 ( Tujuh Puluh lima) orang.

- 3) Satya Lencana dengan masa kerja 30 tahun, jumlah : 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang.

b. Pendidikan Pelatihan Tahun 2023 meliputi :

- 1) Diklatpim I : - orang

- 2) Diklatpim II : 1 orang

- 3) Diklatpim III : - orang,

- 4) Diklatpim IV : - orang.

c. Pemberian Hukuman Pelanggaran Disiplin

Pegawai sebanyak : 8 orang, terdiri dari :

- 1) Pelanggaran disiplin tingkat ringan : Nihil,

- 2) Pelanggaran disiplin tingkat sedang : 2 Orang

- 3) Pelanggaran disiplin tingkat berat : 10 Orang

### 1.5. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Permasalahan pembangunan Kabupaten Karimun diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab

penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Karimun dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan-

permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun permasalahan yang ditemui pada daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 terdiri dari :

1. Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Peningkatan Pelayanan Dasar Terdepan yang Berkeadilan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia);
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0 (Terdepan dan Berkeadilan dalam Pengembangan Ekonomi

### 1.6. Isu Strategi

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang

Isu Strategis berdasarkan prioritas Pembangunan Tahun 2025 yaitu :

Kerakyatan);

3. Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan Antar Wilayah, Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Lingkungan yang belum optimal (Terdepan yang berkeadilan Pemerataan Bidang Infrastruktur);
4. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan Inovasi Daerah (Terdepan yang berkeadilan dalam Pelayanan Publik);
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pemulihan sektor pembangunan yang berdampak Covid-19.

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0 (Terdepan dan Berkeadilan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan) serta Penanggulangan Kemiskinan;
2. Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan Antar Wilayah, Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Lingkungan yang belum optimal (Terdepan yang berkeadilan Pemerataan Bidang Infrastruktur);
3. Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Peningkatan Pelayanan Dasar Terdepan yang Berkeadilan dalam

- Pembangunan Sumber Daya Manusia);
- 4. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan Inovasi Daerah (Terdepan yang berkeadilan dalam Pelayanan Publik);
- 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
- 6. Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah;

- 7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 8. Memperkuat Ketahanan Ekonomi;
- 9. Mengurangi Kemiskinan;
- 10. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
- 11. Meningkatkan Kualitas Kesehatan;
- 12. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya masyarakat.

### 1.7. Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) dilingkungan pemerintah Kabupaten Karimun di bentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik.

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.18**  
**Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun**

SEKRETARIAT	DINAS DAERAH	BADAN DAERAH	KECAMATAN	LAINNYA
Sekretariat Daerah Tipe A	Dinas Pendidikan Tipe A	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A	Kecamatan Karimun Tipe A	Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A
Sekretariat DPRD Tipe B	Dinas Kesehatan Tipe A	Badan Pendapatan Daerah Tipe A;	Kecamatan Meral;	Rumah Sakit Muhammad Sani;
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A	Kecamatan Tebing Tipe A	Rumah Sakit Tanjung Batu Kundur.
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B	Kecamatan Moro Tipe A	
	Dinas Sosial Tipe A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A	Kecamatan Kundur Tipe A	

SEKRETARIAT	DINAS DAERAH	BADAN DAERAH	KECAMATAN	LAINNYA
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Tipe A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tipe A	Kecamatan Buru Tipe A	
	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A		Kecamatan Kundur Barat Tipe A	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A		Kecamatan Kundur Utara Tipe A	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A		Kecamatan Meral Barat Tipe A	
	Dinas Perhubungan Tipe A		Kecamatan Durai Tipe A	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A		Kecamatan Ungar Tipe A	
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A		Kecamatan Belat. Tipe A	
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A		Kecamatan Segi Besar Tipe A	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A		Kecamatan Selat Gelam Tipe A	
	Dinas Perikanan Tipe A			
	Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A;			
	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe A			
	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A			
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A			
	Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A			

### 1.8. Maksud Dan Tujuan

Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju

pemerintah yang bersih, berwibawa, dan akuntabel.

Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Karimun pada setiap akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dalam wujud Laporan Kinerja yang dikomunikasikan kepada para

stakeholders dan pada hakekatnya adalah merupakan "Pertanggungjawaban Publik".

Laporan Kinerja selain memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan pihak-pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana perbaikan manajemen pemerintahan, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan publik. Fungsi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kabupaten Karimun.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 mencakup hal-hal berikut ini :

### 1.9. Sistematika Penyajian

Laporan ini disajikan dalam kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja

1. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
2. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan daerah sekitar, pemerintah kabupaten berbatasan, dan pemerintah provinsi dan pusat;
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, tidak termasuk biaya yang bersifat penunjan.

(*performance plans*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gaps*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Uraian singkat masing-masing bab disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum Pemerintah Kabupaten Karimun, potensi unggulan, permasalahan utama dan isu strategis, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Karimun untuk periode 2021–2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2024, dan menjelaskan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Tahun

2023.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, Menjelaskan analisis pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Karimun secara makro berkaitan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian kinerja hasil pembangunan untuk Tahun 2024

Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 dan saran perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

## BAB 2

## PERENCANA KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah merupakan langkah awal pencapaian tujuan jangka menengah lima tahunan yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, yang diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Untuk itu Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3); sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2021-2026.

#### 2.1.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Karimun yang merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Karimun yang ingin diwujudkan dalam rangka memantapkan landasan pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2021 - 2026, yaitu:

**“Terwujudnya Kabupaten Karimun  
Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi  
Berkeadilan Berlandaskan Iman Dan Taqwa”**

## 2.1.2. Misi Pembangunan Daerah

Untuk merealisasikan dan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun, Bupati/Wakil Bupati Karimun menetapkan misi pembangunan Kabupaten Karimun untuk Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi)
- b. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur)
- c. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)
- d. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup)
- e. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik)

Untuk mewujudkan visi, misi dan prioritas pembangunan tersebut juga dijunjung slogan "BERSIH" yaitu; Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis. Bersih dalam hal ini baik secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik bersih dalam dimensi lahir maupun bathin. dimana untuk menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terdepan pasti memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial, sehingga Kabupaten Karimun harus dibawa untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, sosial

maupun landasan spiritual.

Untuk melaksanakan slogan tersebut maka telah ditetapkan pula 4 (empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu:

### a. Azam Peningkatan Iman dan Taqwa

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab.

### b. Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada.

### c. Azam Pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan.

### d. Azam Pengembangan Seni dan Budaya

Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya Melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.

### 2.1.3. Tujuan Dan Sasaran.

Berdasarkan visi dan misi pembagunan daerah Kabupaten Karimun ditetapkan 6 (Enam)

tujuan dan 17 (Tujuh belas) sasaran, sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun 2021-2026**

TUJUAN		SASARAN	
PERTAMA	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemandirian Daerah	1.	Meningkatnya Investasi Daerah
		2.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan
		3.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
KEDUA	Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah	4	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata
		5	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal
KETIGA	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas	6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		7	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
		8	Terwujudnya Kesetaraan Gender
		9	Terwujudnya Pengendalian penduduk
		10	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan
KEEMPAT	Menurunkan Angka Kemiskinan	11	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah
		12	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
KELIMA	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	13	Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah
		14	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup
KEENAM	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ( <i>Good Government</i> )	15	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah Dan Air
		16	Terwujudnya Birokrasi Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel
		17	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik

## 2.2. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Pemerintah Kabupten Karimun 2024 yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 merupakan dokumen kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima amanat tentang tingkat kinerja dari suatu indikator yang telah ditentukan, dan harus dicapai dalam Tahun Anggaran 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun ke 24

(Dua puluh empat) sejak terbentuknya Pemerintah Kabupaten Karimun dan merupakan tahun ke 5 (lima) dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun periode 2021-2026. Mencermati arah dan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 maka pada tahun 2024 disusun 5 (Lima) prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari

RPJMD, dimana kelima prioritas pembangunan tersebut yang menjadi fokus pada tahun 2024 ini merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dari tema pembangunan Nasional dan tema pembangunan Provinsi, serta prioritas pembangunan dari masing-masing tingkatan

pemerintahan, maka Kabupaten Karimun menetapkan tema pembangunan tahun 2024 adalah Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) Berbasis Maritim Menuju Karimun yang Tedepan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1	<b>Prioritas Pertama</b>	:	Pemberdayaan 6000 UMKM Se- Kabupaten Karimun
2	<b>Prioritas Kedua</b>	:	Membangun Konektivitas Di Wilayah Kabupaten Karimun, Khususnya Kec. Belat, Kec. Ungar Dan Kec. Durai Serta Kecamatan Hasil Pemekaran, Yaitu Kec. Selat Gelam Dan Kec. Sugie Besar
3	<b>Prioritas Ketiga</b>	:	Penyiapan 3000 Tenaga Kerja Yang Berkompeten Dan Memiliki Skill Yang Dibutuhkan Pasar Industri
4	<b>Prioritas Keempat</b>	:	Menjadikan Kabupaten Karimun “Bersih” (Beriman, Sehat, Indah Dan Harmonis)
5	<b>Prioritas Kelima</b>	:	Digitalisasi Pelayanan Publik Dan Birokrasi

Selanjutnya dari kelima prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024 maka disusun arah dan sasaran kegiatan pokok pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

Adapun program-program yang mendukung sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun dalam kurun waktu selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Program Yang Mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2024**

NO	SASARAN		PROGRAM
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	1	Program pelayanan penanaman modal
2.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	2	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

NO	SASARAN	PROGRAM
3.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata	4 Program Pengelolaan SDA
5.	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal	5 Program Penyelenggaraan lahan
		6 Program Pengelolaan Pelayaran
		7 Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	8 program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat
		9 program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
7.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	10 Program Pengembangan Kurikulum
		11 Program pendidik Dan Tenaga kependidikan
8.	Terwujudnya Kestaraan Gender	12 Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
9.	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	13 Program pengendalian penduduk
10.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	14 Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan saing keolahragaan
11.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	15 Program Pengembangan Kebudayaan
12.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	16 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
13.	Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah	17 Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
		18 Program Penempatan Tenaga Kerja
		19 Program Hubungan Industrial
		20 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
14.	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	21 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		22 Program Pengelolaan Persampahan
15.	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air	23 Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
	Terwujudnya Birokrasi Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel	24 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
17.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	25 Program Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, maka untuk Tahun 2021 pelaporan kinerja telah diperbaiki

dengan terbitnya perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja sebagai perubahan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mencapai tujuan strategis tersebut telah menerapkan tata laksananya dengan baik meliputi 16 (enam belas) sasaran strategis. Kemudian sasaran strategis tersebut dimuat

dalam sebuah dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja yang tertera pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2024	INSTANSI
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	1.	Nilai Investasi	14,3 Triliun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
2.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Dalam Miliar Rp)	2.623.82 Miliar	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Perikanan
3.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	1.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	28,55 %	Badan Pendapatan Daerah
4.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata	1.	Rasio KK yang Terlayani Infrastruktur Dasar	37,28 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal	1.	Rasio Panjang Dalam Kondisi Baik	68,19 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,66	Dinas Perhubungan
		3.	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,87	Dinas Perhubungan
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	71,40 Tahun	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Derajat	1.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2024	INSTANSI
1	2	3		4	5
7.	Pendidikan Masyarakat	2.	Rata - Rata Lama Sekolah	8,75 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Terwujudnya Kesetaraan Gender	1.	Indeks Pembangunan Gender	91,50	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,30 %	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	1.	Indeks Pembangunan Pemuda	77	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	1.	Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi	30 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	1.	Persentase PPKS Mandiri	2,96 %	Dinas Sosial
13.	Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,10 %	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
14.	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	29,90 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
		2.	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	63	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air	1.	Indeks Kualitas Air	56,90	Dinas Lingkungan Hidup
		2.	Indeks Kualitas Udara	90,51	Dinas Lingkungan Hidup
		3.	Indeks Kualitas Lahan	52,58	Dinas Lingkungan Hidup
16.	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih Dan Akuntabel	1.	Nilai LPPD	4,0750	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Karimun
		2.	Indeks Reformasi Birokrasi	63	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karimun

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2024	INSTANSI
1	2	3		4	5
17.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Pelayanan Publik	3,51	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. RSUD M. Sani

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2024 terdapat 17 (tujuh belas) sasaran. Berdasarkan dari hasil pengukuran Kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi

18 (72,00%), 4 (16,00%) kriteria tinggi dan 3 (12,00%) sasaran sedang. Sementara itu, Rata-Rata capaian IKU telah memenuhi kriteria sangat tinggi (96,94%), namun demikian capaian per kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) bervariasi dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

No	Nilai	Skala Pengukuran Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten

Karimun untuk Tahun 2024. Pencapaian IKU Bupati Tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Pencapaian IKU Bupati Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024			Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s/d 2022 terhadap 2026	Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Triliun Rupiah	14,4	23,4	162,38	18,9	73,41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Miliar Rupiah	2.623,82	2.537,90	96,69	2.947,48	73,31	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Perikanan
3.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	30,30 %	28,27%	93,30	28,91	101,94	Badan Pendapatan Daerah
4.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata	Rasio KK yang Terlayani Infrastruktur Dasar	Persen	37,28 %	41,57%	111,51	38,63	93,53	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	68,19 %	39,75	58,29	86,93	76,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Persen	0,66	0,54	82,60	0,71	68,31	Dinas Perhubungan
		Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Persen	0,87	0,87	100	1,00	73,00	Dinas Perhubungan
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,05 Tahun	72,20 Tahun	100,21	71,70	99,76	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,10 Tahun	12,62 Tahun	96,34	13,50	93,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,75 Tahun	8,91 Tahun	101,83	9,00	94,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

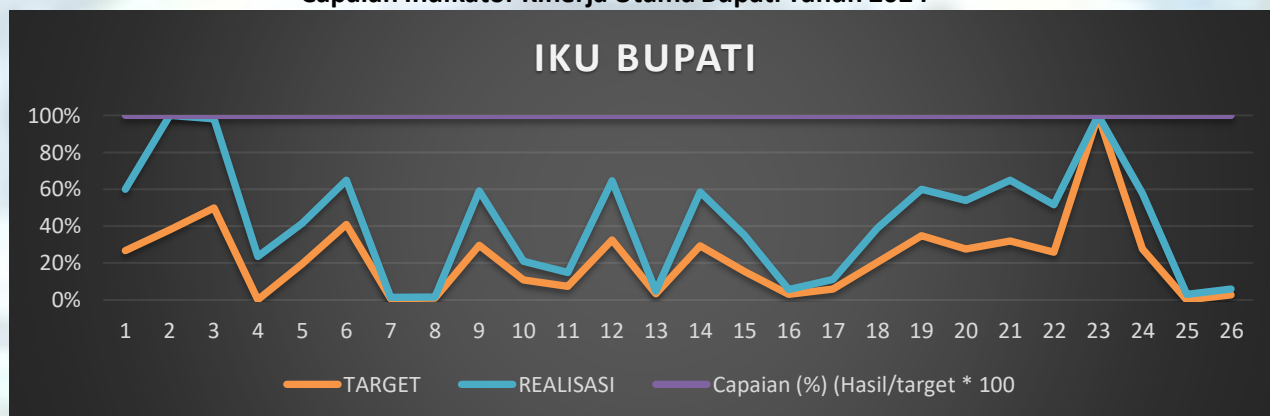
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024			Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s/d 2022 terhadap 2026	Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Terwujudnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	91,50	91,33	99,81	92,25	98,64	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,70 %	0,84 %	49,41	1,75	1,45	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	70	69,23	98,90	85	62,35	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi	Persen	30,00 %	37,50 %	125,00	52,5	42,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS Mandiri	Persen	2,69 %	2,27 %	84,39	3,03	46,20	Dinas Sosial
13.	Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,00 %	5,52 %	92,00 %	5,43	126,52	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
14.	Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Luas Ruang Terbuka Hijau	Hektar	29,90 Ha	26,75 Ha	89,46 %	38,45	50,14	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kinerja Pengelolaan sampah	Nilai	63,00	45,39	72,05	66	78,51	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air	Indeks Kualitas Air	Nilai	56,80	54,44	95,68	56,90	87,87	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	93,10	95,14	102,19	94,71	97,59	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lahan	Nilai	52,58	51,83	98,57	52,62	85,54	Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2024			Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s/d 2022 terhadap 2026	Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih Dan Akuntabel	Nilai LPPD	Nilai	4,075	-	-	4,1150	96,26	Bagian Tata Pemerintahan
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71,15	77,85	109,42	65	87,15	Bagian Organisasi
		Nilai Manajemen Resiko Indeks	Nilai	3,00	3,04	101,36	-	-	Baperlitbang
17.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51	4,37	124,50	4,00	86,50	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. RSUD M. Sani

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tahun 2024 yang berjumlah 25 indikator (100%), rata-rata capaian kinerja

IKU telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi (96,94%) yang digambarkan pada diagram berikut :

Grafik 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2024



### 3.2 . Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menganalisis dan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Penyajian untuk sub

bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Berikut akan dijelaskan analisis capaian masing-masing indikator dari 17 sasaran sebagai berikut:

### 3.2.1. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah

Wilayah Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura menjadikan Kabupaten Karimun memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini tentu menjadi potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Salah satu potensi ekonomi dimaksud adalah dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang dilakukan melalui pengembangan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik guna menangkap limpahan (*spill over*) positif dari negara-negara tetangga.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan sasaran Meningkatnya Aktivitas Ekonomi di Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru sebagai sasaran ke- 1 yang ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2024.

Di Kabupaten Karimun nilai investasi tidak hanya di pengaruhi oleh hanya satu faktor, parameter lain yang mempengaruhi nilai investasi tersebut mulai dari ekonomi, sosial, kepastian hukum, politik, masalah keamanan, insentif yang ditawarkan, ketersediaan lahan, dan infrastruktur penunjang. Dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah Kabupaten

Karimun sangat diperlukan dan penting bagi tumbuhnya investasi di daerah, mulai dengan pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal daerah seperti Kualitas SDM, Insentif investasi, deregulasi perizinan yang memudahkan, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan nilai realisasi investasi adalah dengan mengoptimalkan fungsi instansi penanaman modal sehingga proses pelayanan perizinan dan penanaman modal dapat berjalan dengan mudah dan cepat yang tentunya hal ini akan menumbuhkan citra positif bagi pelaku usaha (perusahaan) atas kemudahan berusaha di Kabupaten Karimun sehingga merangsang pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun.

Adapun indikator pendukung sebagai ukuran keberhasilan dari capaian sasaran ini adalah indikator nilai ekspor, nilai investasi dan jumlah kawasan strategis. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Nilai Investasi**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Investasi ( Rp)	14.400.000.000.000,-	23.400.000.000.000,-	162,38%
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian</b>				<b>162, 38 %</b>

*Sumber : DPMPTSP Kab. Karimun, 2025*

Dari tabel capaian diatas dapat dilihat bahwa realisasi dari target sasaran diperoleh rata-rata capaian sebesar 162,38 % dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Nilai Investasi merupakan faktor pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Daerah, tingkat pertumbuhan investasi yang tinggi dan berkesinambungan dibutuhkan untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pula dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai.

Persentase kenaikan PMDN dan PMA berbanding lurus atau sejalan dengan kenaikan Nilai realisasi investasi, di Kabupaten Karimun nilai investasi tidak hanya di pengaruhi oleh hanya satu faktor , ada parameter lain yang mempengaruhi nilai investasi tersebut mulai dari ekonomi, sosial, kepastian hukum, politik, masalah keamanan, insentif yang

ditawarkan, ketersediaan lahan, dan infrastruktur penunjang. Dukungan semua pihak terutama pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sangat diperlukan dan penting bagi tumbuhnya investasi di daerah, mulai dengan membenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal daerah seperti Kualitas SDM, Insentif investasi, deregulasi perizinan yang memudahkan, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten karimun untuk meningkatkan nilai realisasi investasi adalah dengan mengoptimalkan fungsi instansi penanaman modal sehingga proses pelayanan perizinan dapat berjalan dengan mudah dan cepat.

Di Tahun 2024 pelaksanaan rencana investasi dan proses perizinan berusaha berbasis resiko dilaksanakan melalui aplikasi *oss RBA* yang diajukan secara mandiri. Pada periode Januari – Desember 2024 *sistem oss* menerbitkan nomor induk berusaha

sebanyak 3.260 NIB yang terdiri dari 5 NIB dengan seluruh jenis penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pada data NIB tersebut tercatat jumlah rencana investasi sebesar Rp. 8,950,096,438,525,- rencana investasi tersebut tercatat pada lokasi proyek yang bergerak pada sektor energi berupa pembangkit Listrik Tenaga Surya skala besar, rencana investasi tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali mengingat investasi yang direncanakan sangat besar. Sedangkan rencana investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) masih belum ada penambahan di Tahun 2025 sehingga nilai rencana investasi dari PMA tidak ada penambahan.

Realisasi investasi di Tahun 2024

tercatat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar Rp. **9,013,932,767,356,-** yang terdiri dari PMA sebesar Rp 8,506,306,397,331,- dan PMDN sebesar Rp. 507,626,370,025,- terbagi berdasarkan jenis modal pada perusahaan .

PMDN terdiri UMK sebesar Rp. 82,959,501,466,- dan Non UMK sebesar Rp. 424,666,868,559,- Adapun Hambatan pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasi tersebut disebabkan belum terbitnya regulasi sektoral yang mengatur perizinan berusaha yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel perkembangan realisasi investasi di Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

**Rencana Investasi Kabupaten Karimun Tahun 2024**

No	Status Penanaman Modal	Jenis Perusahaan						Jumlah Rencana Investasi (Rp)
		Perorangan			Badan Usaha			
		NB	Lokasi Proyek	Jumlah Rencana Investasi (Rp)	NB	Lokasi Proyek	Jumlah Rencana Investasi (Rp)	
1	PMA	-	-	-	0	0	0	0
2	PMDN	3.054	3.646	213,133,890,813	206	1.825	32,672,493,090,881	32,885,626,981,694
		3.054	3.646	213,133,890,813	206	1.825	32,672,493,090,881	32,885,626,981,694

Sumber : <https://oss.go.id/>

Untuk menghitung nilai realisasi investasi pertahun adalah dengan melihat jumlah nilai realisasi yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha per triwulan dan Semester pada aplikasi OSS (Online single

submission). Pada tahun 2024 pelaku usaha yang menyampaikan LKPM berdasarkan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) yang dimiliki, hingga batas laporan pada triwulan IV tahun 2024 tercatat sebanyak 1.045 NKU yang dimiliki, dari Laporan

Kegiatan Penanaman modal oleh 1.045 tersebut telah disetujui 939 perusahaan yang selanjutnya nilai investasinya di catatkan dalam perolehan realisasi investasi di Tahun 2024. Dalam laporan tersebut diketahui selama Tahun 2024 terdapat nilai tambahan sebesar Rp. **9,013,932,767,356,-** yang terdiri dari PMA sebesar Rp 8,506,306,397,331,- dan PMDN sebesar Rp. 507,626,370,025 ,- sehingga jika dijumlahkan dengan tahun

sebelumnya maka total realisasi investasi di Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 sebesar Rp. 23.463.820.319.585,- dalam hal capaian realisasi investasi tahun 2024 yang di targetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar 14,3 Triliun telah melebihi target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel perkembangan realisasi investasi di Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Tambahan Investasi di Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2024**

No	Status Badan Usaha	Jumlah Tambahan Realisasi Investasi				Jumlah 2024
		TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	PMA	150,359,376,362.	7,360,732,992	70,285,984,920	8,278,300,303,057	8,506,306,397,331
2	PMDN	86,817,521,068	217,906,288,976	82,323,888,058	120,578,671,923	507,626,370,025.
	Jumlah	237,176,897,430	225,267,021,968	152,609,872,978	8,398,878,974,980	9,013,932,767,356

Sumber : <https://oss.go.id/> (Data LKPM yang telah di setujui evaluator) per tanggal 10 Januari 2025

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Investasi di Kabupaten Karimun Tahun 2024**

NO	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Total Investasi	3.880.718.526.841	3.900.329.660.974	4.432.269.033.290	11.250.503.098..480	23.463.820.319.585

Sumber : <https://oss.go.id/> (Data LKPM yang telah di setujui evaluator) per tanggal 12 Januari 2025

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Total Realisasi Investasi**  
**di Kabupaten Karimun Tahun 2022, 2023 dan 2024**

STATUS PENANAMAN MODAL	TAHUN		
	2022	2023	2024
PMA	10,156,740,391,975	10.371.877.425.821	18.878.183.823.152
PMDN	3,700,599,526,667	4.078.010.126.409	4.585.636.496.434
<b>TOTAL</b>	13,857,339,918,642	14.449.887.552.230	23.463.820.319.586

Adapun target realisasi investasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 14.3 T**, maka capaian realisasi investasi yang dicapai **Rp 23,4 T**, capaian indikator ini

dapat di hitung dengan membandingkan realisasi terhadap target dengan rumus rumus berikut :

Tabel 3.8

Persentase Kenaikan Nilai Investasi di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Nilai Investasi	=	Nilai Investasi Tahun n	-	Niai Investasi Tahun n-1	X 100%	
		Niai investasi Tahun n-1				
Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	=	23.463.820.319.586	-	14.449.887.552.230	X 100%	= 6,23 %
		14.449.887.552.230				

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Dari realisasi diatas, untuk capaian indikator sasaran RPJMD persentase nilai investasi pada Tahun 2024 sebesar 6.23 %,

ini bermakna bahwa indikator tersebut menunjang tercapainya misi Pemerintah Kabupaten Karimun.

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Tabel 3.9

Analisa Efisiensi di Kabupaten Karimun Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Input			Indikator Kinerja (Output)			Tingkat Efisiensi (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5
Meningkatnya kualitas pelayanan dan dan optimalisasi Investasi	- Nilai IKM	-	-	-	3.55	3.52	99.15	99.15
	- Nilai Investasi	634.436.000	535.478.800	84.40	14.3 T	23.4 T	163.6	79.2

1. Efisiensi sumber daya biaya.

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk

mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah

Anggaran merupakan alat perencanaan

target yang harus dicapai untuk dibelanjakan. Upaya efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan standar harga yang telah ditetapkan dan pembelanjanya telah dipergunakan sesuai peruntukannya.

Penggunaan sumber daya biaya untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi** dalam rangka mendukung pelaksanaan :

- Program pelayanan penanaman modal, sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan, dengan indikator nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal. Pada Tahun 2024 kegiatan ini tidak dapat terlaksana namun kegiatan tetap dijalankan, dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana para pelaku usaha wajib untuk mengisi kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat melalui link <https://dpmptsp.karimunkab.go.id>
- Program Pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan telah mencapai tingkat yang tinggi.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase kenaikan PMDN dan PMA. Realisasi anggaran sebesar Rp. 535.478.800,- (84.40 %), anggaran kegiatan ini bersumber dari Dana DAK Non Fisik yang dialokasikan kedaerah dengan tujuan peningkatan Nilai Investasi. Upaya efisiensi yaitu Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.

## 2. Efisiensi sumber daya manusia.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan cara mengirimkan link kuesioner ke semua pengguna layanan : [dpmptsp.karimunkab.go.id/skm](https://dpmptsp.karimunkab.go.id/skm) bersamaan dengan email penyerahan izin yang telah selesai diproses. Sedangkan untuk pengisian Survei Kepuasan Masyarakat secara manual, tiap kecamatan diambil sebanyak 5-10 responden untuk memenuhi syarat pengumpulan data yang lebih luas. Jumlah responden penerima layanan yang diperoleh pada tahun 2024 yaitu 550 orang responden.

## 3. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana bisa diartikan sebagai suatu yang dipergunakan guna mencapai tujuan, alat dan juga media sebagai penunjang utama

terselenggaranya kegiatan ataupun proses. Terkait pelaksanaan penggunaan sarana prasarana pada program pelayanan penanaman modal, sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan

pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan yaitu Sarana : meja, kursi, komputer, alat tulis kantor. Prasarana : Tim Manajemen, Gedung.

### 3.2.2. Sasaran Strategis Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan

Perkembangan ekonomi Kabupaten Karimun dapat dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana pada sasaran **Berkembangnya Sektor Ekonomi Nominan** memiliki indikator **Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (Dalam Miliar Rp)**. PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai barang

dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai unit produksi di wilayah Kabupaten Karimun dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun target dan capaian dari indikator nilai PDRB sektor pertanian Kehutanan dan perikanan Kabupaten Karimun pada tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.10

Target dan Capaian Nilai PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN %
1	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan (Dalam Miliar Rp)	2.623,82 Miliar	2.537,09 Miliar	96,69 % (Persen)

Dari table diatas dapat diketahui bahwa Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, dimana target nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan pada tahun 2024 yaitu 2.623,82 miliar dan realisasi 2.537,09 miliar dengan capaian 96,69 %. Hal ini menunjukkan

bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Karimun telah mendekati nilai target yang ditetapkan dari faktor pendukung dari nilai PDRB Sektor Pertanian dan perikanan di Kabupaten Karimun.

Tercapainya target pada sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Meningkatnya produksi pertanian karena mampu menyediakan ketersediaan bahan

pangan sehingga dengan sendirinya menekan inflasi secara signifikan serta didukung oleh penyerapan tenaga kerja disektor pertanian.

2. Meningkatnya produksi perikanan, dimana pemerintah juga ikut serta dalam membantu ketersediaan sarana dan prasarana baik di sector perikanan

tangkap, budidaya maupun pengolahan perikanan.

Nilai PDRB diperoleh dari 3 sektor yaitu sector pertanian, kehutanan dan perikanan. Adapun nilai PDRB pada tiap-tiap sector dapat dilihat pada table dibawah.

**Tabel 3.11.**

**Nilai PDRB Kabupaten Karimun tiap Sektor Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2022
1	Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	742,58 Miliar
		Kehutanan dan Penebangan Kayu	8,20 Miliar
		Perikanan	1.535,56Miliar
<b>TOTAL NILAI PDRB</b>			<b>2.286,34 Miliar</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai PDRB pada sector Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian memiliki realisasi sebesar 742,58 miliar, dimana pada sector ini memiliki 32,48% dari realisasi keseluruhan sector. Sementara untuk sector perikanan memiliki realisasi sebesar 1.535,55 miliar, dimana sector perikanan memiliki 67,16% dari realisasi keseluruhan sector. Hal ini menunjukkan bahwa pada sector perikanan lebih dominan dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Karimun.

Nilai PDRB pada sector Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa

Pertanian diperoleh dan didukung dari beberapa indicator yaitu Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Populasi Ternak di Kabupaten Karimun, jumlah produksi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun tersebut di tabulasikan dan diolah kembali oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Karimun sehingga diperoleh nilai PDRB dari sector Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian lainnya, salah satu data dukung PDRB sector Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dapat di lihat pada dilihat pada beberapa tabel dibawah ini :

## 1. Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Nilai PDRB pada sector Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian diperoleh dan didukung dari beberapa indicator yaitu Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan

dan Populasi Ternak. Adapun jumlah produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dibawah ini dengan angka perbandingan pada tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 3.12.**  
**Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun**  
**Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan Tahun 2023 s.d.2024 (Ton per Ha)**

Komoditas	Jagung		Talas		Ubi Kayu		Ubi Jalar		Kacang Tanah	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
<b>JUMLAH</b>	<b>455,7</b>	<b>378,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>773,3</b>	<b>798,2</b>	<b>32,8</b>	<b>83,9</b>	<b>24,7</b>	<b>45,0</b>

*Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025*

Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa untuk produksi komoditas tanaman pangan pada tahun sebanyak 1.287 ton pada tahun 2023, produksi tanaman pangan sebanyak 1.305 ton pada tahun 2024, peningkatan produksi dari tahun sebelumnya sebesar 101,39 persen, peningkatan produksi ini di pengaruhi oleh semakin banyaknya petani yang berusaha tani komoditas tanaman pangan dan semakin banyaknya permintaan akan komoditas tersebut di Kabupaten Karimun, sehingga diharapkan komoditas

tanaman pangan menjadi alternatif untuk peningkatan pendapatan petani dan keluarganya.

Peningkatan produksi komoditas tanaman pangan tahun 2024 di dukung oleh produksi tanaman Jagung sebesar 378,1 ton, ubu kayu sebanyak 798,2 ton, ubi kayu sebanyak 83,9 ton, talas sebanyak 0,5 ton dan kacang tanah sebanyak 45 ton, angka ini diharapkan terus meningkat seiring dengan input sarana produksi untuk menunjang usaha tani kelompok tani di di Kabupaten Karimun.

Tabel 3.13.

**Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat  
menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2023 s.d.2024 (Ton)**

Kecamatan	Karet		Kelapa		Cengkeh		Kopi		Lada		Gambir	
	2023	2023	2023	2024	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
JUMLAH	5.613	1.007,75	2.192,60	1.022,25	1,72	0,8	0,37	0,26	3,92	1,98	470	249,3

*Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025*

Dari tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa untuk produksi komoditas perkebunan tahun 2024 di Kabupaten karimun sebanyak 3.484 Ton, atau 42,06 persen pencapaian dari tahun 2023, dikarenakan banyaknya tanaman karet tua dan stagnannya harga karet dipasaran, petani cenderung mengusahakan komoditas hortikultura seperti durian yang mempunyai potensi dan prospek pendapatan petani yang lebih menjanjikan.

Produksi tanaman Kelapa sebesar 2.192,60 ton pada tahun 2023, tahun 2023 produksi tanaman Kelapa sebesar 1.022,25 ton, penurunan sebesar 1,87

% dikarenakan beberapa sentra produksi terserang hama yang berakibat penurunan produksi di Kabupaten Karimun, tetapi tanaman kelapa tetap menjadi andalan petani di Kabupaten Karimun mengingat pemeliharaan tanaman yang tidak begitu susah, umur panen yang singkat serta tingkat produksi yang tinggi menjadikan tanaman kelapa menjadi Komoditas unggulan di Kab, Karimun. Adapun jumlah Populasi Ternak Besar menurut Jenis Di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dibawah ini dengan angka perbandingan pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.14.

**Populasi Ternak Besar menurut Jenis Di Kabupaten Karimun Tahun 2023 s.d.2024**

NO	Produksi Peternakan	PRODUKSI (kg)	
		2023	2024
1.	Daging Sapi	6.299	6.388
2.	Daging Kambing	18.208	20.832

*Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025*

Upaya peningkatan populasi ternak di Kabupaten Karimun terutama sapi dan kambing, dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi jumlah ketersediaan daging dan Perayaan hari raya idul adha di daerah Kabupaten Karimun. peningkatan produksi ternak besar pada tahun 2024 sebesar 111,07 % di Kabupaten Karimun dikarenakan permintaan pasar yang besar sehingga

menjadikan usaha ternak sapi dan kambing di Kabupaten menjadikan usaha yang cukup menjanjikan. Komoditas peternakan dengan jumlah populasi ternak sapi sebesar 6.299 ekor pada tahun 2023 dan 6.388 pada tahun 2024 sedangkan populasi ternak kambing pada tahun 2023 sebanyak 18.208 ekor dan pada tahun 2024 sebanyak 20.832 ekor.

**Tabel. 3.15.**  
**Data Produk Ternak di Kecamatan Di Kabupaten Karimun pada Tahun 2024**

Kecamatan	Daging Sapi	Daging Kambing	Daging Babi	Daging Ayam	Daging Bebek	Telur Ayam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Moro	438	384	-	7008	-	-
Durai	-	-	-	-	-	-
Sugie Besar				-		-
Kundur	612	288	2400	38544	-	1253167
Kundur Utara	175	96	-	15768	-	377166.7
Kundur Barat	175	96	4800	22776	-	498833.3
Ungar	-	-	-	-	-	-
Belat	-	-	-	-	-	-
Karimun	4988	-	-	-	-	-
Buru	-	-	-	-	-	-
Meral	-	19968	-	455520	-	-
Tebing	-	-	17520	595680	2855	-
Meral Barat	-	-	2520	700800	-	-
Selat Gelam				-		-
<b>Total</b>	<b>6,388</b>	<b>20,832</b>	<b>27,240</b>	<b>1,836,096</b>	<b>2,855</b>	<b>2,129,167</b>

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Upaya peningkatan produksi peternak di Kabupaten Karimun baik daging maupun telur dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi jumlah ketersediaan kebutuhan daging dan telur di Kabupaten Karimun. Tingginya

permintaan pasar akan ternak besar seperti sapi dan kambing pada saat perayaan idul adha menyebabkan minat peternak untuk memenuhi kebutuhan ternak di Kabupaten Karimun semakin meningkat ini ditandai dengan

bertambahnya jumlah peternak di Kabupaten Karimun, peningkatan produksi peternakan pada tahun 2023 sebesar 24,83 % sehingga menjadikan usaha peternakan di Kabupaten

menjadikan usaha yang cukup menjanjikan sehingga sub sector peternakan juga akan menjadi sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Karimun.

## 2. Sektor Perikanan

Nilai PDRB pada sector perikanan diperoleh dan didukung dari beberapa indicator yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan. Adapun jumlah

produksi perikanan Tangkap, Budidaya dan Hasil Olahan Perikanan di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dibawah ini dengan angka perbandingan pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.16.

Volume dan Produksi Perikanan 2017s.d. 2024

Tahun	Jumlah Produksi (Ton)	Nilai (Rp,-)
2017	60.116,00	1.887.966.468.000,-
2018	66.387,00	2.029.508.642.000,-
2019	57.621,22	1.996.308.683.000,-
2020	52.952,82	1.864.502.760.000,-
2021	34.545,42	1.247.166.484.000,-
2022	38.439,02	1.272.154.785.000,-
2023	39.443,48	1.434.229.991.000,-
2024	40.059,57	1.465.742.580.000,-

Sumber: Dinas Perikanan, Tahun 2025

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa pada tahun 2024 di Kabupaten Karimun memiliki jumlah produksi perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan) yaitu 40.059,57 ton dengan nilai Rp. 1.465.742.580.000,- dan pada tahun 2023 yaitu 39.443,48 ton dengan nilai Rp.

1.434.229.991.000,-. Hal ini menggambarkan bahwa sudah terjadi peningkatan jumlah produksi perikanan serta nilai yang mencakup sektor tangkap, budidaya dan pengolahan sebesar 1,56 % dari tahun sebelumnya. Adapun faktor pendorong terhadap naiknya produksi

perikanan di Kabupaten Karimun yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya penambahan RTP Budidaya di sector Komoditas Unggulan baik di Perikanan Budidaya Air Tawar, Laut, Payau dan Rumput Laut;
- b. Penerapan Teknologi dalam kegiatan Budidaya, sehingga dapat mengoptimalkan hasil produksi;
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran sebagai salah satu faktor pendorong peningkatan produksi produk olahan, untuk kegiatan pasca panen setelah ikan tersebut ditangkap hingga menjadi bahan baku industry pengolahan. Bahan pangan (ikan) yang dikonsumsi wajib memenuhi kaedah food safety dan bernilai gizi baik. Penyediaan peralatan pemasaran yang tepat sangat penting dalam menjamin mutu ikan, terutama dalam meningkatkan daya Tarik dan kepercayaan konsumen.

Produksi perikanan tangkap tahun 2024 naik, namun tidak signifikan hanya 0,127%, hal ini disebabkan karena :

- a. Produksi perikanan tangkap sudah terdata dengan baik, dengan adanya Pelabuhan Perikanan Baran dan Pelabuhan Perikanan Moro dalam meningkatkan PNBK pasca produksi

(Penangkapan Ikan Terukur) dari sector Perikanan, dimana petugas pencatatan produksi perikanan tangkap mencatat setiap Kapal Perikanan yang membongkar di pelabuhan perikanan tersebut;

- b. Adanya bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sarana penangkapan ikan namun tidak maksimal karena adanya pemangkasan anggaran sehingga kegiatan bantuan terhadap nelayan banyak yang tidak jalan;
- c. Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan yang di subsidi Pemerintah stoknya aman dan berjalan lancar;
- d. Adanya factor eksternal berupa iklim dan cuaca yang tidak bersahabat di awal dan di akhir tahun, juga adanya fenomena kekeruhan air pada musim dan perairan tertentu, yang menyebabkan nelayan tidak pergi menangkap ikan

Produksi perikanan tangkap adalah hasil yang didapatkan dari kegiatan menangkap ikan dan hewan air lainnya di laut dan perairan umum. Produksi ini diukur dalam berat hidup ikan saat baru dipancing. Produksi perikanan tangkap dapat digunakan sebagai indicator keberhasilan kegiatan perikanan dan dasar untuk menyusun kebijakan pembangunan perikanan.

Faktor yang mempengaruhi keoptimalan suatu usaha penangkapan adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud merupakan factor teknik unit penangkapan sedangkan factor eksternal adalah factor yang dipengaruhi oleh habitat atau kondisi cuaca. Salah satu factor yang dapat mempengaruhi hasil tangkapan adalah jumlah ketersediaan sumberdaya ikan, bahan bakar minyak, alat tangkap, kapal dan nelayan.

Sumber daya perikanan dan kelautan secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dalam kesejahteraan masyarakat nelayan. Banyaknya tangkapan secara langsung juga berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima hingga nelayan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan hidupnya tersedia dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mencegah turunnya jumlah produksi perikanan di sektor perikanan tangkap yaitu:

- a. Penertiban dan pengawasan

penangkapan ikan agar potensi penangkapan ikan bisa dikelola secara optimal.

- b. Setiap masukan dari para pelaku usaha perikanan tangkap akan ditindak lanjuti yang diakomodir oleh tenaga pengelola data kelembagaan dan masyarakat yang berada di setiap kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di 5 Pulau Besar yaitu Karimun, Buru, Moro, Kundur dan Durai;
- c. Bantuan dari pemerintah Kabupaten Karimun berupa sarana prasarana berupa armada penangkapan ikan dan alat tangkap menjadi kunci utama bagi nelayan untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

Sementara dalam sektor perikanan budidaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu :

- a. Memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pembudidayaan ikan sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di bidang Perikanan Budidaya;
- b. Peningkatan dan penambahan sarpras Budidaya Perikanan;
- c. Optimalisasi potensi budidaya yang dimiliki;

- d. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha budidaya;
- e. Pengaturan dan pengelolaan panen;
- f. Seperti halnya usaha budidaya ikan laut seperti bawal bintang, kerapu macan dan kerapu hybrid (cantang) semakin berkembang serta diminati oleh masyarakat nelayan pembudidaya ikan khususnya di Kecamatan Moro, karena nilai jualnya yang tinggi dan adanya jaminan pasar khususnya ikan kerapu macan hidup. Selain itu adanya bantuan KJA HDPE dari Pemerintah Provinsi Kepri serta benih dan Pakan dari Pemerintah Kabupaten Karimun menyebabkan motivasi pembudidaya ikan laut meningkat.

Adapun Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar tercapainya target pada produksi hasil olahan perikanan yaitu :

1. Membuka akses bagi pelaku usaha perikanan Kabupaten Karimun dalam

mendapatkan peralatan pengolahan ikan yang memadai dan sesuai standar;

2. Meningkatkan inovasi dan deversifikasi produk yang dihasilkan sehingga pada akhirnya mempengaruhi kemampuan produk local bersaing di pasar domestik maupun internasional;
3. Penyediaan peralatan pemasaran yang tepat sangat penting dalam menjamin mutu ikan, terutama dalam meningkatkan daya tarik dan kepercayaan konsumen;
4. Membina dan mendampingi pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

Dari jumlah produksi yang sudah diketahui, maka akan dijabarkan jumlah produksi di Kabupaten Karimun yang ada pada 14 kecamatan setiap sektor tangkap dan budidaya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17.

**Volume dan Nilai Produksi Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024**

Kecamatan	Penangkapan		Budidaya	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Kecamatan Karimun	4.435	176.259.936.000	58,20	1.149.912.000
Kecamatan Meral	10.094	398.715.639.000	349,17	6.899.475.000
Kecamatan Tebing	2.504	84.545.300.000	116,39	2.299.825.000
Kecamatan Kundur	322	9.795.488.000	139,67	2.759.790.000

Kecamatan	Penangkapan		Budidaya	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Kecamatan Moro	6.440	250.004.244.000	-	-
Kecamatan Durai	560	19.023.943.000	116,39	2.299.825.000
Kecamatan Buru	1.974	70.754.068.000	-	-
Kecamatan Kundur Barat	1.128	36.086.755.000	58,20	1.149..912.000
Kecamatan Kundur Utara	464	12.630.517.000	93,11	1.839.860.000
Kecamatan Meral Barat	667	21.351.936.000	34,92	689.947.000
Kecamatan Belat	1.244	34.396.045.000	-	-
Kecamatan Ungar	1.655	44.433.278.000	58,20	1.149.912.000
Kecamatan Sugi Besar	3.413	122.342.525.000	139,67	2.759.790.000
Kecamatan Gelam	3.673	132.689.462.000	-	-
Jumlah	38.573	1.413.029.136.000	1.163,90	22.998.249.000

**Sumber:** Dinas Perikanan, Tahun 2025

Dilihat dari tabel diatas, jumlah produksi perikanan di Kecamatan Meral memiliki Volume produksi tertinggi di sektor penangkapan (10.094 ton) dan sektor budidaya (349,17), serta volume produksi tertinggi pada produksi hasil olahan perikanan di kecamatan moro (112,24 ton). Adanya bantuan dari

pemerintah Kabupaten Karimun berupa sarana prasarana, armada penangkapan ikan dan alat tangkap menjadi kunci utama bagi nelayan untuk melakukan usaha penangkapan ikan. Untuk melihat jumlah armada penangkapan Kabupaten Karimun dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 3.18.**  
**Jumlah Armada Penangkapan Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH ARMADA (UNIT)						JUMLAH (Unit)
		PTM	PERAHU BERMOTOR	MOTOR TEMPEL	< 5 GT	5 - 30 GT	> 30 GT	
1	Kecamatan Karimun	17	47	15	72	6		157
2	Kecamatan Meral	64	125	8	303	102	123	725
3	Kecamatan Tebing	14	107	249	175	-		545
4	Kecamatan Kundur	5	86	1	34	-		126
5	Kecamatan Moro	56	443	132	476	51	3	1.161
6	Kecamatan Durai	23	134	8	224	1		390
7	Kecamatan Buru	2	381	63	180	25		651
8	Kecamatan Kundur Utara	0	77	3	23	-		103

9	Kecamatan Kundur Barat	3	378	10	66	-	457
10	Kecamatan Meral Barat	87	142	53	157	-	439
11	Kecamatan Belat	64	197	5	60	-	326
12	Kecamatan Ungar	15	282	2	67	-	366
13	Kecamatan Sugie Besar	90	615	218	270	5	1.198
14	Kecamatan Gelam	4	239	67	89	2	401
JUMLAH							7.045

**Sumber:** Dinas Perikanan, Tahun 2025

Selanjutnya untuk **Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan** di Kabupaten

Karimun pada tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.19**  
**Volume dan Nilai Produksi Hasil Olahan Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2024**

Kecamatan	Produksi Hasil Olahan Perikanan	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Kecamatan Karimun	26,22	2.448.825.000
Kecamatan Meral	81,58	5.995.800.000
Kecamatan Tebing	7,32	878.400.000
Kecamatan Kundur	5,84	657.825.000
Kecamatan Moro	112,24	13.468.800.000
Kecamatan Durai	9,78	781.800.000
Kecamatan Buru	57,93	4.074.000.000
Kecamatan Kundur Barat	10,01	626.295.000
Kecamatan Kundur Utara	0	-
Kecamatan Meral Barat	3,29	377.400.000
Kecamatan Belat	3,27	130.800.000
Kecamatan Ungar	5,20	275.250.000
Kecamatan Sugi Besar	-	-
Kecamatan Gelam	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>322,67</b>	<b>29.715.195.000</b>

**Sumber:** Dinas Perikanan, Tahun 2025

Adapun Data Jumlah Ekspor usaha perikanan di Kabupaten Karimun dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20

Jumlah Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Tahun 2017 s.d. 2024

NO	URAIAN	PRODUKSI (Ton)								PENINGKATAN/ PENGURANGAN (%)
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1.	Jumlah ekspor perikanan budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah ekspor perikanan tangkap	10.111	7.000,014	4.961,66	4.192,63	3.858	1.134,54	703,26	734,77	4,48 %
3.	Jumlah ekspor pengolahan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		10.111	7.000,014	4.961,66	4.961,66	3.858	1.134,54	703,26	734,77	4,48 %

Sumber :Dinas Perikanan, Tahun 2025

Volume dan nilai ekspor Perikanan tangkap tahun 2024 naik 4.48%, dimana selama 7 tahun terakhir kondisi volume ekspor perikanan tangkap menurun signifikan secara terus menerus, baik karena fenomena covid 19, permintaan konsumen yang berkurang serta hasil tangkapan yang tidak memenuhi kualitas ekspor/permintaan konsumen. dengan kenaikan ini tentunya diharapkan kondisi ekspor perikanan tangkap kita tahun-tahun berikutnya dapat naik kembali, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan kita.

Adapun faktor penyebab kenaikan volume ekspor perikanan tangkap ini disebabkan :

1. Tidak ada pembatasan permintaan dari konsumen luar negeri, sehingga berapapun jumlah ikan dan jenis ikan

yang dibawa tetap diterima

2. Harga ikan yang stabil
3. Hasil tangkapan Nelayan untuk kualitas grade A naik terutama ikan Tenggiri dan Kurau.

Sedangkan untuk Perkembangan produksi dan nilai eksport perikanan per-triwulan untuk tahun 2024 di Kabupaten Karimun disajikan dalam table berikut:

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Tangkap mengalami Kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2024 lalu. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya :

1. Peningkatan Produksi  
Keberhasilahn dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan adopsi teknologi modern dalam aktivitas penangkapan ikan serta cuaca yang mendukung aktivitas penangkapan.

2. Deversifikasi Produksi

Inovasi dalam produk perikanan seperti produk olahan atau produk dengan nilai tambahan yang lebih tinggi dan pemanfaatan ikatan yang sebelumnya kurang diminati.

3. Perbaikan infrastruktur dan logistik

Meningkatkan fasilitas pelabuhan perikanan yang lebih efisien dan sistem rantai dingin (cold Chain) yang lebih baik untuk menjaga kualitas ikan selama pengiriman.

4. Kebijakan pemerintah

Kebijakan subsidi bahan bakar bagi nelayan dan regulasi yang mendukung ekspor perikanan serta kemitraan strategi dengan pasar internasional

5. Kondisi pasar

Permintaan pasar lokal atau global yang meningkat untuk produk perikanan tangkap dan perbaikan hubungan perdagangan dengan negara – negara tujuan ekspor

6. Kualitas produk yang terjaga

Sertifikasi produk perikanan yang memenuhi standar internasional dan peningkatan pengawasan terhadap keamanan penagan dan kualitas ikan.

Sedangkan untuk Perkembangan produksi dan nilai ekspor perikanan per-triwulan untuk tahun 2024 di Kabupaten Karimun disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.21

Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Kabupaten Karimun Selama Tahun 2024

NO	BULAN	VOLUME (Ton)	NILAI (Rp.)
1	JANUARI-MARET	163,56	2.950.500.000
2	APRIL-JUNI	162,10	3.240.200.000
3	JULI-SEPTEMBER	208,69	4.588.010.000
4	OKTOBER-DESEMBER	200,42	4.518.030.000
JUMLAH		734,77	15.296.740.000

Sumber: Dinas Perikanan, Tahun 2025

**ANALIS EFESIENSI SUMBERDAYA**

Efisiensi merupakan hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Berikut

disampaikan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya yang mendukung Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan pada sasaran ini untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya yang Mendukung Indikator Nilai PDRB  
Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan

TAHUN	PROGRAM	KEGIATAN	INPUT		OUTPUT		OUTCOME		EFISIENSI
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2023	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.510.684.000	3.171.143.600	11.377 Ton	25.838 Ton	100 % / Jumlah produksi budidaya tercapai	227 % /Jumlah produksi pertanian 25.838 ton	Tidak efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat dari
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.089.295.697	14.230.148.326	37.370 ton	38.524 ton	100 % / Jumlah produksi tangkap tercapai	103 % / jumlah produksi tangkap 38.524 ton	penggunaan anggaran yang tersedia pada tahun 2024 lebih kecil
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	1.710.799.964	1.606.295.252	499,89 ton	677 ton	100 % / Jumlah produksi budidaya tercapai	103 % / jumlah produksi budidaya 677 ton	dibandingkan dengan tahun 2023 tetapi cukup efisiensi.
2024	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.127.738	84.693.100	130 ton	242,48 ton	100 % / Jumlah Hasil Olahan Perikanan tercapai	103 % / Jumlah Hasil Olahan Perikanan 242,48 ton	dikarenakan dari output keluaran target dimana realisasinya lebih besar
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	781.858.844	165.659.500	12.537 Ton	13.642 Ton	100 % / Jumlah produksi tercapai	108 % /Jumlah produksi pertanian 13.642 Ton	dibandingkan pada tahun 2024 dan dari outcome pencapaian
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.120.956.673	1.071.506.094	37.744 ton	38.573 ton	100 % / Jumlah produksi tangkap tercapai	102 % / jumlah produksi tangkap 38.573 ton	realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023..
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	4.274.429.633	3.537.094.898	529,88 ton	1.163,90 ton	100 % / Jumlah produksi budidaya tercapai	103 % / jumlah produksi budidaya 1.163,90 ton	
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	478.925.450	433.737.925	137 ton	322,67 ton	100 % / Jumlah Hasil olahan perikanan tercapai	103 % / Jumlah Hasil olahan perikanan 322,67 ton	

Sumber: Dinas Perikanan, Tahun 2025

3.2.3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil,

bermanfaat, wajar, tertib, taatperaturan perundang undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini penyusunan

Anggaran Pendapatan Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah memiliki peran vital dalam rangka desentralisasi fiskal mengingat keterbatasan keuangan negara dalam membantu membiayai pembangunan di daerah. Kemampuan daerah dalam

memajukan perekonomian daerah salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*). Pada tahun 2024 yang merupakan tahun Pertama RPJMD, realisasi pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah telah menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerjanya yang telah mencapai kinerja Sangat Tinggi. Adapun indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut:

**Tabel 3.23.**  
**Teget dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024**

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan daerah	30,30 %	28,27	93,30

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karimun, 2025*

Untuk tahun 2024 kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Karimun ditargetkan **30,30%** dari target pendapatan daerah Kabupaten Karimun. Namun seiring berjalannya waktu capaian realisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2024 sekitar **28,27%** atau sekitar **Rp. 372.206.420.339,97** dari target

pendapatan asli daerah PAD sebesar **Rp. 403.112.004.485**. Di tahun 2024 walaupun capaian kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menurun yaitu sebesar **93,30%**.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Kontribusi PAD mengalami kenaikan ditahun 2024 antara lain :

1. Tercapainya realisasi penerimaan PAD dari

target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya beberapa komponen

PAD yang telah mencapai target seperti :

- a. Pajak Daerah Sebesar 105,75%
- b. Penerimaan retribusi daerah sebesar 94,62%;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 77,21%; dan

d. Penerimaan lain-lain PAD yang sah turun sekitar menjadi 8,49% dimana pada tahun 2023 sebesar 44,88%.

**Tabel 3.24.**  
**Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun tahun 2024**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Pertumbuhan	Kontribusi
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024</b>	<b>403.112.004.485,00</b>	<b>372.206.420.339,97</b>	<b>92,33</b>	<b>-11,36</b>	<b>28,27</b>
a	Pajak Daerah	256.592.615.992,00	271.348.014.857,95	105,75	-13,79	72,90
b	Retribusi Daerah	99.465.071.779,00	94.116.020.876,04	94,62	1482,42	25,29
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.997.964.933,00	3.086.978.412,00	77,21	25,26	0,83
d	Lain-Lain PAD yang Sah	43.056.351.781,00	3.655.406.193,98	8,49	-95,7	0,98

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karimun, 2025*

2.Selain dari sub sektor pajak daerah yang tidak tercapai target, ada beberapa sub sektor dari penerimaan PAD yang tidak memenuhi target, antara lain (1). Retribusi Daerah (94,62%); (2). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

(77,21%); dan (3). Lain-lain PAD yang Sah (8,49%). Namun demikian pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar - **11,36%** dari tahun sebelumnya yaitu **6,11%** di Tahun 2023, pada tabel 3.22 berikut ini :

**Tabel 3.25**  
**Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kab.Karimun tahun 2019 – 2024**

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)	KONTRIBUSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2019	396,528,307,168.00	356,972,035,839.26	90.02	2.28	28,04

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)	KONTRIBUSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
	Pajak Daerah	269,679,847,832.00	276,466,420,201.50	102.52	-1.79	77.45
	Retribusi Daerah	9,667,227,000.00	3,264,829,359.11	33.77	14.35	0.91
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,647,013,307.00	2,476,539,075.00	43.86	-17.96	0.69
	Lain-Lain PAD yang Sah	111,534,219,029.00	74,764,247,203.65	67.03	21.29	20.94
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2020</b>	<b>322.820.506.989,00</b>	<b>295.338.951.081,08</b>	<b>91,49</b>	<b>-17,27</b>	<b>24,12</b>
	Pajak Daerah	205.062.000.000,00	204.227.095.857,00	99,59	-26,13	69,15
	Retribusi Daerah	6.953.983.000,00	3.303.073.190,46	47,50	1,17	1,12
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.117.400.651,00	2.331.237.817,79	45,56	-5,87	0,79
	Lain-Lain PAD yang Sah	105.687.123.338,00	85.477.544.215,83	80,88	14,33	28,94
<b>3.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2021</b>	<b>386.623.101.742,00</b>	<b>454.382.443.324,35</b>	<b>117,53</b>	<b>53,85</b>	<b>34,56</b>
	Pajak Daerah	285.322.225.000,00	304.683.602.199,50	106,79	49,19	67,05
	Retribusi Daerah	2.562.208.000,00	3.159.098.996,01	123,30	-4,36	0,70
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.219.492.803,00	1.832.028.997,00	82,54	-21,41	0,40
	Lain-Lain PAD yang Sah	96.519.175.939,00	144.707.713.131,84	149,93	69,29	31,85
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2022</b>	<b>369.697.001.907,00</b>	<b>384.483.331.941,10</b>	<b>104,00</b>	<b>-15,38</b>	<b>29,47</b>
	Pajak Daerah	283.010.686.514,00	296.491.087.858,00	104,76	-2,69	77,11
	Retribusi Daerah	3.695.388.500,00	4.101.098.569,80	110,98	29,82	1,07
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.574.068.491,00	2.524.976.119,00	98,09	37,82	0,66
	Lain-Lain PAD yang Sah	80.416.858.402,00	81.366.169.394,30	101,18	-43,77	21,16
<b>5.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2023</b>	<b>496.530.233.850,00</b>	<b>407.956.397.694,88</b>	<b>82,19</b>	<b>6,11</b>	<b>30,26</b>
	Pajak Daerah	294.827.500.000,00	314.758.951.315,00	106,76	6,16	77,16
	Retribusi Daerah	10.066.344.000,00	5.947.596.489,90	59,08	45,02	1,46
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.739.835.254,00	2.464.387.949,00	89,95	-2,40	0,60
	Lain-Lain PAD yang Sah	188.896.554.596,00	84.785.461.940,98	44,97	4,39	20,81
<b>6.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024</b>	<b>403.112.004.485,00</b>	<b>372.206420.339,97</b>	<b>92,33</b>	<b>-11,36</b>	<b>28,27</b>
	Pajak Daerah	256.592.615.992,00	271.348.014.857,95	105,75	-13,79	72,90
	Retribusi Daerah	99.465.071.779,00	94.116.020.876,04	94,62	1482,42	25,29
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.086.978.412,00	3.086.978.412,00	77,21	25,26	0,83
	Lain-Lain PAD yang Sah	43.056.351.781,00	3.655.406.193,98	8,49	-95,7	0,98

**Sumber :** Badan Pendapatan Daerah Kab. Karimun, 2025

Tabel di atas dapat disampaikan pada tahun 2019, 2020 dan 2023 kondisi realisasi PAD tidak maksimal, dimana realisasi tiga komponen pembentuk PAD yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah masih berada jauh dibawah target, hal ini menyebabkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah turun dibandingkan

dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022.

Tahun 2024 kontribusi PAD mengalami penurunan menjadi **28,27%** ini disebabkan adanya penurunan dari penerimaan pajak daerah sebesar **105.75%**. Peningkatan yang signifikan terdapat pada sub sektor pajak baru yaitu penerimaan pajak retribusi, dimana

capaiannya mencapai **1.482,80%**. Namun demikian pajak tersebut tidak berpengaruh terlalu besar dikarenakan kontribusi pajak tersebut terhadap PAD hanya sebesar **0,01%**. Sedangkan untuk kontribusi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2024 sebesar **25,29%**, walaupun adanya peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, ada beberapa penerimaan dari sektor retribusi yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, disebabkan antara lain :

- a. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terhitung bulan April tahun 2024 tidak menarik lagi jasa untuk retribusi persampahan dan tidak bertanggung jawab atas pungutan yang terjadi khususnya dilingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Hal ini dikarenakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menarik jasa retribusi persampahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Retribusi perizinan tertentu khususnya perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA), kontrak tenaga kerja asing khususnya yang ada di PT. SAIPEM rata-rata antara 6-9 bulan, sehingga terdapat selisih perhitungan penetapan target yang semula 12 bulan menjadi rata-rata 6-9 bulan.

Untuk sub sektor Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan kontribusi sebesar **0,83%**, realisasi capaian tidak memenuhi target yang ditetapkan hal ini dikarenakan BPR Karimun dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bumi Berazam belum melakukan setoran dividen (bagi hasil) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Selain dari sub sektor diatas, ada sub sektor lainnya yaitu Lain-Lain PAD yang Sah dimana kontribusinya lumayan besar yaitu **0,98%**, tapi realisasi capaian tidak memenuhi target dan hal itu cukup signifikan hanya terealisasi sebesar **8,49%**. Realisasi capaian yang hanya sebesar **8,49%** dipengaruhi oleh :

- a. Realisasi capaian dari penerimaan komisi, potongan atau bentuk lainnya yang seharusnya terealisasi lebih kurang sebesar Rp. 43.056.351.781,00 sesuai target, kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp. 3.655.406.193,98 atau sebesar 8,49%. Hal ini dikarenakan diawal tahun pemerintah daerah menetapkan target penerimaan dari sektor tersebut berupa pengelolaan hasil sedimentasi dilaut, dimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah melakukan peninjauan langsung kelokasi. Namun seiring berjalannya waktu belum bisa dioptimalisasikan realisasinya mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan belum jelas dan belum juga diterbitkan oleh pemerintah

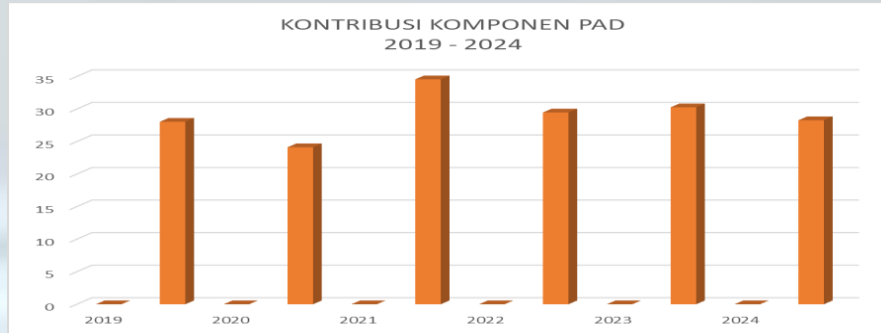
pusat.

1.861.542.947,87 dari Rp.

- b. Realisasi capaian dari penerimaan komisi,  
Potongan atau bentuk lainnya sebesar Rp.

41.339.455.122,00 atau lebih kurang  
capaiannya sebesar 4,50%.

**Grafik 3.2**  
**Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun Tahun 2019 – 2024**



**Sumber :** Badan Pendapatan Daerah Kab. Karimun, 2025

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. *Memperluas basis penerimaan;*

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. *Memperkuat proses pemungutan;*

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu dengan mempercepat

penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif khususnya pada tarif retribusi.

3. *Meningkatkan pengawasan;*

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba dan atau secara berkala, memperbaiki proses pengawasan.

4. *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik;*

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder/* instansi terkait di daerah.

5. *Meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi;*

Perlu ditumbuhkan rasa kesadaran bahkan kebanggaan wajib pajak/wajib retribusi dal hal membayar pajak daerah/retribusi daerah adalah dengan turut andil mereka dalam membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah :

- a) Melalui pendekatan persuasif dan partisipatif;
- b) Melakukan penyuluhan pajak daerah dan retribusi

daerah.

6. *Meningkatkan pelayanan prima;*

Dalam hal ini dapat diambil *sample* pembayaran pajak melalui *online* serta menciptakan inovasi-inovasi baru tentang akselerasi peningkatan penerimaan daerah khususnya pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Karimun tahun 2024 terdiri dari (a). Pendapatan Asli Daerah (PAD); (b). Pendapatan Transfer; dan (c). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun target, realisasi, persentase capaian dan kontribusi setiap sektor penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Karimun tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26.

Capaian Target, Realisasidan Kontribusi Sektor Penerimaan Pendapatan Daerah KabupatenKarimun Tahun 2024

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	KONTRIBUSI %
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>403.112.004.485,00</b>	<b>341.870.142.537,47</b>	<b>92.33</b>	<b>30.27</b>
1	PAJAK DAERAH	256.592.615.992,00	271.348.014.857,95	105.75	72.90
2	RETRIBUSI DAERAH	99.465.071.779,00	94.116.020.876,04	94.62	25.29
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.997.964.933,00	3.086.978.412,00	77.21	0.83
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	43.056.351.781,00	3.655.406.193,98	8.49	0.98
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.010.119.539.304,00</b>	<b>944.578.480.597,00</b>	<b>93.51</b>	<b>71.73</b>
1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	899.465.312.999,00	867.764.067.421,00	96.48	91.87
1.a	DANA PERIMBANGAN	840.547.495.999,00	787.833.824.796,00	91.97	93.06
	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL (DBH)	154.901.045.999,00	153.600.402.410,00	99.16	19.02
	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM (DAU)	465.680.463.000,00	445.953.309.736,00	95.76	55.22
	DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	87.307.874.000,00	83.656.032.600,00	95.82	10.36
	DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	132.658.113.000,00	124.335.861.675,00	93.73	15.40
2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	110.654.226.305,00	76.814.413.176,00	69.42	8.13
2.a	PENDAPATAN BAGI HASIL	108.896.726.305,00	76.814.413.176,00	70.54	100
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0
b	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0	0
*	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	0	0	0
<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>1.413.231.543.789,00</b>	<b>1.316.784.900.936,97</b>	<b>93.18</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karimun, 2025

Untuk formulasi dalam perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Penerimaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Berdasarkan formulasi diatas didapat besaran kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah sebesar:

$$x \frac{341.870.142.537,47}{1.316.784.900.936,97} \times 100 = 25,96$$

Maka capaian indikator sasaran berupa persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dimana target yang ditetapkan sebesar 30,30% terealisasi menjadi 28,27% dengan capaian sebesar 93,30%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.23 diatas.

Sedangkan asumsi penetapan target persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2024 dengan target sebesar 37,84% didapat berdasarkan hasil proyeksi target anggaran PAD dengan target anggaran pendapatan daerah tahun 2024 Kabupaten Karimun.

Setelah dilakukan analisis dan dievaluasi/reviu capaian kinerja dengan kondisi permasalahan yang ada, maka didapat alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada pendapatan pajak daerah dan retribusi

daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**1. Memperkuat regulasi;**

Memperbaiki regulasi tentang perpajakan dan mengatur ulang sistem adminitrasi serta menciptakan inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan pendapatan / penerimaan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**2. Memperluas basis penerimaan;**

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

3. **Memperkuat proses pemungutan;**

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif khususnya pada tarif retribusi.

4. **Meningkatkan pengawasan;**

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba dan atau secara berkala, memperbaiki proses pengawasan.

5. **Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik;**

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder/* instansi terkait di daerah.

6. **Meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi;**

Perlu ditumbuhkan rasa kesadaran bahkan kebanggaan wajib pajak/wajib retribusi dal hal membayar pajak daerah/retribusi daerah adalah dengan turut andil mereka dalam membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah :

- a. Melalui pendekatan persuasif dan partisipatif;
- b. Melakukan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah.

7. **Meningkatkan pelayanan prima;**

Dalam hal ini dapat diambil *sample* pembayaran pajak melalui *online* serta menciptakan inovasi-inovasi baru tentang akselerasi peningkatan penerimaan daerah khususnya pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat di lihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya secara detil pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.27.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi %	Anggaran yang dikeluarkan	Realisasi PAD	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
2024			-11,36	Rp. 22.761.574.545,00	Rp. 341.870.142.537,47	6,66
2023			6,11	Rp. 24.394.981.988,00	Rp. 408.109.845.853,54	5,98
2022	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-15,38	Rp. 23.356.159.529,00	Rp. 384.483.331.941,10	6,07
2021			53,85	Rp. 22.191.651.001,00	Rp. 454.382.443.324,35	4,88
2020			-17,27	Rp. 20.939.780.350,00	Rp. 295.338.951.081,08	7,09
2019			2,28	Rp. 25.837.936.719,00	Rp. 356.972.035.839,26	7,23

$$TE = \frac{\text{Anggaran yang dikeluarkan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

Dengan Kriteria :

- a. Sangat efisien : <10,00%
- b. Efisien : 10,00%-20,00%
- c. Cukup efisien : 21,00%-30,00%

Berdasarkan tabel 3.24 diatas, dapat dilihat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sepanjang tahun anggaran 2019 telah melaksanakan program/kegiatan/ sub

kegiatan dengan sangat efisien terlihat dari hasil tingkat efisiensi belanja terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dibawah **10,00%**.

3.2.4. Sasaran Strategi Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata

Sistem Pengolahan Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu indikator dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka akan meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perencanaan penyediaan sarana dan prasana air minum sangat penting dalam

meningkatkan perekonomian wilayah.

Penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dimaksudkan untuk menciptakan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas khususnya dalam rangka pencapaian sasaran dan target penyediaan air minum baik dalam konteks universal akses, nasional, maupun daerah. Di samping itu, penyelenggaraan dan pengembangan SPAM ini juga dilaksanakan dalam upaya pengendalian pelaksanaan untuk mewujudkan standar pelayanan minimal. Selain itu, berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, prinsip penyelenggaraan SPAM haruslah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu permasalahan yang terjadi di kabupaten Karimun mengenai sistem penyediaan air minum yaitu ketersediaan air baku yang tidak merata di setiap

Perdesaan/Perkotaan. Terdapat daerah yang memiliki banyak ketersediaan air baku dan sebaliknya terdapat daerah yang kekurangan ketersediaan air baku dikarenakan sulitnya menemukan titik air bersih. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta dalam pemanfaatan potensi air baku secara bersama-sama sekaligus membantu daerah Perdesaan dan Perkotaan yang memiliki keterbatasan air baku.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun melaksanakan Program Sistem Pengembangan dan Penyediaan SPAM di wilayah Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Karimun. Adapun Indikator dan Target yang harus dicapai saranya demi terwujudnya Kebutuhan dasar Masyarakat yang merata.

Berikut Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun

Tabel 3.28

Persentase KK yang terlayani Infrastruktur Dasar di Kabupaten karimun Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio KK yang Terlayani Insfrastruktur Dasar	37,28%	41,57%	111,51%
	<b>Total</b>			<b>111,51%</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karimun, 2025

**Target dan realisasi indikator yang digunakan (\*\*\*) dikarenakan target yang ditetapkan di dalam PK Bupati dibawah realisasi target tahun sebelumnya yaitu 37,28**

Berdasarkan dari tabel di atas tingkat capaian untuk sasaran ini adalah sebesar 111,51% hal tersebut baik dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator ini mengalami peningkatan yang cukup baik. Sebagaimana telah dituangkan dalam INPRES tahun 2010 dan tahun 2011, ketentuan tersebut mengatur tentang tindakan “Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku” dengan sasaran “meningkatnya kapasitas dan layanan air baku untuk penyediaan air minum”. Bidang Sumber Daya Air selaku Penyedia Air Baku bertanggung jawab di bagian hulu dan Bidang Cipta Karya di bagian hilir selaku Pembina Unit Usaha Air Bersih (UUAB) yang bertanggung jawab dalam pendistribusi air minum kepada masyarakat, sehingga tercipta program yang terpadu, saling menunjang dan tepat

sasaran. Indikator ini diukur melalui Perbandingan Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Air Bersih indikator Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih tercatat pada Tahun 2024 sebesar 90,11% dan diasumsikan sebanyak 99.963 KK dari jumlah KK sebanyak 66.544 KK. Sedangkan Realisasi taget OPD tahun 2023 Sebesar 90,29 % dan asusmsikan sebanyak 59,963 KK dari Jumlah KK sebanyak 66,410. Dibandingkan dengan tahun 2022 Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air dan Bersih mengalami Peningkatan Sebesar 93.46 % dari realisasi pada tahun 2022 sebesar 59,219 KK, dari jumlah KK yang ditargetkan sebesar 63,364 KK, sehingga dapat disimpulkan Peningkatan jaringan SPAM pada tahun 2024 Mengalami penurunan sebanyak 90,11% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.29

Persentase Penduduk Beraksis Air Bersih

TAHUN	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
2024	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	66.544	59.963	6.581	90,11
2023	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	66.410	59.963	6.447	90,29
2022	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	63.364	59.219	4.415	93,46

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karimun, 2025

Dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah membuat sumur gali, sumur bor, air bersih tenaga surya, dan dengan menjadi pelanggan pada PDAM maupun swasta. Pembangunan penyediaan sarana air bersih ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat akan air bersih, yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang ablevel tinggi. Air tanah sudah mulai tercemar, khususnya di tempat-tempat yang padat penduduk, sementara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Karimun belum dapat diandalkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah merencanakan strategis kebijakan tingkat tinggi, yang dapat menempatkan persoalan air bersih pada prioritas penanganan di daerah. Para anggota DPRD dan LSM juga melakukan

langkah-langkah konstruktif, menempuh upaya-upaya politik tertentu agar pimpinan wilayah di daerah lebih serius menangani air bersih. Dukungan seperti ini diharapkan akan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi PDAM untuk dapat melaksanakan percepatan pelayanan air bersih bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan, khususnya daerah rawan air bersih perkotaan dan perdesaan. Terlayannya air bersih bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan akan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun upaya yang telah dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada melalui program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30.

Kinerja Keuangan dalam Mencapai Sasaran Strategi Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata Kabupaten Karimun Tahun 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KINERJA KEUANGAN		
			REALISASI	SILPA	%
1	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.101.723.974	1.042.069.274	59.654.700	94.58
JUMLAH		1.101.723.974	1.042.069.274	59.654.700	94.58

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karimun, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran pada program dan kegiatan diatas masih atau tergolong cukup rendah dari pagu anggaran yang ada. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan Dana Transfer Keuangan Ke Daerah (Dana TKKD) baik dari pusat maupun provinsi dan Pencapaian

Pendapatan yang tidak sesuai dengan target, sehingga ada beberapa program dan kegiatan harus dilakukan tunda bayar ke tahun berikutnya. Dari penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya anggaran.

### 3.2.5. Sasaran Strategi Terwujudnya Prasarana Penghubung Yang Optimal

Kabupaten Karimun adalah daerah yang memiliki banyak pulau. hal ini menyebabkan akses untuk menuju ke suatu tempat membutuhkan waktu dan biaya. Membangun jalan, jembatan dan transportasi laut dan darat yang mampu menghubungkan antar daerah pemukiman penduduk di masing-masing daerah Kecamatan yang masih terisolir merupakan suatu langkah yang strategis untuk memudahkan masyarakat menuju ke suatu tempat sehingga Pemerintah Kabupaten Karimun membuat sasaran Terwujudnya

Prasarana penghubung yang optimal mejadi sasaran ke-4 pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024.

Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran ke-4 ditentukan oleh 3 indikator yaitu Indikator Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, Indikator Rasio konektivitas angkutan Laut, Indikator Rasio konektivitas angkutan darat. Adapun realisasi dan capaian dari tiga indikator sasaran ke-5 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.31**  
**Capaian Masing-Masing Indikator Sasaran Terwujudnya Prasarana Penghubung Yang Optimal Tahun 2024**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	68,19%	39,75	58,29%
2.	Rasio konektivitas angkutan Laut	0,66	0,54	82,60%
3.	Rasio konektivitas angkutan Darat	0,87	0,87	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Karimun : Tahun 2025

Pencapaian sasaran selanjutnya didukung dengan indikator *Rasio konektivitas angkutan laut*. Kabupaten karimun memiliki 54 Pulau berpenghuni, dari 54 pulau berpenghuni yang didata ada 35 pulau yang memerlukan transportasi laut regular dengan tujuan dari pulau tersebut ke ibu kota kecamatan ataupun ibu kota kabupaten. Target di tahun 2024 sebesar 0,66 yaitu 23 trayek akan terlayani oleh transportasi laut regular, sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,54 yaitu baru sebesar 19 trayek atau pulau berpenghuni yang telah terjangkau transportasi laut regular, ketidak berhasilan pencapaian dari indikator ini adalah karena tidak bertambahnya

trayek pulau-pulau berpenghuni yang terlayani oleh transportasi laut regular, ditahun tidak tercapai target pada indikator ini penyebabnya adalah :

- Keterbatasan Pembiayaan:** Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mengembangkan infrastruktur transportasi laut, sehingga sulit untuk menambahkan trayek baru;
- Tantangan Teknis dan Operasional:** Pengembangan trayek angkutan laut memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti cuaca, kondisi laut, dan ketersediaan infrastruktur pendukung;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terampil:** Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengoperasikan angkutan laut juga

dapat menjadi faktor penghambat;

#### 4. Faktor Keamanan dan Keselamatan:

Pengembangan trayek angkutan laut juga harus mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan, termasuk pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; Dengan memahami penyebab-penyebab tersebut, pemerintah dan stakeholders

dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas serta kuantitas trayek angkutan laut.

Berikut proporsi panjang jalan beraspal berdasarkan kondisi di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel 3.29 dibawah ini :

**Tabel 3.32**  
**Proporsi Panjang Jalan Beraspal berdasarkan kondisi di Kabupaten Karimun**

KECAMATAN	WILAYAH PENANGANAN JALAN (DALAM KILOMETER)			
	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN	JUMLAH
1	2	3	4	5=(2+3+4)
Kecamatan Karimun	3,24	20,64	40,17	64,05
Kecamatan Meral	13,37	0,00	59,50	72,87
Kecamatan Tebing	0,00	3,99	57,88	61,87
Kecamatan Kundur	0,00	15,38	89,40	104,78
Kecamatan Moro	0,00	0,00	28,86	28,86
Kecamatan Durai	0,00	0,00	29,17	29,17
Kecamatan Buru	0,00	0,00	64,94	64,94
Kecamatan Kundur Utara	0,00	37,20	85,75	122,95
Kecamatan Kundur Barat	0,00	0,00	84,67	84,67
Kecamatan Meral Barat	9,26	0,00	31,12	40,38
Kecamatan Belat	0,00	0,00	27,55	27,55
Kecamatan Ungar	0,00	0,00	21,15	21,15
Kecamatan Sugie Besar	0,00	0,00	49,47	49,47
Kecamatan Selat Gelam	0,00	2,50	15,81	18,31
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>25,87</b>	<b>79,71</b>	<b>685,44</b>	<b>791,02</b>

**Sumber :** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karimun, 2025

Dari tabel 3.29 diatas dapat dilihat bahwa Panjang Jalan Nasional 25,87 KM dengan kondisi baik 25.87, Panjang Jalan Provinsi yang beraspal 79,71 dengan kondisi dengan baik 61,26, kondisi sedang 5.48, kondisi rusak 4.45, dan kondisi rusak berat 8.52. Panjang jalan beraspal untuk jalan Kabupaten 685.437 dengan kondisi baik 272.44, kondisi sedang 162.85, kondisi rusak ringan 31.66 dan kondisi rusak berat 218.49.

Sampai dengan tahun 2023 terdapat tantangan berupa menurunnya kualitas pelayanan jalan kabupaten, provinsi dan nasional di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan.

Berbagai tantangan lain yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten

meliputi :

1. Meningkatnya muatan dan dimensi berlebih.
2. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat produksi ke pemasaran, termasuk masih banyaknya daerah yang terisolasi.
3. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor menyebabkan alokasi yang semula untuk pemeliharaan jalan

berubah untuk penanganan tanggap darurat.

Mewujudkan keseimbangan dan keterkaitan pembangunan- dan pengembangan wilayah (termasuk daerah terisolasi, daerah perbatasan, pulau- pulau kecil) dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

**Tabel 3.33**  
**Pulau-Pulau Berpenduduk Yang Terlayani Trayek/Transportasi laut Reguler**  
**Tahun 2020 s.d 2024**

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA PULAU BERPENDUKUNG PERLU DIJANGKAU TRAYEK TRANSPORTASI LAUT REGULER		Trayek angkutan laut reguler				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Tebing	Pongkar	1	Tokonghiu Kecil	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
2	Karimun		2	Kenipan	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			3	Karimun Anak	Ada	Ada	Ada	Ada	Tdk ada
3	Selat Gelam	Parit	4	Parit	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			5	Tulang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buru		6	Buru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			7	Pulau Papan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Belat	Sebele	8	Belat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			9	Degong	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			10	Seraya	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			11	Panjang	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			12	Junge	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			13	Pelangkat	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
			14	Serenteng	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA PULAU BERPENGHUNI PERLU DIJANGKAU TRAYEK TRANSPORTASI LAUT REGULER		Trayek angkutan laut reguler				
					2020	2021	2022	2023	2024
5	Kundur Barat		15	Lalang	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada
7	Kundur		16	Kundur	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Ungar		17	Ungar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			18	Mandah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			19	Ngal	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada
			20	Propos	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Tdk ada	Ada
7	Durai		21	Durai	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			22	Akat	Ada sekarang sudah mulai lancar	Ada	Ada	Ada	Ada
			23	Semembang	Ada sekarang sudah mulai lancar	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Moro		24	Moro Darat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			25	Moro Tengah	Belum lancar setiap hari	Ada	Ada	Ada	Ada
			26	Pauh	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	Ada
			27	Jang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			28	Citlim	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			29	Pisang	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			30	Combol	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			31	Bahan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			32	Muraibatu	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			33	Pasai	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
			34	Keban	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari	Belum lancar setiap hari
9	Sugi Besar		35	Sugi Besar	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada
	Jumlah				13	14	14	14	19
	Jumlah Pulau yang memerlukan transportasi laut reguler								35

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Indikator ketiga yang mendukung dari sasaran ini adalah **Rasio konektifitas angkutan darat**. Target di tahun 2024 sebesar 0,87 atau setara dengan 13 trayek angkutan darat yang merupakan indikator penunjang sasaran di atas. Tahun 2024 Kabupaten Karimun bertambah 1 trayek. Dengan bertambahnya 1 trayek Kabupaten Karimun memiliki 13 trayek angkutan darat di tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 0,87 atau 13 trayek angkutan darat. Jadi di tahun 2024 target yang dicapai sebesar 100%. Tercapainya pencapaian dari indikator ini adalah karena bertambahnya trayek angkutan darat yaitu :

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat dapat meningkatkan permintaan akan transportasi darat, sehingga memicu

penambahan trayek angkutan darat.

2. **Investasi Infrastruktur :** Investasi dalam infrastruktur transportasi darat, seperti pembangunan jalan tol dan terminal bus, dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas angkutan darat, sehingga memungkinkan penambahan trayek.
3. **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan transportasi darat, seperti peningkatan investasi infrastruktur dan pengaturan lalu lintas, dapat memicu penambahan trayek angkutan darat.
4. **Peran Serta Masyarakat:** Peran serta masyarakat dalam menggunakan transportasi darat yang lebih efisien dan ramah lingkungan dapat meningkatkan permintaan akan angkutan darat dan memicu penambahan trayek

**Tabel 3.34**  
**Tabel Data Trayek Angkutan Umum Perkotaan dan Kabupaten**

No	Item	Jumlah
1.	Trayek Yang Tersedia/Kendaraan	12 Trayek
		1) Trayek Balai- Tebing : 33 Kendaraan
		2) Trayek Balai - Meral : 174 Kendaraan
		3) Trayek Balai - Kapling : 26 Kendaraan

No	Item	Jumlah
		4) Trayek Meral - Pangke : 30 Kendaraan
		: 5) Trayek Tg. Batu - Tg. Berlian 109 Kendaraan
		6) Trayek Tg. Batu - Selat Beliah : 86 Kendaraan
		7) Trayek Meral - Pasir Panjang : 3 Kendaraan
		8) Trayek Desa Pongkar – Tebing : 1 Kendaraan
		9) Trayek Desa Pangke – Meral Barat : 1 Kendaraan
		10) Trayek Pulau Parit : 1 Kendaraan
		11) Trayek Desa Jang Kecamatan Moro : 1 Kendaraan
		12) Trayek Desa Sebele Kecamatan Belat : 1 Kendaraan
		<b>Jumlah 464 Kendaraan</b>
2.	Trayek baru	Trayek Desa Penarah Kecamatan Belat 1 Trayek
3.	Total	13 Trayek
4.	Total Kebutuhan Trayek Angkutan Darat	15 Trayek

Rumus Rasio Konektivitas Angkutan Darat dan Konektivitas Angkutan Laut :

Rasio Konektivitas Angkutan Darat

Target = 0,80

=  $\frac{\text{Jumlah Izin Trayek Angkutan Darat yang diterbitkan ( 13 ) x Bobot Tra ( 1 )}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Angkutan Darat ( 15 )}}$

=  $\frac{13 \times 1}{15}$

= 0,87

Realisasi = 0,87

=  $\frac{0,87 \times 100\%}{0,87}$

= 100%

Data trayek angkutan darat yang sudah diterbitkan berjumlah 13 trayek.

Target Rasio Konektivitas Angkutan Laut = 0,66

=  $\frac{\text{Jumlah Izin Trayek Angkutan Laut yang diterbitkan ( 23 ) x Bobot Trayek ( 1 )}{\text{Jumlah Izin Trayek Angkutan Laut yang Dibutuhkan ( 35 )}}$

=  $\frac{23 \times 1}{35}$

= 0,66

Realisasi = 0,54

=  $\frac{0,54 \times 100\%}{0,54}$

0,66  
= 82,6%

Data trayek angkutan laut yang sudah diterbitkan berjumlah 19 trayek. Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun sudah berusaha untuk membuka konektivitas antar pulau dengan mengusulkan trayek kapal perintis yang dapat membuka akses pengangkutan barang dan penumpang dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau melalui Dana APBN dengan memanfaatkan Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara dan Kapal Rede Transport KM. Gandha Nusantara 07 dan KM. Gandha Nusantara 08 yang melayani Kapal PELNI KM. Kelud karena masih memiliki rentang waktu yang dapat digunakan untuk dialihkan melayani masyarakat pulau-pulau terdekat dengan Pulau Karimun. Trayek kapal perintis KM. SABUK NUSANTARA 48 dari Tanjungpinang-Tanjung Balai Karimun-Moro-Jagoh-Pulau Pekajang-Belinyu-Pulau Pekajang-Jagoh-Tanjungpinang-Tambelan-Midai-Selat Lampa-Serasan-Sintete-Tambelan-Batam-Tanjungpinang oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sehingga terbuka akses Pulau Karimun dan Moro yang dapat

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan masuknya barang-barang kebutuhan pokok menjadi lebih murah apabila dibandingkan dengan mengangkut menggunakan kapal kayu.

Kemudian untuk membuka konektivitas antar desa di Kecamatan Dinas Perhubungan juga sudah mengusulkan Transportasi Darat Mikro Bus melalui DAK untuk memperkuat akses transportasi antar Desa yang diserahkan melalui Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan di pulau Karimun sendiri sudah diusulkan Trayek Bus Damri dan Trans Karimun untuk menambah sarana transportasi dari Kota Karimun ke Desa-Desa di Kecamatan yang belum memiliki akses transportasi darat.

Untuk wilayah pulau yang terdekat juga sudah diusulkan Pembangunan Bus Air Ro-ro melalui DAK dengan trayek Pelabuhan Penyeberangan Parit Rempak Meral tujuan Pulau Parit untuk mengangkut penumpang, barang dan kendaraan bermotor. Karena selama ini hanya dilayani Speed Boat Pancung yang berbahan kayu untuk mengangkut

penumpang dan barang yang masih belum memenuhi aspek keselamatan berlayar.

Ke depan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun akan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti Bus Air Ro-ro yang akan ditambah trayeknya sehingga dapat membuka akses baru pulau-pulau terdekat dan terpencil yang memerlukan transportasi laut.

Untuk transportasi udara Dinas Perhubungan Kabupaten juga sudah berupaya bersama Kantor Unit Penyelenggara Bandara Raja Haji Abdullah Sei Bati untuk menambah landasan pacu ( Run Way ) sehingga bisa dilayani oleh pesawat berkapasitas besar selain pesawat perintis Susi Air dengan berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pembebasan kawasan hutan lindung yang berada diujung lokasi Bandara.

Dibandingkan dengan Kota Batam dan Tanjungpinang akses transportasi Kabupaten Karimun masih

dibawah sehingga dibutuhkan kerjasama yang kuat antara Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Swasta untuk mendukung terwujudnya pelayanan transportasi laut yang memadai. Kabupaten Karimun sangat terbantu dengan akses Kapal Penyeberangan Ro-ro yang sudah beroperasi selama ini dengan trayek antar Kabupaten dan antar Provinsi antara lain :

- a. Karimun-Tanjungpinang;
- b. Karimun-Batam;
- c. Karimun-Bengkalis; dan

trayek dalam Kabupaten yaitu : Karimun-Selat Beliah yang beroperasi 2 kali dalam seminggu. Serta Kapal Pelni KM. kelud yang rutin 2 kali seminggu melayani masyarakat yang hendak berangkat atau pulang dengan trayek dari Jakarta-Batam-Karimun-Medan.

Adapun upaya yang telah dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada melalui program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

Tabel 3.35

Tabel Dukungan Anggaran Sasaran “Terwujudnya Prasarana Penghubung Yang Optimal” Tahun 2024

No	Program /Kegiatan	Kinerja Keuangan			
		Anggaran	Realisasi	SILPA	%
I	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	92.928.544.069,98	83.014.402.338	9.914.141.732	89,33%
II	Pengelolaan Pelayaran	25.479.670.000	23.897.551.000	1.582.119.000	93,79%
III	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.879.443.600	908.153.320	971.290.280	48.32 %
<b>JUMLAH</b>		<b>120.287.657.670</b>	<b>107.820.106.658</b>	<b>12.467.551.012</b>	<b>183,12 %</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Karimun : Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran pada program dan kegiatan diatas masih atau tergolong cukup rendah dari pagu anggaran yang ada. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan DanaTransfer Keuangan Ke Daerah (Dana TKKD) baik dari pusat maupun provinsi dan Pencapaian Pendapatan

yang tidak sesuai dengan target, sehingga ada beberapa program dan kegiatan harus dilakukan tunda bayar ke tahun berikutnya. Dari penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya manusia dan anggaran.

abel 3.36

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung Indikator Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan Darat antara lain :

Tahun	Program	Sub Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Pengelolaan Pelayaran	1. Pembangunan Pelabuhan	Rp. 2.083.740.425,-	Rp. 761.316.410,-	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	Tahun 2023 penyerapan anggaran sebesar Rp.

Tahun	Program	Sub Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2023		Pengumpan Lokal							26.048.520.775,- ,  sedangkan tahun 2024 penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.634.743.820,- lebih kecil dari tahun 2023
		2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp. 14.572.906.565,-	Rp. 14.122.756.877,-	5 Unit	5 Unit	100 %	98,98 %	
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 11.422.913.546,-	Rp. 11.164.447.488,-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	97,74 %	
2024	Pengelolaan Pelayaran	1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp. 2.354.760.100,-	Rp. 1.487.341.145,-	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	
		2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp. 22.977.992.900,-	Rp. 22.343.609.355,-	5 Unit	5 Unit	100 %	98,98 %	
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah	Rp. 907.178.000,-	Rp. 803.793.320,-	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	

Tahun	Program	Sub Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Kabupaten/ Kota							

**i. Sasaran Strategi Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Derajat Kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup disuatu wilayah. Pada RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Indikator sasaran ini merupakan dukungan misi ke 3 (tiga) Kabupaten Karimun yaitu “Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa”.

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.37**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	72.05	72.20	100.20
<b>Tingkat Capaian</b>				<b>100,20 %</b>

Dari tabel diatas diketahui bahwa rata-rata tingkat capaian sasaran sebesar **100.20%** yang bermakna bahwa indikator tersebut menunjang tercapainya misi Pemerintah Kabupaten Karimun.

Selengkapnya nilai capaian sasaran indikator pada sasaran enam sesuai hasil pengukuran kinerja diuraikan sebagai berikut :

**1. Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup didefinisikan

sebagai rata-rata tahun hidup yang masih

akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakat atau kata lain dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang akan dijalankan oleh seseorang

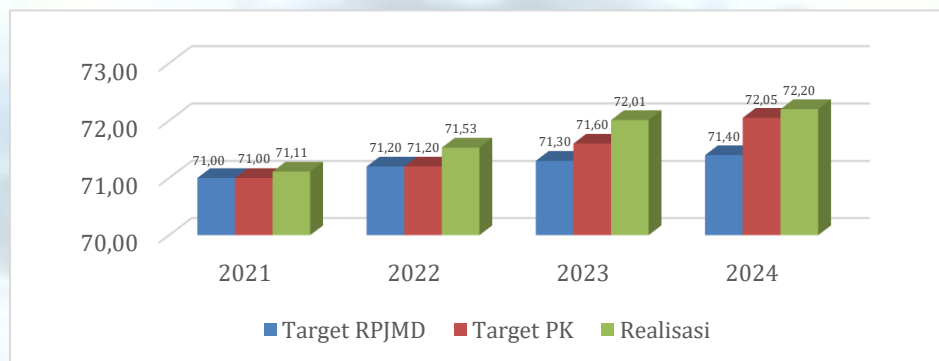
sejak orang tersebut lahir. Data Angka Harapan Hidup di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada urusan kesehatan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Semakin tingginya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Merujuk data BPS Provinsi Kepulauan Riau yang dirilis melalui link <https://kepri.bps.go.id> pada bulan November 2024, Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun tahun 2024 adalah sebesar 72,20 tahun melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,05 tahun dengan capaian kinerja sebesar 100.20% dengan kategori tercapai dan kriteria **Sangat Baik**. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2021 s.d 2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.3

Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2024



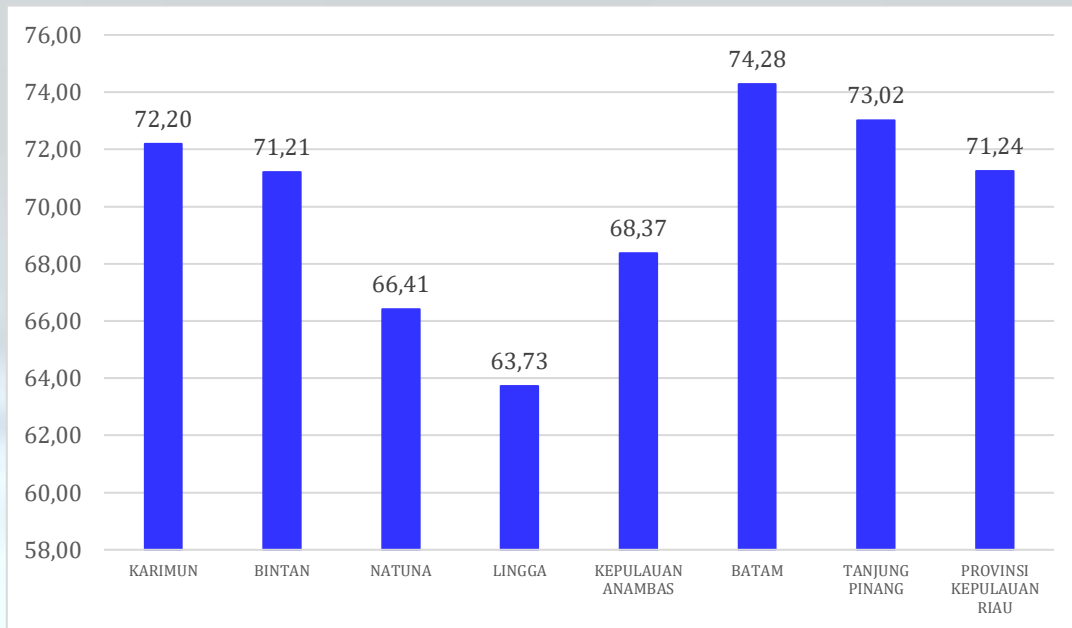
Sumber data: BPS Provinsi Kepulauan Riau, November 2024

Grafik diatas menunjukkan capaian Angka Harapan Hidup selama empat tahun terakhir trendnya meningkat. Pada tahun 2024 capaian angka harapan hidup meningkat 0,19 dibanding dengan tahun 2023 yaitu 72,01 tahun menjadi 72,20 tahun. Capaian ini menggambarkan bahwa

penduduk Kabupaten Karimun rata-rata memiliki harapan hidup sampai dengan usia 72,20 tahun.

Berikut Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun dibanding dengan rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau:

**Grafik 3.4**  
**Angka Harapan Hidup Provinsi Kepri Tahun 2024**



Sumber data: BPS Provinsi Kepulauan Riau, November 2024

Grafik diatas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun tahun 2024 sudah berada diatas Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun menempati urutan ke 3 (tiga) tertinggi setelah Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Selama rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Angka Harapan Hidup Kabupaten Karimun lebih tinggi atau berada diatas rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau.

Angka harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor demografi, sosio-ekonomi, gaya hidup, psikososial dan faktor-faktor kesehatan. Faktor-faktor kesehatan yang pengaruhi

serta berhubungan dengan Angka Harapan Hidup terdiri atas gizi (pola makan), perilaku , menopause, osteoporosis, penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi dan diabetes melitus, penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV AIDS.

Faktor pendorong tercapainya Angka Harapan Hidup dibidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan di tahun 2024 yang ditingkatkan seperti:
  - a. Dilakukannya kunjungan dokter spesialis ke RSUD Tg. Batu Kundur
  - b. Pengadaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) kit dan Posbindu/ Lansia kit untuk Puskesmas dan Posyandu
  - c. Pengadaan obat essensial dan bahan medis habis pakai untuk Puskesmas dan Rumah

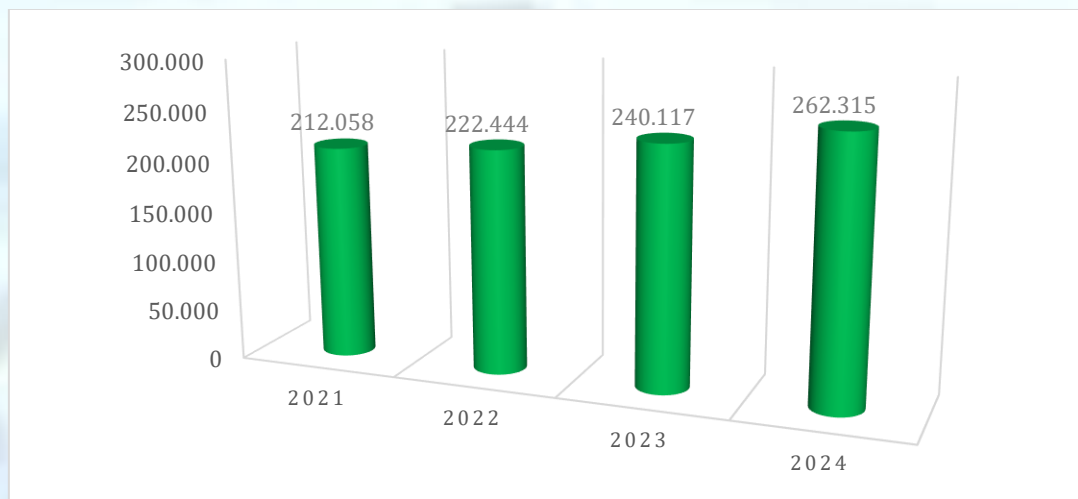
Sakit Umum Daerah

- d. Dilakukannya penilaian akreditasi pada 4 (empat) Puskesmas dengan hasil akreditasi 2 puskesmas lulus Paripurna dan 2 puskesmas lulus Utama
- e. Penilaian akreditasi terhadap RSUD Tanjung Batu Kundur dengan hasil tingkat kelulusan Paripurna
- f. Penilaian akreditasi terhadap RSUD Muhammad Sani dengan hasil tingkat

kelulusan Paripurna

- 2. Meningkatnya masyarakat Kabupaten Karimun yang terlindungi jaminan kesehatannya melalui kepesertaan BPJS. Dibanding dengan tahun 2023 kepesertaan BPJS di Kabupaten Karimun tahun 2024 meningkat sebanyak 22.198 orang yaitu dari 240.117 orang menjadi 262.315 orang atau meningkat 9,24%.

**Grafik 3.5**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Karimun yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Tahun 2021 s.d 2024**



- 3. Menurunnya mortalitas atau angka kematian seperti:
  - a. Meningkatnya angka lahir mati yang dilaporkan yaitu 6,1 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2023 menjadi 6,4 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2024 atau meningkat sebesar 0,3%. secara absolut dapat didefinisikan jumlah lahir mati menurun dari 19 menjadi 18 dengan total kelahiran yang menurun dari 3.113 menjadi 2.782. Angka lahir mati terbesar berada di

Kecamatan Kundur Barat sebanyak 4 jiwa dan terendah atau 0 kematian ada di Kecamatan Ungar dan Kecamatan Moro.

- b. Meningkatnya angka kematian neonatal yang dilaporkan yaitu 7,1 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2023 menjadi 7,2 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2024 atau meningkat sebesar 0,1%. secara absolut dapat didefinisikan kematian neonatal menurun dari 22 menjadi 20 dengan jumlah

lahir hidup yang menurun dari 3.094 menjadi 2.764. Angka kematian neonatal terbesar berada di Kecamatan Kundur Barat yaitu sebanyak 5 jiwa dan terendah atau 0 kematian ada di Kecamatan Karimun, Meral Barat, Buru, Ungar, Belat dan Durai.

- c. Menurunnya angka kematian balita, yaitu dari 12,52 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2023 menjadi 10,13 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 atau menurun sebesar 2,39. Secara absolut dapat didefinisikan dari 39 kematian balita menjadi 28 kematian balita. Angka kematian balita terbesar berada di Kecamatan Kundur Barat yaitu sebanyak 8 jiwa dan terendah atau 0 kematian ada di Kecamatan Buru, Ungar dan Belat.
- d. Menurunnya Case Fatality Rate (CFR) atau angka kematian DBD (Demam Berdarah Dengue) tahun 2024, yaitu dari 0%. Secara absolut dapat didefinisikan 0 kematian akibat DBD.
4. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat di tahun 2022, yaitu 0,17 dari menjadi 0,20. menjadi 0,22. Indeks keluarga sehat (IKS) adalah suatu perhitungan untuk mengetahui apakah sebuah keluarga tersebut termasuk kedalam kategori keluarga sehat, prasehat dan tidak sehat. Hasil indeks 0,22 masih dikategorikan tidak sehat. Untuk mencapai kategori prasehat dibutuhkan kerjasama lintas sektor untuk memenuhi 12 indikator yang diukur.

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain masih adanya budaya masyarakat yang menganggap kesakitan ataupun kematian merupakan takdir, terbatasnya jumlah SDM yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan primer, akses jangkauan dan disparitas, kesehatan lingkungan yang belum maksimal, keterbatasan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan. Dukungan gizi terutama dalam masa tumbuh kembang berpengaruh besar dalam perkembangan anggota keluarga dan masyarakat. Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi pada perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif. Kurang gizi yang dialami saat awal kehidupan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa. Tidak bisa dideteksi dini penyakit pada masa kehamilan juga merupakan masalah yang menyebabkan kematian ibu.

Untuk mencapai target akhir RPJMD yang bisa dilakukan dan perencanaan

kedepan antara lain meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan seperti mengutamakan upaya promotif, preventif dalam pelayanan kesehatan untuk menekan kejadian penyakit, meningkatkan status gizi, meningkatkan kesehatan lingkungan. Meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan dengan melakukan percepatan dan kebijakan yang tepat dalam hal SDM, pengawasan, pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan. Pengawasan dan pembinaan terhadap sediaan farmasi, makanan dan minuman serta

## 2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pengukuran efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.

Pada tahun 2024 indikator Angka Harapan Hidup didukung oleh beberapa Program antara lain program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan total anggaran program pendukung sebesar anggaran Rp.55.292.241.915,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.43.835.093.320,- atau 79,27%.

yang dihasilkan.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan dengan beberapa upaya agar output yang diharapkan tercapai seperti melibatkan multipihak dalam pengelolaan kegiatan misalnya memanfaatkan tenaga ahli yang berada di Kabupaten Karimun seperti tenaga ahli dari RSUD M.Sani sebagai pemateri, melibatkan kader posyandu dalam melaksanakan kegiatan review kematian ibu dan bayi, penggunaan jasa pihak ke-3 dan lintas sektor dalam pengelolaan kegiatan seperti RS swasta, Komisi Penanggulangan AIDS dan LSM. Tindakan lainnya yang bisa menghasilkan efisiensi

SDM adalah dengan menempatkan SDM sesuai dengan keahliannya.

Jika disandingkan dengan capaian indikator kinerja maka efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator

kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.38**  
**Analisis Efisiensi Sasaran**

Tahun	Program	Input		Out put		Outcome		Penjelasan Evaluasi Analisis Efisien
		Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	Target	Realisa	Targe	Realisa	
2023	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.803.202.718	47.304.997.661	- 13 Puskesmas yang mengisi aplikasi Keluarga Sehat 12.052 keluarga tercapai 12 indikator keluarga sehat	- 13 Puskesmas yang telah melaporkannya pe mantauan Keluarga Sehat di aplikasi KS 12.817 keluarga tercapai 12 indikator keluarga sehat	0,21 Indeks Keluarga Sehat	0,22 Indeks Keluarga Sehat	Anggaran yang tersedia tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023. Besarnya anggaran 2023 dibanding tahun 2024 ada di kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang mana ini adalah kegiatan pengadaan yang bersumber dari anggaran DAK. Dengan berkurangnya anggaran kegiatan tersebut maka persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan tahun 2024 tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak mempengaruhi capaian kegiatan dan capaian program yaitu Indeks Keluarga Sehat. Output
2024	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.761.099.174	36.809.973.512	- 13 Puskesmas yang mengisi aplikasi Keluarga Sehat - 13.343 keluarga tercapai 12 indikator keluarga sehat	- 13 Puskesmas yang telah melaporkannya pe mantauan Keluarga Sehat di aplikasi KS - 13.343 keluarga tercapai 12 indikator keluarga sehat	0,23 Indeks Keluarga Sehat	0,23 Indeks Keluarga Sehat	

								<p>program ke-1 yang dikeluarkan tahun 2024 dan 2023 hasilnya sama yaitu 13 Puskesmas yang telah melaporkan pemantauan Keluarga Sehat di aplikasi KS. Pada output ke-2 realisasi jumlah keluarga yang tercapai 12 indikator sehatnya, realisasi tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu dari 10.997 keluarga menjadi 12.817 keluarga. Jika dibandingkan dari outcome, capaian outcome tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 0,20 menjadi 0,22 Indeks Keluarga Sehat. Ditahun 2023 realisasi output dan outcome tercapai maka dari input yang berupa anggaran tersedia, terjadi efisiensi sebesar 16,94% sehingga dapat dikatakan terjadi efisiensi penggunaan sumber daya. Pada tahun 2024 realisasi output dan outcome tercapai.</p>
2023	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	751.515.887	547.188.200	13 Unit pelayanan kesehatan yang melakukan update data di SISDMK	13 Unit pelayanan kesehatan yang melakukan	69,23 % unit pelayanan dengan ketersediaan tenaga	76,92% unit pelayanan dengan ketersediaan tenaga	Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat dari

					update data di SISDMK	kesehatan sesuai standar	kesehatan sesuai standar	penggunaan anggaran yang tersedia tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023 dan dari output yang dikeluarkan tahun 2024 dan 2023 sama yaitu 13 Unit pelayanan kesehatan yang telah melakukan update data di SISDMK, dan jika dibandingkan dari outcome, capaian outcome tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan 2024 sehingga dapat dikatakan terjadi efisiensi penggunaan sumber daya
2024	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	748.264.000	92.557.500	13 Unit pelayanan kesehatan yang melakukan update data di SISDMK	13 Unit pelayanan kesehatan yang melakukan update data di SISDMK	92,30 % unit pelayanan dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	53,85% unit pelayanan dengan ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	
2023	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	374.498.000	260.594.700	7 jenis sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman dilakukan pengawasan (Apotek, toko obat, toko alkes, optikal, UMOT, PIRT/IRTP, TPM)	7 jenis sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman yang telah dilakukan pengawasan (Apotek, toko obat, toko alkes, optikal, UMOT, PIRT/IRTP, TPM)	53,48% Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat	65,87% sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat	Penggunaan anggaran yang tersedia tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 dan dari output yang dikeluarkan tahun 2024 dan 2023 sama yaitu 7 jenis sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman yang telah dilakukan pengawasan. Dan jika dibandingkan dari outcome, capaian outcome tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan 2023. Ditahun 2024 realisasi output dan outcome tercapai maka dari input yang berupa anggaran
2024	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	487.407.000	327.162.267	7 jenis sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman dilakukan pengawasan (Apotek, toko obat, toko alkes, optikal, UMOT, PIRT/IRTP, TPM)	7 jenis sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman yang telah dilakukan pengawasan (Apotek, toko obat, toko alkes, optikal, UMOT, PIRT/IRTP, TPM)	67,94% Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat	71,89% sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat	

								tersedia, tidak terjadi efisiensi sehingga dapat dikatakan terjadi efisiensi penggunaan sumber daya
2023	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.016.700.428	3.506.020.296	71 desa/ kelurahan yang dilakukan advokasi kebijakan Germas	71 desa/ kelurahan yang telah dilakukan advokasi kebijakan Germas	50,70% desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	71,83% desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	Penggunaan anggaran yang tersedia tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 dan dari output yang dikeluarkan tahun 2024 dan 2023 sama yaitu 71 desa/ kelurahan yang telah dilakukan advokasi kebijakan Germas. Jika dibandingkan dari outcome, capaian outcome tahun 2024 lebih rendah dibandingkan 2023. Ditahun 2024 realisasi output dan outcome tercapai maka dari input yang berupa anggaran tersedia, tidak terjadi efisiensi sehingga dapat dikatakan terjadi efisiensi penggunaan sumber daya
2024	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.295.471.741	6.605.400.041	71 desa/ kelurahan yang dilakukan advokasi kebijakan Germas	71 desa/ kelurahan yang telah dilakukan advokasi kebijakan Germas	56,33% desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	63,38% desa/ kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan dengan beberapa upaya agar output yang diharapkan tercapai seperti pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan misalnya memanfaatkan tenaga ahli yang berada di Kabupaten Karimun seperti tenaga ahli dari RSUD M.Sani sebagai pemateri, melibatkan kader posyandu dalam

melaksanakan kegiatan review kematian ibu dan bayi, penggunaan jasa pihak ke-3 dan lintas sektor dalam pengelolaan kegiatan seperti RS swasta, Komisi Penanggulangan AIDS dan LSM. Tindakan lainnya yang bisa menghasilkan efisiensi SDM adalah dengan menempatkan SDM sesuai dengan keahliannya.

ii. Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.

Indikator **Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)** adalah Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk

penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berikut merupakan capaian angka Harapan Lama Sekolah pada Kabupaten Karimun pada tahun 2024

**Tabel 3.39**  
**Capaian Indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10 Tahun	12,62 Tahun	96,34 %

*Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karimun, Tahun 2025*

Indikator yang pertama yaitu **Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)** diatas menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karimun pada tahun 2024 terealisasi 12,66 tahun sehingga target 13.10 tahun belum sepenuhnya tercapai yaitu hanya tercapai 96,34%. Dengan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah 12,62 tahun dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD dan SMP

sekarang di Kabupaten Karimun punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan SMA maupun Diplomal (DI).S elanjutnya apabila dibandingkan dengan realisasi 4 tahun sebelumnya tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karimun semakin meningkat, sebagaimana nampak pada grafik berikut:

Gambar 3.6  
Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)  
Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d. 2024



Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2025

4. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Karimun pada 2019 sebesar 12,30 tahun dan meningkat setiap tahunnya hingga pada 2020 sebesar 12,42 tahun dan meningkat setiap tahunnya hingga pada 2024 menjadi 12,62 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karimun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Karimun pada 2023 sebesar 12,61 tahun dan meningkat setiap tahunnya hingga pada 2024 menjadi 12,62 tahun, artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan

dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di masa mendatang adalah selama 12,62 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA Sederajat. Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya meningkatkan Pendidikan baik Formal maupun nonformal serta faktor non pendidikan lainnya yang dapat menunjang peningkatan pendidikan di Kabupaten Karimun.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja Angka harapan lama sekolah dengan tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.40

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Angka  
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karimun

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,90 Tahun	12,61 Tahun	97,75%	13,10 Tahun	12,62 Tahun	96,34%

Sumber : BPS dan Disdikbud Kabupaten Karimun

Berdasarkan tabel 3.34 di atas angka harapan lama sekolah pada tahun 2023 capaian mencapai 97,75% dan pada tahun 2024 hanya 96,34%.

Perbandingan Capaian Angka

Harapan Lama Sekolah tahun 2024 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41.

Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 Dengan Target  
Tahun 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET AKHIR DI RPJMD 2026	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,62 Tahun	13,50 Tahun	93,48 %

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 target untuk angka harapan lama sekolah sampai dengan di tahun 2026 adalah sebesar 13,50 tahun. Sedangkan realisasi tahun

2024 sebesar 12,62 tahun sehingga masih terdapat selisih sebesar 0,88 tahun atau capaian Cuma 93,48%. Selanjutnya perbandingan capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karimun

Tabel 3.42

Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024  
Kabupaten Karimun Dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2023	PROV. KEPRI	NASIONAL
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,61 Tahun	13,27 Tahun	13,21 Tahun

Berdasarkan table 3.36. diatas realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 Kabupaten Karimun masih lebih rendah dibandingkan Angka Harapan Lama Sekolah tingkat Provinsi Kepulauan Riau Maupun Tingkat Nasional. Untuk itu perlu upaya - upaya dengan berbagai Program pendukung yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu:

- a. Tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah/madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
- b. Tetap memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.
- c. Melakukan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Karimun

mulai dari jenjang PAUD sampai dengan SMP dengan cara mutasi atau penerimaan CPNS atau PPPK.

- d. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang berimbang antara di kota dan di pulau-pulau.
- e. Memberikan bantuan seragam sekolah kepada siswa baru tingkat SD maupun SMP untuk seluruh siswa di Kabupaten Karimun.

## 2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenis pendidikan yang pernah dijalani. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah

menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat

penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Capaian Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Karimun pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.43.**

**Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karimun Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata – Rata Lama Sekolah	8,75 Tahun	8,91 Tahun	101,83%

**Sumber : BPS dan Disdikbud Kabupaten Karimun**

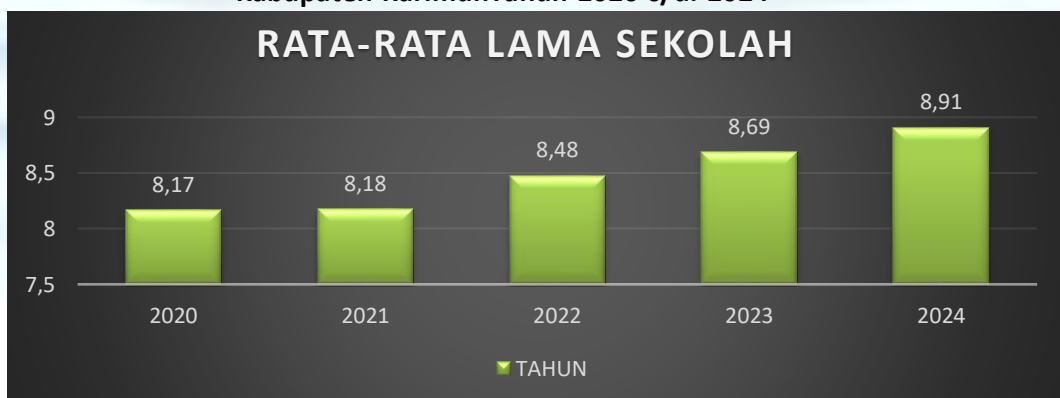
Berdasarkan Tabel 3.37. diatas Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 di Kabupaten Karimun terealisasi 8,91 tahun atau mencapai 101, 83% dari target 8,75 tahun. Dengan realisasi Rata-Rata Lama Sekolah 8,91 tahun, menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Karimun rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Selain itu secara angka

perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah tersebut sudah mendekati Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 8,69 tahun maka pada tahun 2024 terdapat peningkatan 0,22 tahun menjadi 8,91 tahun. Adapun tren capaian Rata-Rata Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik 3.5. berikut :

**Grafik 3.7.**

**Grafik Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karimun Tahun 2020 s/d. 2024**



**Sumber : BPS Kabupaten Karimun**  
Berdasarkan Grafik 3.5 diatas yang merupakan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karimun, rata-rata lama sekolah (RLS) mencapai 8,91 tahun pada 2024. Jika dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu, RLS Kabupaten Karimun pada 2024 mengalami peningkatan 0,74 tahun. Pada 2020, RLS Kabupaten Karimun hanya selama 8,17 tahun. Melihat trennya, RLS di Kabupaten Karimun terus mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Adapun, kenaikan

RLS tertinggi terjadi pada 2022, yakni 0,30 tahun. RLS memiliki nilai minimum 0 tahun dan nilai maksimum 15 tahun. RLS merupakan salah satu indikator yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bersama dengan harapan lama sekolah, RLS masuk ke dimensi pengetahuan.

Berikut ini disajikan perbandingan capaian kinerja rata-rata lama sekolah dengan tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3.44**

**Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karimun**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata – Rata Lama Sekolah	8,60 Tahun	8,69 Tahun	101,05%	8,75 Tahun	8,91 Tahun	101,83%

**Sumber : BPS dan Disdikbud Kabupaten Karimun**

Berdasarkan tabel, 3.6. diatas rata-rata lama sekolah terjadi peningkatan capaian yang mana pada tahun 2023 capaian hanya 101,05% dan pada tahun 2024 menjadi 101,83%.

Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.45.**

**Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024 Dengan Target Tahun 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET AKHIR DI RPJMD 2026	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	8,91 Tahun	9,00 Tahun	99,00%

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 target untuk Rata-Rata lama sekolah sampai dengan di tahun 2026 adalah sebesar 9,00 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 8,91 tahun sehingga masih terdapat

selisih sebesar 0,09 tahun atau capaian 99,00%. Selanjutnya perbandingan capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karimun dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional disajikan pada Tabel 3.40., sebagai berikut:

**Tabel 3.46**  
**Perbandingan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 Kabupaten Karimun Dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional**

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	PROV. KEPRI	NASIONAL
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	8,91 Tahun	10,50 Tahun	8,85 Tahun

Berdasarkan table 3.8. diatas realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2024 Kabupaten Karimun masih lebih rendah dibandingkan Rata-Rata Lama Sekolah tingkat Provinsi Kepulauan Riau Maupun Tingkat Nasional. Untuk itu perlu upaya - upaya dengan berbagai Program pendukung yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar Rata-Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu:

- a. Program bantuan operasional sekolah (BOS), merupakan bentuk perhatian pemerintah agar seluruh penduduk usia sekolah dapat bersekolah walaupun terkendala kondisi ekonomi. Untuk diketahui bahwa pemerintah membebaskan biaya pendidikan untuk

sekolah negeri jenjang PAUD, SD dan SMP. Melalui dan BOS, kebutuhan dasar peserta didik dapat dipenuhi, seperti pengadaan buku/modul pembelajaran.

- b. Program pendidikan nonformal, membantu masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA) untuk tetap mendapatkan pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan/paket yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Selain itu, pendidikan nonformal juga menyiapkan program keahlian terampil, yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

### iii. Sasaran Strategis Terwujudnya Kesetaraan Gender.

Capaian sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender dilaksanakan secara sinergis dengan program dari Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional dengan pemenuhan target-target yang merupakan strategi sasaran ke-10 yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja

Kabupaten Karimun Tahun 2024. Sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran ini ditentukan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender.(IPG). Adapun capaian dari indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.40 berikut ini :

Tabel 3.47

Capaian Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Kesetaraan Gender

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,50	91,33	99,81 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				99,81 %

Berdasarkan dari tabel 3.47 di atas rata-rata tingkat capaian untuk sasaran ini pada tahun 2024 adalah sebesar 91,50 % atau bermakna semakin meningkat dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Pencapaian indikator tersebut diperoleh dari hasil pembagian realisasi indikator tahun 2024 sebesar 91,33 poin terhadap target yang ditetapkan sebesar 91,50 poin serta dikalikan 99,81 persen. Capaian realisasi IPG tahun 2024 mengalami peningkatan hasil jika dibandingkan terhadap capaian realisasi IPG tahun 2023 sebesar 91,12 poin

(meningkat 0,21 poin). Begitu juga jika dibandingkan terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, capaian realisasi IPG tahun 2024 sebesar 91,33 poin belum melampaui target RPJMD tahun 2024 sebesar 91,50 poin (menurun 0,17 poin).

Dalam rangka mencapai Tujuan OPD Terwujudnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 melalui indikator pengukurnya yaitu : Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indikator tersebut bertujuan mencapai sasaran Pemkab Karimun 95

untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas sebagaimana tercantum pada Misi ke 3 dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yaitu : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperoleh dari hasil perhitungan data oleh DP3AKB Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Kementerian PPA dan BPS Pusat), Perhitungan indikator IPG pada tahun 2024 terhadap target yang ditetapkan masih menggunakan angka realisasi IPG pada tahun 2023, hal ini disebabkan karena hasil perhitungan realisasi indikator IPG Kabupaten/Kota tahun 2024 baru akan diumumkan/dipublikasi oleh Kementerian PPA dan BPS pada pertengahan tahun 2025.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah merupakan salah satu indikator pemerintahan yang Responsif Gender. IPG merupakan indeks pencapaian

kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG sendiri memiliki 3 indikator; indikator pada bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan bidang Ekonomi. Pada bidang pendidikan terdapat indikator melek huruf, akses pendidikan dasar, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Pada bidang kesehatan terdapat Angka Harapan Hidup (AHH) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sedangkan pada bidang ekonomi kita bisa melihat dari pendapatan, daya beli, lapangan pekerjaan, status pekerjaan dan jenis pekerjaan.

**Tabel 3.48**  
**Indikator Variabel Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG)**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2023**

TAHUN	AMH/AHLS		ARLS		UHH		IPG
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
2020	12.19	12,59	8.18	8.17	70,46	70,91	90,91
2021	12.35	12.85	8.48	7.81	68,91	71,44	91,25
2022	12,42	12.92	8.49	7.82	69,11	71,11	91,00
2023	12.52	12.93	8.73	8.14	69.50	73.46	91,12
2024	12,54	12,94	8,90	8,43	70,06	74,05	91,33
<b>Prov Kepri 2023</b>	12.93	13.30	10.51	10.38	<b>68.99</b>	<b>72.94</b>	<b>93,96</b>
<b>Nasional 2023</b>	13,10		8,69		<b>71,85</b>		<b>91,07</b>

Sumber : Kemen PPPA, BPS, 2024

Berdasarkan perhitungan metode baru Rasio IPM terhadap IPG di Kabupaten Karimun tahun 2024 tercatat 124,24 poin menurun jika di bandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebanyak 125,42

poin. Hal ini mengalami penurunan sebanyak 1,18 poin. Indeks IPG Kabupaten Karimun tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel tabel 3.49 berikut :

**Tabel 3.49**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024**

TAHUN	IPM	IPG	IDG	UHH	RASIO IPG TERHADAP IPM (%)
2020	71,10	90,91	64,17	70,69	127,86
2021	71,44	91,25	64,05	70.91	127,73
2022	71,70	91,00	63,89	71.11	126,92
2023	72,65	91,12	63.47	71,53	125,42
2024	73,51	91,33	57,07	72,1	124,24
<b>Prov. Kepri 2024</b>	<b>77.11</b>	<b>93,96</b>	<b>58,83</b>	<b>70,97</b>	<b>121,85-</b>
<b>Nasional</b>	<b>71,85</b>	<b>91,07</b>	<b>72,10</b>	<b>71,85</b>	<b>126,75</b>

Sumber : Kemen PPPA, BPS, 2025

Pencapaian pembangunan gender adalah IPG yang merupakan turunan dari IPM, tetapi yang diukur adalah “Angka Rasio”, yaitu Rasio antara IPM Laki-laki

dan IPM Perempuan Melalui angka IPG, kesenjangan atau Gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio

antara IPM perempuan dengan Laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi Gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (mewakili dimensi kesehatan), Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta Pengeluaran Per Kapita (mewakili dimensi ekonomi). Salah satu indikator gender yang

mampu menunjukkan adanya kehilangan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index/GII*).

Kesenjangan tersebut disebabkan adanya diskriminasi dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan. Indeks ini diukur dari tiga dimensi, yaitu Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan, dan Pasar Tenaga Kerja.

Ketidaksetaraan gender terutama dalam hal ekonomi diprediksi semakin berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek (Jayachandran, 2014). Pertama berkaitan dengan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dari pertanian menuju sektor industri dan jasa-jasa yang memungkinkan perubahan sistem dalam dunia kerja. Kedua, perkembangan teknologi yang memudahkan pekerjaan domestik rumah tangga yang berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga. Ketiga, meningkatnya perbaikan sistem dalam dunia kesehatan yang menyebabkan risiko dan kerentanan anak terhadap

penyakit menjadi turun. Dampaknya, perempuan menjadi lebih bebas dan tenang untuk bekerja dan meninggalkan anak-anaknya di rumah.

Faktor-faktor tersebut sangat memungkinkan perempuan dapat lebih banyak berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian.

**Tabel 3.50**  
**Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2020-2024**

TAHUN	Kespro (MTF)	Pendidikan SMA	Pasar Naker (TPAK)	IKG
2020	0.077	27.53	36.00	0,423
2021	0.051	37.01	41.02	0,398
2022	0.028	31.97	41.76	0,343
2023	0.000	39.63	41.28	0,225
2024	0.041	39.04	44.26	0,401
Prov. Kepri 2024	0.030	60.24	51.95	0,348

Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2022

Kesenjangan tersebut disebabkan adanya diskriminasi dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan. Indeks ini diukur dari tiga dimensi, yaitu Kesehatan Reproduksi/Kespro (MTF), Pemberdayaan (Pendidikan Perempuan Minimal SMA), dan Pasar Tenaga Kerja (TPAK).

Ketidaksetaraan gender terutama dalam hal ekonomi diprediksi semakin berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek (Jayachandran, 2014). Pertama berkaitan dengan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dari pertanian menuju sektor industri dan jasa-jasa yang

memungkinkan perubahan sistem dalam dunia kerja. Kedua, perkembangan teknologi yang memudahkan pekerjaan domestik rumah tangga yang berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga. Ketiga, meningkatnya perbaikan sistem dalam dunia kesehatan yang menyebabkan risiko dan kerentanan anak terhadap penyakit menjadi turun. Dampaknya, perempuan menjadi lebih bebas dan tenang untuk bekerja dan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Faktor-faktor tersebut sangat memungkinkan perempuan dapat lebih banyak berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian.

Realisasi capaian indikator IPG Kabupaten Karimun Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun serta dukungan Kerjasama berbagai lintas sektor dan lintas program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan mengerahkan segenap sumber daya dan dukungan serta efisiensi anggaran OPD pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui berbagai program dan kegiatan

Tahun Anggaran 2024 antara lain : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), serta Program Perlindungan Khusus Anak.

**Tabel 3.51**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Yang Mendukung Indikator IPG**

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Out Put		Out Come		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	50.000.000	1.281.600	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	Efisiensi Penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia pada APBD Murni TA 2024 lebih kecil dari anggaran APBD-P TA 2024 cukup efisiensi pe manfaat nya dalam mencapai target. Dari Output keluaran target 10 Sub kegiatan/RKA terdapat 10 Sub kegiatan target kinerjanya mencapai 100% bahkan melebihi target, sehingga dapat dikatakan
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.000.000	1.281.600	35 OPD/ Lembaga	35 OPD/ Lembaga	100% jumlah peserta	100% jumlah peserta	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	200.000.000	54.684.100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	200.000.000	54.684.100	30 Organisasi	30 Organisasi	100% Organisasi dibina	100% Organisasi dibina	
2	Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	130.000.000	123.953.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	130.000.000	123.953.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100% Dokumen Selesai	100% Dokumen Selesai	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	159.047.000	75.877.645	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kab/Kota	159.047.000	75.877.645	25 Layanan	25 Layanan	100% Layanan Selesai	100% Layanan Selesai	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	100.000.000	10.387.000	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100% 2 Kegiatan	100% 2 Kegiatan	

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Input		Out Put		Out Come		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	75.000.000	8.905.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan Selesai	100% Laporan Selesai	sudah efisiensi.
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	25.000.000	1.482.000	30 Orang	30 Orang	100% Orang dibina	100% Orang dibina	
3	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota</b>	50.000.000	6.076.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	50.000.000	6.076.000	12 Dokumen	12 Dokumen	100% Dokumen Selesai	100% Dokumen Selesai	
4	Perlindungan Khusus Anak	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota</b>	142.553.000	102.412.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	100% 1 Kegiatan	
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	142.553.000	102.412.000	15 Dokumen	15 Dokumen	100% Dokumen Selesai	100% Dokumen Selesai	
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	338.400.000	295.836.000	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100% 2 Kegiatan	100% 2 Kegiatan	
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah	88.400.000	77.413.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100% Dokumen Selesai	100% Dokumen Selesai	
		Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	250.000.000	218.423.000	15 Dokumen	15 Dokumen	100% Dokumen Selesai	100% Dokumen Selesai	

Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2025

Capaian prestasi dan kinerja yang diperoleh Kabupaten Karimun berhubungandengan capaian indikator IPG pada tahun 2024 antara lain :

1. Piagam Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2024 dari Kementerian Negara PPA

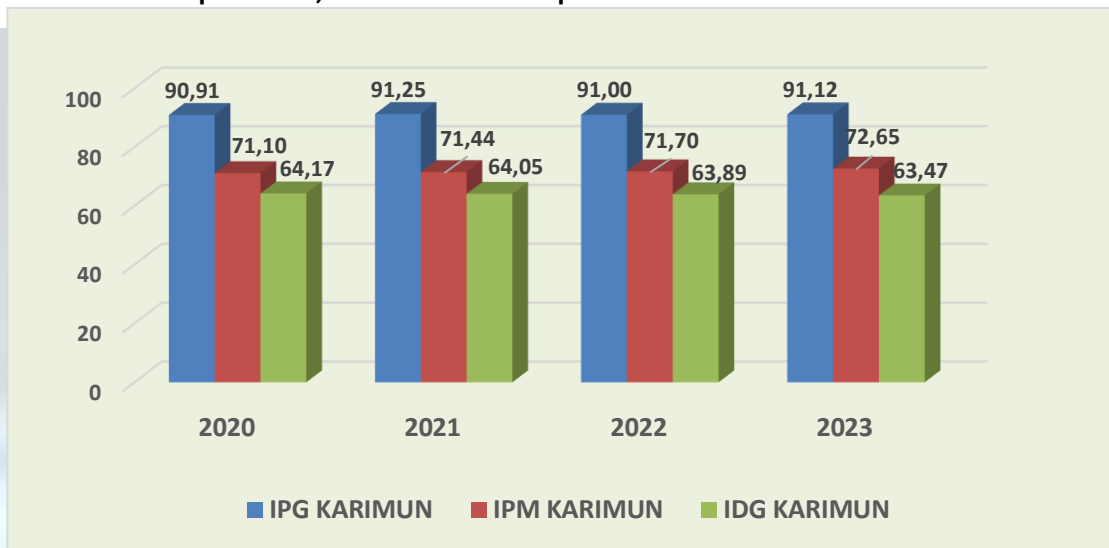
No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Peringkat/ Nilai	Madya (601-700)	Penilaian (-)	Nindya (701-800)	Nindya (715,84)
2	Target Peringkat/Nilai	Pratama (501 – 600)	Madya (601-700)	Nindya (701-800)	Utama (801-900)
Capaian Kinerja (%)		117	0	100	89

2. NINDYA, dari Kementerian Negara PPA,

Berikut Capaian Data IPG, IDG dan IPM Kabupaten Karimun Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik 3.7 di bawah ini :

Grafik 3.8.

Capaian IPG, IDG dan IPM Kabupaten Karimun Tahun 2020-2023



Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2024

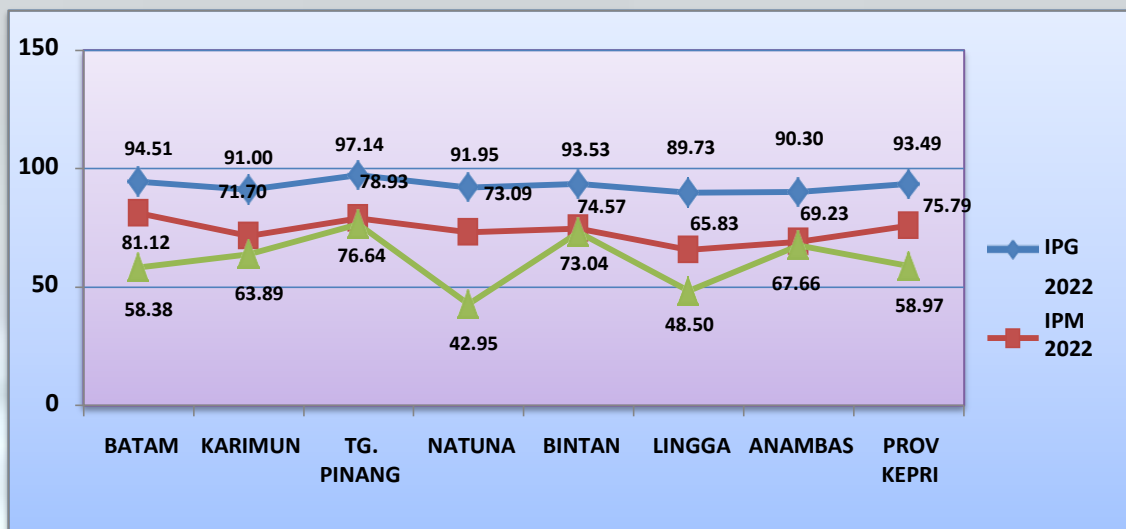
Pencapaian pembangunan gender adalah IPG yang merupakan turunan dari IPM, tetapi yang diukur adalah “Angka Rasio”, yaitu Rasio antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan Melalui angka IPG, kesenjangan atau Gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan Laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin

rendah rasio maka semakin tinggi Gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Pencapaian pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama ini. IPG Kabupaten Karimun tahun 2023 sebesar 91,12 poin masih menduduki peringkat keenam dibandingkan dengan 7 kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Riau, pencapaian tertinggi pada Kota Tanjung Pinang sebesar 97,14 poin dan pencapaian terendah pada Kabupaten Lingga yaitu sebesar 90,48 poin

Grafik 3.9

IPG, IPM Dan IDG Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kab/Kota Tahun 2022



Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2024

Peningkatan atau perkembangan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka IPM laki-laki dan IPM perempuan sama-sama mengalami peningkatan dalam

kurun waktu 3 tahun terakhir. Namun dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang masih rendah. Sebagai akibatnya IPG menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Data perkembangan IPM, IPG dan IDG Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 3.52  
Perkembangan IPM, IPG dan IDG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023

No	Uraian	Karimun	Batam	Tg. Pinang	Bintan	Lingga	Anambas	Natuna	Prov. Kepri
1	IPM – 2020	71.10	81.09	78.73	73.98	64.98	68.48	72.63	75.48
	IPM – 2021	71.44	81.11	78.91	74.13	65.29	68.80	72.72	75.59
	IPM - 2022	71.70	81.12	78.93	74.57	65.83	69.23	73.09	75.79
	IPM - 2023	72,65	81,67	79,64	74,99	66,57	69,61	73,47	76,46
2	IPG - 2020	90,91	94,42	96,77	93,10	89,26	90,16	91,72	93,10

No	Uraian	Karimun	Batam	Tg. Pinang	Bintan	Lingga	Anambas	Natuna	Prov. Kepri
	IPG – 2021	91,25	94,43	96,79	93,12	89,25	90,27	91,67	93,31
	IPG - 2022	91,00	94,51	97,14	93,53	89,73	90,30	91,95	93,49
	IPG - 2023	91.12	94.75	97.14	93.78	90.48	91.14	91.86	93.50
3	IDG – 2020	64,17	58,40	76,13	69,71	48,96	57,74	42,02	61,58
	IDG – 2021	64,05	59,10	76,44	69,64	48,52	62,57	42,99	62,02
	IDG - 2022	63,89	58,38	76,64	73,04	48,50	67,66	42,95	58,97
	IDG - 2023	63.47	58.65	76.68	71.98	48.44	67.36	42.96	59.05

Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2024

iv. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengendalian Penduduk.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Data capaian sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2023 diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan

suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Adapun capaian dari sasaran ke 11 ini dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut ini :

Tabel 3.53

Capaian Indikator Sasaran Strategis Terwujudnya Pengendalian Penduduk

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,70 %	0,84 %	49,41 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				49,41 %

Sumber : Kemen PP&PA, BPS, 2024

Berdasarkan tabel 3.47 di atas dapat dilihat tingkat capaian untuk sasaran ini adalah sebesar 49,41 % atau bermakna semakin menurun dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Pencapaian indikator tersebut diperoleh

dari hasil pembagian realisasi indikator tahun 2024 sebesar 1,70 persen terhadap target yang ditetapkan sebesar 1,10 persen serta dikalikan 100 persen. Perhitungan indikator LPP pada tahun 2023 terhadap target yang ditetapkan dalam perhitungan capaian sudah

menggunakan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester II pada tahun 2024.

Capaian realisasi LPP tahun 2023 (1,7%) mengalami peningkatan hasil jika dibandingkan terhadap capaian realisasi LPP tahun 2022 sebesar 0,56 persen (belum berhasil menekan/menurunkan sebesar 1,14 persen). jika dibandingkan terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, capaian realisasi LPP tahun 2023 sebesar 1,7 persen belum memenuhi target RPJMD tahun 2023 sebesar 1,17 persen (menekan 0,53 persen).

Peningkatan capaian indikator LPP Kabupaten Karimun Tahun 2023 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Karimun serta dukungan Kerjasama berbagai lintas sektor dan lintas program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan mengerahkan segenap sumber daya dan dukungan serta efisiensi anggaran OPD pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui berbagai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 seperti :

1. Program Pengendalian Penduduk,
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB),
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Berikut data penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.54**  
**Data Penduduk Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis Kelamin di**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
		THN 2022	THN 2023			
1	KARIMUN	51.943	47,765	24,379	23,386	17,70
2	MERAL	50.768	53,255	27,380	25,875	19,72
3	MERAL BARAT	16.430	17,245	8,882	8,363	6,38
4	TEBING	31.796	34,544	17,566	16,978	12,79
5	BURU	10.344	10,646	5,456	5,190	3,94
6	KUNDUR	30.923	31,335	15,673	15,662	11,60
7	KUNDUR UTARA	12.817	13,048	6,697	6,351	4,83
8	KUNDUR BARAT	18.977	19,444	9,960	9,484	7,20

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
		THN 2022	THN 2023			
9	UNGAR	5.869	5,943	3,029	2,914	2,20
10	MORO	19.074	11,431	5,894	5,537	4,23
11	DURAI	6.292	6,451	3,322	3,129	2,39
12	BELAT	6.842	6,805	3,568	3,237	2,52
13	SELAT GELAM	-	4,242	2,193	2,049	1,57
14	SUGIE BESAR	-	7,967	4,094	3,873	2,95
KAB. KARIMUN		265.640	270,121	138,093	132,028	100

**Sumber:** Disdukcapil Kabupaten Karimun tahun 2024

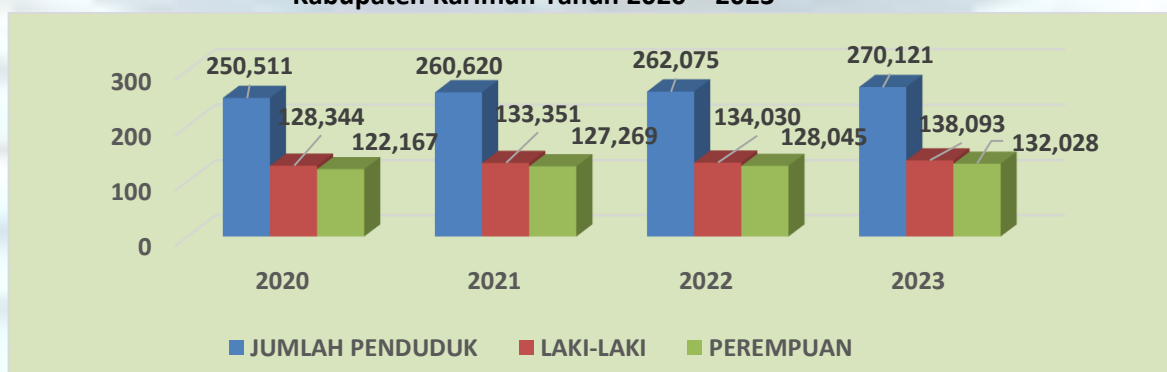
**Catatan :** Kec. Selat Gelam dan Sugie Besar masih bergabung dengan Kecamatan Induk

Adapun indikator yang memiliki korelasi dan mendukung sasaran ini adalah angka kelahiran, angka kematian, penduduk datang dan penduduk pergi tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 1,17% dengan realisasi sebesar 1,7% atau capaian kinerja 69 %.

Realisasi ini dihitung berdasarkan rumus periode jangka waktu 1 tahun yaitu jumlah penduduk tahun 2023

sebanyak 270.121 jiwa dikurangi jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 265.640 jiwa lalu berbanding terbalik terhadap penduduk tahun 2022 sebanyak 265.640 jiwa serta dikali 100. Berikut perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Karimun tahun 2020-2023 seperti pada grafik di bawah ini :

**Grafik 3.10**  
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di  
Kabupaten Karimun Tahun 2020 – 2023



**Sumber:** Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2024

Ada empat faktor yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan

Penduduk (LPP) antara lain yaitu ;

### 1. Kelahiran

Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, Antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program Keluarga Berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Kedua yang menghambat kelahiran itu karena menggunakan Program Keluarga Berencana. Selanjutnya melalui berbagai upaya kegiatan seperti Generasi Berencana (Genre) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) agar angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun menurun atau dapat diturunkan.

Data angka kelahiran tahun 2023 di wilayah Kabupaten Karimun sebanyak 1.577 bayi, mengalami penurunan kelahiran bayi jika dibandingkan terhadap kelahiran bayi tahun 2021 sebanyak 3.456 bayi.

Selama tahun 2023 kelahiran bayi terbanyak terdapat di Kecamatan Karimun sebanyak 635 bayi (20,52%), serta kelahiran bayi terendah terdapat di Kecamatan Ungar sebanyak 54 bayi (1,75%). Berikut data kelahiran bayi di Kabupaten Karimun tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.55 berikut ini.

Tabel 3.55  
Data Kelahiran di Kabupaten Karimun Tahun 2023

NO	KECAMATAN	BAYI LAHIR HIDUP TAHUN 2023				MEMILIKI AKTE ANAK
		LK	PR	JUMLAH	%	JUMLAH
1	Karimun	309	326	635	20,52	248
2	Meral	279	330	609	19,68	360
3	Meral Barat	134	121	255	8,24	134
4	Tebing	209	205	414	13,38	272
5	Buru	39	31	70	2,26	51
6	Kundur	151	152	303	9,80	121
7	Ungar	33	21	54	1,75	23
8	Kundur Utara	71	64	135	4,36	63
9	Belat	41	40	81	2,62	34
10	Kundur Barat	128	130	258	8,34	141
11	Moro	63	68	131	4,23	50
12	Durai	37	23	60	1,94	19
13	Sugi Besar	35	54	89	2,88	40
14	Selat Gelam	-	-	-		21
<b>TOTAL</b>		<b>1.529</b>	<b>1.565</b>	<b>3.094</b>	<b>100</b>	<b>1.577</b>

Sumber: Dinkes, Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2024

**Catatan** : Kec. Selat Gelam dan Sugie Besar masih bergabung dengan Kecamatan Induk

Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan TFR (*Total Fertility Rate*) adalah peningkatan Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR). Angka pemakaian kontrasepsi adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB. Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu faktor antara (*proximate determinant*) fertilitas yang secara langsung mempengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi demografi, sosial, ekonomi, hukum, politik dan lingkungan. Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Melalui sasaran strategis ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun berupaya meningkatkan pemakaian kontrasepsi atau kepesertaan ber KB di masyarakat guna mengendalikan angka kelahiran penduduk.

Jumlah capaian angka pemakaian kontrasepsi/peserta KB aktif tahun 2023 sebanyak 28.649 dari PUS sebanyak 40.628 atau Rasio 70.52%. Rasio peserta KB aktif tertinggi terdapat di Kecamatan Selat Gelam sebesar 87,97% sebanyak 666 akseptor dari 757 total PUS, sedangkan Rasio terendah terdapat di Kecamatan Karimun sebesar 57,76% sebanyak 3.683 akseptor dari 6.376 total PUS. Berikut data PUS dan peserta KB aktif menurut kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.50 berikut ini :

**Tabel 3.56**  
**Data Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	JLH PUS	JLH PESERTA KB AKTIF	RASIO (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Karimun	6376	3683	57,76
2	Meral	7608	4795	63,02
3	Meral Barat	3403	2899	85,18
4	Tebing	5884	3855	65,51
5	Buru	1589	1266	79,67
6	Kundur	4596	3226	70,19
7	Ungar	949	824	86,82
8	Kundur Utara	1501	1095	72,95

NO	KECAMATAN	JLH PUS	JLH PESERTA KB AKTIF	RASIO (%)
9	Belat	956	688	71,96
10	Kundur Barat	2810	2218	78,93
11	Moro	1770	1463	82,65
12	Durai	986	805	81,64
13	Selat Gelam	<b>757</b>	<b>666</b>	<b>87,97</b>
14	Sugi Besar	<b>1443</b>	<b>1166</b>	<b>80,80</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>40.628</b>	<b>28.649</b>	<b>70.52</b>

Sumber: Disdalduk, KB, PP&PA 2024

## 2. Kematian

Menurunnya angka kematian yang disebabkan oleh peningkatan perkembangan dalam bidang kesehatan atau medis, berbanding lurus dengan meningkatnya angka Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk memberi arti terhadap angka kelahiran yang tinggi dan umur yang panjang, tentulah mempengaruhi penduduk di wilayah Kabupaten Karimun semakin padat dan peningkatan kepada laju pertumbuhan penduduk.

Data kematian di Kabupaten Karimun yang dilaporkan dan terdata serta menurut penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Karimun tahun 2023 sebanyak 802 kasus kematian, salah satu yang menjadi penyebab tingginya angka kematian tersebut disebabkan oleh tingginya kelompok umur penduduk yang tergolong Lansia. Persentase kematian penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Meral sebesar 19,08% sebanyak 153 kematian, sedangkan persentase kematian penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sugi Besar sebesar 1,39% sebanyak 17 kematian dari 802 total Kasus kematian penduduk. Seperti terlihat pada tabel 3.51 di bawah ini :

Tabel 3.57  
Data Kematian Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk			Akte Kematian	
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	%
1	KARIMUN	24,379	23,386	47,765	130	16,21
2	MERAL	27,380	25,875	53,255	153	19,08

3	MERAL BARAT	8,882	8,363	17,245	44	5,49
4	TEBING	17,566	16,978	34,544	92	11,47
5	BURU	5,456	5,190	10,646	43	5,36
6	KUNDUR	15,673	15,662	31,335	93	11,60
7	KUNDUR UTARA	6,697	6,351	13,048	34	4,24
8	KUNDUR BARAT	9,960	9,484	19,444	43	5,36
9	UNGAR	3,029	2,914	5,943	29	3,62
10	MORO	5,894	5,537	11,431	41	5,11
11	DURAI	3,322	3,129	6,451	16	2,00
12	BELAT	3,568	3,237	6,805	34	4,24
13	SELAT GELAM	2,193	2,049	4,242	33	2,12
14	SUGI BESAR	4,094	3,873	7,967	17	1,39
<b>TOTAL</b>		<b>138,093</b>	<b>132,028</b>	<b>270,121</b>	<b>802</b>	<b>100</b>

*Sumber: Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2024*

*Catatan : Kec. Selat Gelam dan Sugie Besar masih bergabung dengan Kecamatan Induk*

### 3. Pindah Datang

Penduduk yang datang ke wilayah Kabupaten Karimun adalah penduduk yang datang dan pindah dari luar wilayah yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau

bekerja, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Berikut data Penduduk Pindah Datang di Kabupaten Karimun tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.52 berikut ini:

**Tabel 3.58**  
**Data Penduduk Pindah Datang di Kabupaten Karimun Tahunn 2023**

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PINDAH DATANG	%
1	Karimun	302	252	554	22,64
2	Meral	329	283	612	25,01
3	Meral Barat	100	82	182	7,44
4	Tebing	245	231	476	19,45
5	Buru	12	16	28	1,14
6	Kundur	136	123	259	10,58
7	Ungar	17	17	34	1,39
8	Kundur Utara	41	44	85	3,47
9	Belat	4	10	14	0,57
10	Kundur Barat	46	30	76	3,11
11	Moro	35	34	69	2,82
12	Durai	10	15	25	1,02
13	Selat Gelam	3	2	5	0,20
14	Sugi Besar	14	14	28	1,14
<b>TOTAL</b>		<b>1,294</b>	<b>1,153</b>	<b>2,447</b>	<b>100</b>

*Sumber: Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2024*

*Catatan : Kec. Selat Gelam dan Sugie Besar masih bergabung dengan Kecamatan Induk*

Penduduk pindah datang di Kabupaten Karimun berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 2.447 jiwa, kondisi tersebut menurun jika dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 2,912 jiwa. Berdasarkan data persentase penduduk pindah datang di wilayah kecamatan selama tahun 2023, terbanyak terdapat di Kecamatan Meral sebanyak 612 jiwa (25,01%). Sedangkan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Selat Gelam sebanyak 5 jiwa (0,20%).

#### 4. Pindah Keluar

Penduduk yang pergi keluar daerah dapat terjadi jika penduduk di suatu wilayah datang ke wilayah lain yang

bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja bahkan bisa dalam jumlah yang banyak seperti menjadi Tenaga Kerja (TKI) ke negara lain atau migrasi ke daerah lain di luar wilayah Kabupaten Karimun, hal ini bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk suatu daerah.

Data penduduk pindah keluar/pergi dari Kabupaten Karimun yang terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 2.513 jiwa, kondisi tersebut menunjukkan penurunan capaian jika dibandingkan terhadap tahun 2022 sebesar 94,135 jiwa.

Berikut Data Penduduk Pindah Keluar dari wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.59**  
**Data Penduduk Pindah Keluar Kabupaten Karimun Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PINDAH KELUAR	%
1	Karimun	328	316	644	25,63
2	Meral	256	227	483	19,22
3	Meral Barat	75	76	151	6,01
4	Tebing	178	146	324	12,90
5	Buru	41	25	66	2,63
6	Kundur	154	153	307	12,22
7	Ungar	16	15	31	1,23
8	Kundur Utara	46	39	85	3,38
9	Belat	13	12	25	1,0
10	Kundur Barat	61	66	127	5,05
11	Moro	51	49	100	4,0
12	Durai	24	42	66	2,63
13	Selat Gelam	10	5	15	0,60
14	Sugi Besar	47	42	89	3,54
<b>TOTAL</b>		<b>1,300</b>	<b>1,213</b>	<b>2,513</b>	<b>100</b>

**Sumber:** Disduk dan Capil Kab. Karimun Tahun 2024

**Catatan:** Kec. Selat Gelam dan Sugie Besar masih bergabung dengan Kecamatan Induk

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah penduduk pindah keluar/pergi di wilayah kecamatan selama tahun 2023 terbanyak

terdapat di Kecamatan Karimun sebanyak 644 jiwa (25,63%). Sedangkan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Selat Gelam sebanyak 15 jiwa (0,60%).

**i. Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Karimun Tahun 2021-2026 dan untuk mewujudkan sasaran dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.60**  
**Capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Pemuda	70	69,23	98.90%
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian</b>				<b>98.90 %</b>

**Sumber:** Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karimun, Tahun 2025

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks pengukuran perbandingan dari domain pendidikan, domain partisipasi pemuda, domain ketenagakerjaan dan domain kesehatan. Indeks ini digunakan untuk melihat seberapa besar pembangunan pemuda di suatu daerah.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kabupaten Karimun tahun 2024. Target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 70,00%. Capaian kinerja tersebut

didapat melalui domain dan indikator. Penentuan domain dan indikator pembangunan kepemudaan yang tepat, ditempuh dengan melakukan pemeringkatan domain sesuai pilihan ahli (expert judgement), dan dianalisis kesesuaiannya dengan Undang- Undang Kepemudaan. Berdasarkan domain yang terpilih, ditentukan indikatornya secara tepat. Ketepatan di sini selain merujuk pada studi literatur, didasarkan pula pada ketersediaan data. maka perlu ditetapkan indikator inti dan penunjang. Indikator inti akan menjadi komponen penyusunan

rumus Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sendiri dirumuskan secara sederhana agar secara praktis dapat dihitung dan diketahui indeksinya. Indeks hasil perhitungan dapat menjadi alat analisis untuk mengevaluasi keterlaksanaan pembangunan kepemudaan dalam konteks penyempurnaan program-program kepemudaan mendatang.

Penentuan Tingkatan Status Indeks

Pembangunan Pemuda (IPP) dengan merujuk pada *Human Development Index* (HDI), sebagai tahap akhir pengukuran pembangunan kepemudaan adalah menentukan tingkatan status pembangunan kepemudaan dengan kriteria.

Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yaitu sebesar 58.83 % sedangkan Nilai Indeks pembangunan pemuda tingkat Nasional yaitu sebesar 53.33%.

Tabel. 3.61

Tingkatan Status Indeks Pembangunan Kepemudaan

No	Tingkat Status	Kriteria
1	Rendah	IPP < 50
2	Menengah Bawah	50 ≤ IPP < 66
3	Menengah Atas	66 ≤ IPP < 80
4	Tinggi	IPP ≥ 80

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Karimun, 2025

Adapun perumusan IPP dapat dilakukan sebagai berikut :

**Domain Pendidikan**

1. Rata-rata lama sekolah umur 16-30 tahun
2. Tingkat melek huruf pemuda, setiap jenis kelamin.

**Tingkat partisipasi pemuda**

Tingkat partisipasi pemuda (kewirausahaan dan Peran Politik Kepemimpinan/Kepeloporan)

**Domain Ketenagakerjaan**

1. Tingkat pengangguran pemuda

2. Tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda  
**Domain Kesehatan**

1. Persentase kaum muda dengan pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS

Indikator ini secara kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kepemudaan dalam kaitannya dengan pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, kesehatan, teknologi infomasi dan komunikasi, kenakalan remaja.

Tabel 3.62

Nilai Aktual Indikator pada Dimensi Pendidikan

NO	Dimensi	Indikator	Nilai Aktual
1	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah pemuda, setiap jenis kelamin	Ijazah tertinggi yang dimiliki + kelas yang sedang diduduki)-1
		Tingkat melek huruf pemuda, setiap jenis kelamin	Jumlah pemuda melek huruf yang bisa baca tulis, dibagi jumlah seluruh pemuda, dikali100.
2	Kesehatan	Persentase kaum muda dengan pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS, setiap jenis kelamin.	Jumlah pemuda yang memiliki pengetahuan tentang HIV/ AIDS, dibagi jumlah penduduk pemuda, dikali 100
3	Partisipasi Pemuda	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemasyarakatan.	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemasyarakatan, dibagi jumlah penduduk yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemasyarakatan, dikali 100
4	Ketenagakerjaan	Tingkat pengangguran terbuka pemuda, setiap jenis kelamin.	Jumlah pegangguran terbuka pemuda, menurut jenis kelamin ,dibagi jumlah penduduk angkatan kerja, dikali 100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Karimun, 2024

Tabel. 3.63

Analisis Penentuan Indikator Inti Setiap Domain

NO	Domain	Indikator	Persentase	Total Persentase Setiap Domain
1	Pendidikan	Rata-rata lama Sekolah usia 16 s.d 30 Tahun	84.09	180.21
		Tingkat melek huruf pemuda, setiap jenis Kelamin.	96.12	
2	Partisipasi pemuda	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	4.35	4.35
3	Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran terbuka pemuda umur 16 s.d 30 Tahun	6.02	

		Tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda 16 s.d 30 Tahun	27.09	33.11
4	Kesehatan	Persentase kaum muda dengan pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS	15.26	15.26
<b>Total</b>			<b>232.93</b>	
<b>Persentase</b>			<b>58.23</b>	
<i>Ket. Perumusan Pencapaian Persentase total Setiap Domain di bagi Empat Domain</i>				

**Sumber** : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Karimun, 2025

**a. Domain Pendidikan**

Capaian Indikator Rata-rata lama Sekolah usia 16 s.d 30 Tahun capaian sebesar 84.09%.

formulasi penghitungan Ijazah tertinggi yang dimiliki + kelas yang sedang diduduki)-

1. Indikator Tingkat melek huruf pemuda, 96,12%. Formulasi jumlah pemuda melek huruf yang bisa baca tulis, dibagi jumlah seluruh pemuda dikali 100.

**b. Partisipasi Pemuda**

Capaian Indikator Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemasyarakatan 4.55%.

formulasi penghitungan Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi

kepemudaan/kemasyarakatan, dibagi jumlah penduduk yang aktif dalam organisasi kepemudaan/kemasyarakatan.

**c. Domain Kesehatan**

Capaian Indikator Persentase kaum muda dengan pengetahuan komperhensif tentang HIV/AIDS 15.26% formulasi penghitungan

Jumlah pemuda yang memiliki pengetahuan tentang HIV/ AIDS, dibagi jumlah penduduk pemuda, dikali 100.

**d. Domain Ketenagakerjaan**

Capaian Indikator Tingkat Pengangguran terbuka pemuda umur 16 s.d 30 Tahun 33.11% formulasi penghitungan Jumlah pegangguran terbuka pemuda, menurut jenis kelamin ,dibagi jumlah penduduk angkatan kerja, dikali 100.

**Tabel . 3.64**  
**Total persentase dari masing-masing Domain**

D1	D2	D3	D4	Jumlah
180,21	4,35	33,11	15,26	232,93

Rumus menghitung Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)  
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)=

jumlah total indikator/ jumlah domain  
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) =

232,93,20 / 4

= 58.23 %

Target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 63,00%. Indikator, realisasi dan capaian perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 58.23% diperoleh dari jumlah total indikator dibagi dengan jumlah domain. Sehingga Tingkatan Status Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2022 yaitu menengah bawah  $50 \leq IPP < 66$ .

#### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pengukuran efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Jika disandingkan dengan capaian indikator kinerja maka efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada

capaian penggunaan sumber daya. Rincian efisiensi untuk mencapai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang ditargetkan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.65.  
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2024	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	170.471.000	153.610.000	250 Peserta	150 Peserta	100%	100%	Terhadap sumber daya ada seperti anggaran, waktu, tenaga dan sarana pada pelaksanaan kegiatan selaras sehingga dapat mencapai tujuan (Goal) dan mendapatkan suatu hasil yang lebih maksimal dengan menghemat biaya, tenaga, atau pun waktu.

ii. Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah.

Pada sasaran ini terdapat indikator **“Rasio Sumber Daya Manusia Kebudayaan Berprestasi”** yaitu suatu potensi yang memiliki rasio, rasa dan karsa. Potensi tersebut sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan yang berprestasi. Dapat dilihat bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran, diperoleh gambaran indikator rasio Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan berprestasi serta Kreativitas Seni dan Budaya putra/i Kabupaten Karimun dengan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan yaitu dari indikator yang ditargetkan sebesar 30,00

% memperoleh realisasi 52,50%. Realisasi ini merupakan hasil dari jumlah 21 prestasi yang diraih dibagi dengan 40 sanggar yang berada di kabupaten karimun. Hal ini menunjukkan bahwa rasio SDM kebudayaan berprestasi mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian yang diperoleh sebesar 175,00%, untuk Penghargaan/prestasi putra/i Kabupaten Karimun pada Tahun 2024, untuk Penghargaan/prestasi putra/i Kabupaten Karimun pada Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.66  
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi	30,0 %	37,50 %	125,00 %
Rata-Rata Tingkat Capaian					125.00%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karimun, Tahun 2024

Adapun prestasi yang telah diraih pada tahun pada tahun 2020 sampai dengan pada 2024 sebanyak 21 prestasi. Berikut merupakan tabel data prestasi / penghargaan pelaku budaya Kabupaten Karimun.

Tabel 3.67

Data Prestasi/Penghargaan Pelaku Budaya Kabupaten Karimun

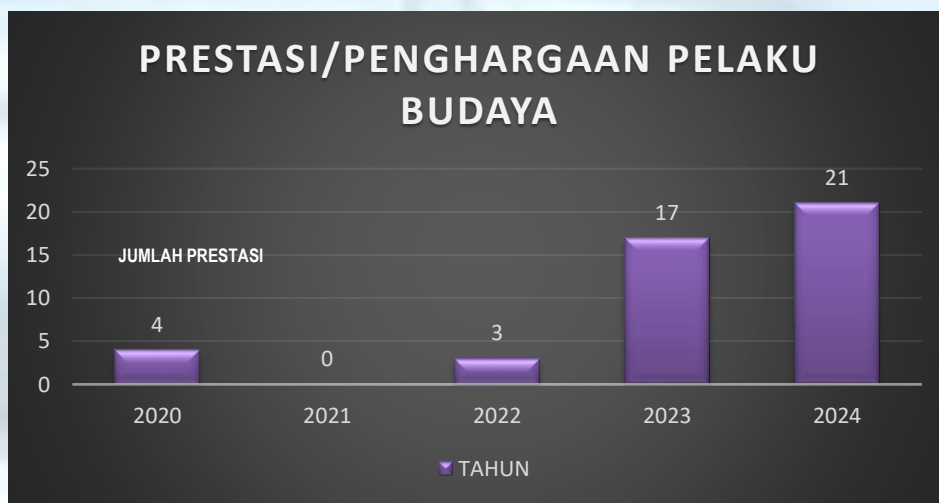
NO	TAHUN	JUMLAH PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN
1	2020	4	Penyaji terbaik 1 pada Pesta Konvokesyne ke- 25
			Penari Tari terbaik pada Pesta Konvokesyne ke- 25
			Penari lelaki terbaik pada Pesta Konvokesyne ke- 25
			Penari Wanita terbaik pada Pesta Konvokesyne ke- 25
2	2022	3	Juara 1 tingkat Provinsi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama
			Juara 1 Kepri Festival Kepri Berkompang tingkat Provinsi Kepulauan Riau
			Penggagas penetapan bermulanya penadbiran (pemerintahan) kabupaten Karimun.
			Juara 1 tingkat Provinsi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat nasional jenjang Sekolah Menengah Pertama
3	2023	17	Festival dan lomba seni siswa nasional ( FLS2N) Tingkat Nasional Jenjang SMP
			Penetapan 7 Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dan penetapan 1 WBTb Indonesia.
			8 Penerima penghargaan kegiatan Pantun, Seniman, Pemerhati Budaya, Pemerhati Sejarah dan Seniman Tradisi pada HUT Kabupaten Karimun ke 24 Tahun 2023
4	2024	21	Festival dan lomba seni siswa nasional ( FLS2N) Tingkat Nasional Jenjang SMP
			Penetapan 7 Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
			Penetapan 1 WBTb Indonesia
			Penerima penghargaan pada kegiatan Pantun, Seniman, Pemerhati Budaya, Pemerhati Sejarah dan Seniman Tradisi pada HUT Kabupaten Karimun ke 24
			Penghargaan Kebudayaan Prov. Kepulauan Riau Kategori Pelestari dan/atau Pelaku Seni Musik Kabupaten Karimun An. Loni Jaya Putra
			Juara 2 Tari Kreasi Tingkat Nasional di ajang FLS2N Thn 2024 di Jakarta
			Juara 3 nasional Tari Kreasi Tingkat Nasional di ajang FLS2N THN 2024 di Jakarta
Penetapan "Gasing Berembang" sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Tahun 2024			

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karimun, 2025

Adapun beberapa karya seni dan budaya putra/putri dari Kabupaten Karimun pada tahun 2024 yaitu Festival dan lomba seni siswa nasional ( FLS2N) Tingkat Nasional Jenjang SMP, Penetapan 7 Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, penetapan 1 WBTb Indonesia, 8 Penerima penghargaan kegiatan Pantun, Seniman, Pemerhati Budaya, Pemerhati Sejarah dan Seniman Tradisi pada HUT Kabupaten Karimun ke 24, Penghargaan Kebudayaan Prov. Kepulauan Riau Kategori Pelestari

dan/atau Pelaku Seni Musik Kabupaten Karimun An. Loni Jaya Putra, Juara 2 Tari Kreasi Tingkat Nasional di ajang FLS2N Thn 2024 di Jakarta, Juara 3 nasional Tari Kreasi Tingkat Nasional di ajang FLS2N THN 2024 di Jakarta, dan Penetapan "Gasing Berembang" sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Tahun 2024. Berikut merupakan grafik prestasi/ penghargaan pelaku budaya Kabupaten Karimun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Grafik 3.11  
Grafik prestasi/ penghargaan pelaku budaya Kabupaten Karimun



**Sumber :** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karimun, 2025

Dari grafik diatas dapat kita lihat hanya selama tahun 2021 tidak meraih prestasi atau penghargaan, hal tersebut dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan maupun lomba- lomba baik

ditingkat Provinsi hingga Nasional dikarenakan adanya Pandemi COVID-19. Setelah berlalunya pandemi COVID-19 yaitu pada tahun 2024 putra/putri dari Kabupaten Karimun kembali mengikuti

berbagai kegiatan maupun lomba sehingga mendapatkan 21 jenis prestasi dan penghargaan.

Program pendukung yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi dapat tercapai optimal, yaitu: Program Apresiasi dan Kreativitas Seni dan Budaya merupakan sasaran Meningkatnya

Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah (RPJMD) serta untuk mengetahui jumlah karya seni dan Penghargaan /Prestasi putra/putri daerah.

Perbandingan capaian kinerja sasaran (IKU) dengan kinerja keuangan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.68.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran (IKU)**  
**Dengan Kinerja Keuangan Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%
			Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	13,10 Tahun	12,62 Tahun	96,34	- Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 90.183.235.228	Rp 69.875.005.190	77.48%
		2. Rata – Rata Lama Sekolah	8,75 Tahun	8,91 Tahun	101,83	- Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 50.000.000 Rp 485.232.000	Rp 50.000.000 Rp 239.231.500	100% 49.30%
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	1. Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi	30 %	52,50 %	175,00	- Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 424.777.100	Rp 327.032.600	76.99%
						- Program Pengembangan Kesenian Tradisional - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 70.198.000	Rp 69.148.000	98.50%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Yang Mendukung Indikator Program Pengelolaan Anggaran Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.69.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Yang Mendukung Indikator Program Pengelolaan Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karimun**

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 215.924.905. 536	Rp 122.694.876.44 7	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	56.82% / 1 Laporan tepat waktu	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 518.345.633	Rp 366.427.919	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	70.69% / 1 Laporan tepat waktu	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 101.373.986	Rp 51.150.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	50.46% / 1 Laporan tepat waktu	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 44.864.551.. 300	Rp 44.256.163.575	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	98.64% / 1 Laporan tepat waktu	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 26.380.000	Rp 18.700.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	70.89% / 1 Laporan tepat waktu	

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.94.939.72 2	Rp 62.968.013	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	66.32% / 1 Laporan tepat waktu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 145.992.891	Rp 129.299.891	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	88.57% / 1 Laporan tepat waktu
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 50.701.789.0 01	Rp 49.227.104.222	91,37%	86,43%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	97.09% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 24.987.621.1 68	Rp 20.510.079.580	90,38%	86,80%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	82.08% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 6.202.028.17 9	Rp 5.646.472.065	54,55%	51,92%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	91.04% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp 1.632.787.73 8	Rp 1.354.804.800	60%	41,67%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	82.97% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp.10.626.00 0	Rp.9.031.000			100% Realisasi Fisik tepat waktu	84.99% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Rp.20.480.00 0	Rp.20.293.000			100% Realisasi Fisik	99.09% / 100% Realisasi

		Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal						tepat waktu	Fisik tepat waktu
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Rp 119.999.704	Rp 111.936.767	0.57%			100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	93.28% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ko a	Rp 120.531.812	Rp 49.391.113	35	10		100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	40.98% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Rp 1.338.753.406	Rp 1.172.027.923	8	4		100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	87.55% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu

		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 390.370.371	Rp 240.237.900	1	15	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	61.54% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 815.896.698	Rp 108.490.500	25	12	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	13.30% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 34.920.300	35	7	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	69.84% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu
2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 245.420.682. 404	Rp 242.375.141.59 6	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	98.76% / 1 Laporan tepat waktu
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 437.681.900	Rp 241.518.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	55.18% / 1 Laporan tepat waktu
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.048.121.00 0	Rp 377.993.900	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	36.06% / 1 Laporan tepat waktu

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 41.207.720.0 50	Rp 36.993.404.076	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	89.77% / 1 Laporan tepat waktu
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 240.631.000	Rp 206.979.400	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	86.02% / 1 Laporan tepat waktu
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 252.730.000	Rp 111.579.000	1 Laporan	1 Laporan	100% Laporan tepat waktu	44.15% / 1 Laporan tepat waktu
		Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 174.515.000	Rp 162.417.000	8 Dokume n	8 Dokume n	100% Dokume n tepat waktu	93.07% / 8 Dokume n tepat waktu
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 49.324.722.7 05	Rp 30.239.247.880	92,81%	87,86%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	61.31% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 31.359.282.0 00	Rp 30.470.510.333	92,31%	83,33%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	97.17% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 8.199.843.52 3	Rp 7.869.309.977	57,34%	52,26%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	95.97% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu

		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp 1.299.387.00 0	Rp 1.295.937.000	80,00%	38,46%	100% Realisasi Fisik tepat waktu	99.33% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal	Rp.50.000.00 0	Rp.50.000.000	40	167	100% Realisasi Fisik tepat waktu	100% / 100% Realisasi Fisik tepat waktu
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Rp 485.232.000	Rp 239.231.500	0,57%	9,16%	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	49.30% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Rp 224.777.100	Rp 158.122.600	37	27	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	70.35% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu

		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 0	Rp 0	9	7	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	0% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 200.000.000	Rp 168.910.000	1	15	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	84.46% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 70.198.000	Rp 69.148.000	27	22	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	98.50% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp 0	Rp 0	37	7	100% Realisasi Kegiatan tepat waktu	0% / 100% Realisasi Kegiatan tepat waktu

Efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022, dimana total anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 348.067.382.145 dengan realisasi anggaran mencapai 70,69% ,sedangkan untuk tahun 2022 total anggaran sebesar Rp 307.265.980.173.

dengan realisasi anggaran mencapai 97.29%. Melihat dari jumlah pagu anggaran yang tersedia, disimpulkan bahwa dari total pencapaian realisasi 2023 dapat dikatakan bahwa kurang efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan defisit anggaran.

Efisiensi penggunaan anggaran

pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023, dimana total anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 39.995.523.682 dengan realisasi anggaran mencapai 92,38% ,sedangkan untuk tahun 2023 total anggaran sebesar Rp 348.067.382.145 dengan realisasi anggaran mencapai

70,69%. Melihat dari jumlah pagu anggaran yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa dari total pencapaian realisasi 2024 lebih tinggi daripada tahun 2023 dan dapat dikatakan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya tercapai.

### iii. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan

hidup layak baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Sejalan dengan pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Karimun yaitu Menurunkan angka kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan sosial merupakan strategi yang harus dilakukan untuk tercapainya sasaran ke-12 yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2024. Adapun evaluasi pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.70  
Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase PPKS Mandiri	2,69 %	2,27 %	84,39 %
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN				84,39 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwacapaian sasaran mencapai 84,39 % atau bermakna baik sekali dalam menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun pada umumnya.

Indikator yang mendukung

$$\text{Persentase PPKS mandiri} = \frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang digraduasi dan Penyandang Disabilitas yang mandiri}}{\text{Jumlah keluarga yang masuk dalam DTKS}}$$

Capaian pengukuran kinerja ini diperoleh penerima manfaat yang digraduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako yang merupakan program dari Kementerian Sosial sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Graduasi merupakan berakhirnya masa kepesertaan PKH dan sembako karena penerima manfaat telah meningkat kesejahteraannya sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Kriteria DTKS meliputi : kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan,

sasaran ini adalah **Persentase PPKS Mandiri**.

Adapun target yang ditetapkan sebesar 2,69 persen atau sebanyak 891 keluarga PPKS yang mandiri dengan jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari 2023 sebanyak 33.182 Keluarga. Indikator Persentase PPKS mandiri dihitung dengan rumus sebagai berikut :

ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. DTKS dijadikan sebagai data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. DTKS ditetapkan setiap bulan oleh Menteri Sosial.

Berikut hasil analisis Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial” Tahun 2024 :

- **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Target Sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial” dengan indikator “Persentase PPKS yang Mandiri” Tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,69 persen.

Berdasarkan hasil pengukuran target kinerja, realisasi pencapaian adalah 2,27 persen. Dimana jumlah PPKS yang mandiri sampai dengan Tahun 2024

sebanyak 761 keluarga dengan jumlah DTKS sebanyak 33.495 Keluarga, dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.71**  
**Capaian Kinerja PPKS yang Mandiri**

No.	Kecamatan	Realisasi	
		2023	2024
1	Moro	60	64
2	Kundur	37	65
3	Karimun	33	33
4	Meral	32	32
5	Tebing	45	56
6	Buru	60	60
7	Kundur Utara	43	43
8	Kundur Barat	60	67
9	Durai	30	173
10	Meral Barat	48	48
11	Ungar	64	73
12	Belat	45	45
13	Selat Gelam	6	6
14	Sugie Besar	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>563</b>	<b>761</b>

**Tabel 3.72**  
**Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Karimun**

No.	Kecamatan	Realisasi	
		2023 (per Des)	2024 (per Des)
1	Moro	3,751	2,018
2	Kundur	3,524	3,505
3	Karimun	3,783	3,486
4	Meral	4,341	4,686
5	Tebing	2,662	3,056
6	Buru	2,962	2,810
7	Kundur Utara	1,393	1,405
8	Kundur Barat	3,373	3,412
9	Durai	1,589	1,465

10	Meral Barat	2,317	2,403
11	Ungar	769	778
12	Belat	1,844	1,753
13	Selat Gelam	603	1,029
14	Sugie Besar	259	1,689
	<b>J U M L A H</b>	<b>33,182</b>	<b>33,495</b>

Meskipun Pencapaian Tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan mengalami peningkatan PPKS yang mandiri. Dimana sampai dengan Tahun 2023, ada sebanyak 563 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial yang digraduasi. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian adalah :

1. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar pelaksanaan bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu.
2. Penguatan KPM PKH melalui Family Development Session (FDS) agar kualitas sumber daya manusia meningkat.
3. Peningkatan kapasitas pendamping sosial dalam pendampingan dan pembinaan KPM.

Dibandingkan dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022, realisasi PPKS yang

mandiri Tahun 2023 mengalami peningkatan. Dimana realisasi Tahun 2022 sebesar 1,40% dengan jumlah PPKS yang mandiri sebanyak 476 keluarga sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar 1,40% dengan jumlah PPKS yang mandiri sebanyak 476 keluarga, sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar 1,72% dengan jumlah PPKS yang mandiri sebanyak 563 keluarga. Walaupun demikian, capaian kinerja belum mencapai target. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini dikarenakan :

1. Adanya perluasan KPM PKH dan Program Sembako/BPNT dalam rangka pengendalian dampak inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak.
  2. *Mindset* penerima bantuan yang terbiasa mendapatkan bantuan sosial sehingga sulit untuk melepaskan bantuan tersebut.
  3. Masih kurangnya kompetensi penyuluh sosial dalam melakukan penyuluhan.
- **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun**

terakhir

Untuk mengukur progress pencapaian kinerja indikator ini dari tahun ke tahun maka perlu untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dibandingkan dengan Tahun 2021 sampai dengan 2023, realisasi PPKS yang mandiri Tahun 2024 mengalami peningkatan. Dimana realisasi Tahun 2023 sebesar 1,72% dengan jumlah PPKS yang mandiri sebanyak 563 keluarga, sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar 2,27% dengan jumlah PPKS yang mandiri

sebanyak 761 keluarga.

- **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Untuk mengukur progres pencapaian kinerja indikator ini juga perlu untuk membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target RPJMD Kabupaten Karimun yang ditetapkan untuk Tahun 2024 dan target akhir periode RPJMD Tahun 2026. Berikut disampaikan perbandingan kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah :

Tabel 3.73

Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tujuan	Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang Mandiri	2,27 %	2,69%	3,03%

Jika melihat perbandingan kinerja sampai dengan Tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026, maka realisasi kinerja belum mencapai target jangka menengah. Hal ini dikarenakan perluasan KPM PKH dan Program

Sembako/BPNT serta jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selalu mengalami perubahan.

- **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional tidak dilakukan dikarenakan

indikator kinerja “Persentase PPKS yang mandiri” tidak ada di level regional.

▪ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan serta upaya perbaikan kedepan**

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja diatas disimpulkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator ini belum dapat dikatakan berhasil karena realisasi kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan. Faktor penghambat dalam rangka pencapaian kinerja ini adalah :

1. Tantangan dalam mengubah pola pikir dan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjadi lebih mandiri;
2. Faktor ekonomi KPM;
3. Jumlah SDM Pendamping yang terbatas dapat menyebabkan pendampingan dan pembinaan KPM tidak optimal
4. Masih kurangnya dukungan dari aparatur kelurahan/desa.

Adapun upaya perbaikan kedepan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan adalah :

1. Penguatan pendampingan dan program pemberdayaan yang sistematis;
2. Ssinergi dengan pemangku kepentingan

untuk pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan;

3. Peningkatan kompetensi pendamping sosial dalam hal pelatihan dan sertifikasi;
4. Mengoptimalkan pendamping sosial yang terbatas guna meningkatkan pembinaan bagi KPM;
5. Melakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian Sasaran Strategis tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Jika disandingkan dengan capaian indikator kinerja maka efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Rincian analisis efisiensi sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.74

Analisis Efisiensi Sasaran 12

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90,069,038	51,677,513	93.703 Jiwa	89.904 Jiwa	46.84% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	44.55% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial
	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	149,999,681	68,232,116	165 Orang	167 Orang	4.64% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	5.13% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
2024	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	489,704,000	484,534,100	86.000 Jiwa	85.261 Jiwa	49.97% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	46.15% keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial
	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	342,959,600	212,226,400	227 Orang	138 Orang	6.93% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	6.08% penyandang disabilitas, anak, lansia dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Efisiensi penggunaan sumber daya (biaya) dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia dengan realisasinya, dimana dapat melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dilihat dari outcome, pencapaian realisasi

2024 lebih tinggi dari Tahun 2023. Upaya efisiensi sumber daya manusia dilakukan dengan beberapa upaya agar output yang diharapkan tercapai yaitu :

1. Melibatkan pilar-pilar sosial Pendamping PKH dan TSKK yang merupakan mitra kerja dalam fasilitasi penyaluran bantuan sosial

PKH dan BPNT, sehingga pelaksanaan bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya Keluarga Penerima Manfaat melalui penguatan Family Development Session (FDS) sehingga KPM lebih terampil mengatur prioritas penggunaan uang agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan, sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi;
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi penyaluran bantuan dengan pihak terkait (HIMBARA/PT. POS).

▪ **Analisis program/kegiatan yang**

iv. **Sasaran Strategis Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah.**

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik

**menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial” dilakukan melalui 2 (dua) Program antara lain Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial dengan total anggaran program pendukung sebesar Rp. 832.663.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 696.760.500,- atau 83,68% yang bermakna terjadi efisiensi anggaran sebesar 16,32%.

materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan Ketenagakerjaan pada saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat yaitu bagaimana membuka kesempatan kerja seluas-luasnya sehingga memungkinkan penduduk

memperoleh penghasilan yang baik dan penghidupan yang layak, seperti yang telah diamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, profesionalisme, daya saing dan kompetensi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang produktivitas.

Upaya memperluas lapangan kerja dan produktivitas merupakan kebijaksanaan yang harus ditempuh oleh pemerintah, sebagai jawaban bagi upaya mengatasi **pengangguran**. Seiring dengan itu juga perlu didorong oleh upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mendorong pemanfaatan ilmudenetahuan dan teknologi sekaligus meningkatkan pendapatan maupun produktivitas.

Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan pada peningkatan kemandirian, kewirausahaan, etos kerja dan disiplin, produktivitas, kemampuan belajar, kapasitas dan keberdayaan tenaga kerja sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan berusaha, baik di dalam maupun diluar negeri.

Untuk itu perlu didukung dengan upaya keterpaduan kebijakan termasuk didalamnya pendidikan dan pelatihan bagi angkatan kerja.

Pembangunan Ketenagakerjaan pada saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat yaitu bagaimana membuka kesempatan kerja seluas-luasnya sehingga memungkinkan penduduk memperoleh penghasilan yang baik dan penghidupan yang layak, seperti yang telah diamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya menyeluruh dan terpadu diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, profesionalisme, daya saing dan kompetensi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang produktivitas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2023 menetapkan Sasaran yakni : **Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja di Daerah** dengan indikator **“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”**. Adapun capaian dari indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.61 berikut ini :

Tabel 3.75

Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.00	5.52	92,00	Penghitungan Capaian : target [kali] 2 [dikurang] realisasi [dibagi] target [dikali] 100 persen

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2025

Perolehan realisasi tabel diatas bahwa jumlah pengguran terbuka sebanyak 7.414 orang, sementara jumlah angkatan kerja

sebanyak 134.383 orang, maka terealisasi sebesar 5,52 persen, atau sebagaimana rumus :

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% = \frac{7.414}{134.383} \times 100\% = 5,52\%$$

Perolehan persentase tersebut diatas

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.76

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Kabupaten Karimun Agustus 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	100.977	95.932	196.909
I. Angkatan Kerja	83.847	50.536	134.383
1. Bekerja	79.211	47.758	126.969
2. Pengangguran Terbuka	4.636	2.778	7.414
II. Bukan Angkatan Kerja	17.130	45.396	62.526
1. Sekolah			
2. Mengurus Rumah tangga			
3. Lainnya			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,53	5,50	5,52

Sumber : BPS Kabupaten Karimun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun lalu

(base line) sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.77.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun lalu (baseline)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2022	2023		2024	
				Realisasi	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,87	6,02	108,79	5,52	122,25

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2025

Pada tabel diatas bahwa pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terealisasi sebesar 6,87 persen, dan terus mengalami penurunan di tahun 2023

sebesar 6,87 persen dan tahun 2024 sebesar 5,52 persen, atau bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.12.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021-2023



Sumber : BPS Kabupaten Karimun 2024

Pada gambar diatas dari tahun 2022 sampai tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka terus menurun, ini menunjukkan perkembangan penurunan pengangguran di Kabupaten Karimun semakin membaik .

Analisa Keberhasilan

Keberhasilan untuk menurunkan pengangguran terbuka diantaranya

peningkatan SDM seperti pelatihan berbasis kompetensi yang bertujuan meningkatkan skill, serta mendorong pelayanan dan penempatan pencari kerja, pelayanan informasi lowongan kerja, pelatihan dan pembekalan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, sinergitas dan kerjasama dengan berbagai stakeholder dan

perusahaan, nasional maupun luar negeri.

### Solusi

Perlunya meningkatkan investasi baik dalam negeri maupun investasi asing, guna menunjang dan mempercepat pertumbuhan lapangan kerja, selanjutnya, perlu juga meningkatkan dan memfokuskan

belanja untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak pada penurunan jumlah pengangguran.

### Target Perjanjian Kinerja dengan Target RPJMD

Untuk Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan target di RPJMD Tahun 2024 sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.78

Target Perjanjian Kinerja dengan Target di RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
				PK	RPJMD
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,10	7,10

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2025

Sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja diatas bahwa target di RPJMD sebesar 7,10 persen di revisi menjadi sebesar 7,10 persen.

### Target Perjanjian Kinerja dengan Target

Tabel 3.79

Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerin (PKP) Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	PK		Target PKP	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,60	6,02	5,3 – 6,0	5,45

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2025

Pada tabel diatas bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebesar 7,10 persen dan terealisasi sebesar 5,52 persen, sementara pada Perjanjian Kinerja Pemerintah (PKP) Tahun 2024 target sebesar 5,0 - 5,7 persen, dan terealisasi sebesar 4,91 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa pada tingkat nasional maupun di Kabupaten Karimun tingkat pengangguran terbuka terjadi penurunan.

Sasaran strategis tersebut diatas didukung oleh Program dan Kegiatan dengan anggaran serta realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.80

Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Sasaran Strategis				
Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah				
No	Progrm	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Anggaran (%)
1	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.595.215.200	1.438.521.024	90,18
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	123.654.000	122.063.923	98,71
3	Program Hubungan Industrial	408.080.520	365.586.576	89,59
<b>TOTAL</b>		<b>2.126.949.720</b>	<b>1.926.171.523</b>	<b>90.56</b>

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2025

Realisasi Program Pendukung Sasaran Strategis tersebut diatas sebesar 1.926.171.523 dari target yang dianggarkan sebesar 2.126.949.970 dengan persentase Anggaran sebesar 90,56 persen.

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Penggunaan Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dapat kami sajikan sebagaimana tabel 3.73 berikut :



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
							100%	100%	<p>membuka lowongan pekerjaan juga data BPS menunjukkan ada penurunan tingkat pengangguran terbuka antara tahun 2022 dan 2023.</p> <p>4. Untuk kegiatan penerbitan IMTA yang bertujuan untuk menambah retribusi daerah sehingga efisiensi sumber daya untuk tahun 2023 lebih besar dibanding tahun 2022 dengan anggaran yang diperoleh dari data-data TKA.</p> <p>Untuk Program Hubungan Industrial terdapat 2 kegiatan dan pada tahun 2023 lebih besar efisiensi sumber daya dibanding pada tahun 2022 karena dengan anggaran kecil tapi bisa menaikkan persentase realisasi outcomenya yakni sebesar 33,33%</p>
2023	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,445,100,249,-	1,267,690,409,-	119 Orang Peserta	109 Orang Peserta	30 Persen Besarannya Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	49,32 persen Jumlah peserta yg ikut pelatihan 109 orang [dibagi] jlh yg mendaftar 221 orang [dikali] 100 persen	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	49,000,000,-	40,861,623,-	1 Laporan	1 Laporan	45 Persen Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas	40 Persen Jumlah Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan Produktivitas 16 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan 40 Perusahaan [dikali] 100 persen	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	244,999,508	240,267,090	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Wirausaha	100 Persen Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis wirausaha baru (TKM,TTG) 60 orang [dibagi] Jumlah yang mendaftar pelatihan berbasis wirausahabaru (TKM,TTG) 60 Orang [dikali] 100 persen	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	51,199,357,-	40,260,139,-	1 Laporan	1 Laporan	150 Jumlah Lowongan yang tersedia	215 Jumlah Lowongan yang tersedia	
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	51,188,367	41,717,183	1 Laporan	1 Laporan	150 Orang Izin perpanjangan TKA	102 Orang Izin perpanjangan TKA	
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi	321,249,665	185,907,513	1 Laporan	1 Laporan	35,22% 1. persentase perusahaan yang telah memiliki PP	33,33% 1. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 47 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 141	

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota					Perusahaan [dikali] 100 persen		
							95% 2. Persentase perusahaan yg telah menyusun struktur skala upah	137,04% 2. Jumlah Perusahaan yang sudah menyusun Struktur Skala Upah : 74 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB) : 5 4 Perusahaan [dikali] 100 persen	
							100 % 3. Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	100% 3. Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen	
2024	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan UnitKompetensi	1,587,223,000	1,434,806,131	136 Orang Peserta	136 Orang Peserta	11.50 % Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	10, 57 % Jumlah peserta yg ikut pelatihan 136 orang [dibagi] jlh yg mendaftar 1.287 orang [dikali] 100 persen	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	7,992,200	3,714,893-	1 Laporan	1 Laporan	42 % Persentase perusahaan yang menerapkan prog peningkatan produktivitas	47,06 % Jumlah Perusahaan yg menerapkan Prog Peningkatan Produktivitas 16 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan 40 Perusahaan {dikali} 100 persen	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	103,900,000-	102,324,923	1 Dokumen	1 Dokumen	100 % Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Wirausaha	0 Efisiensi Anggaran	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10,332,000	10,317,000	1 Laporan	1 Laporan	250 Jumlah jabatan/posisi lowongan kerja yang dipublikasikan	308 Jumlah jabatan/posisi lowongan kerja yang dipublikasikan	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	9,422,000	9,422,000	1 Laporan	1 Laporan	15 Jumlah CPMI yang dipekerjakan di Luar Negeri	15 Jumlah CPMI yang dipekerjakan di Luar Negeri	
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi	254,128,520,-	225,516,576	1 Laporan	1 Laporan	16 % Persentase perusahaan yang telah memiliki PP	14,88 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 32 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih :	

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota						215 Perusahaan [dikali] 100 persen	
							100 % Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	100 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	153,952,000,-	140,070,000,-	1 Laporan	1 Laporan	75 % Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	71,43 % (Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit [dibagi] Jumlah perselisihan yang tercatat [dikali] 100 persen)	
							1,75 % Persentase Perusahaan yang Berselisih	1,58 % (Jumlah perusahaan yang berselisih (9 Perusahaan) [dibagi] Jumlah Perusahaan Wajib Laport tahun 2022 (307 Perusahaan) [dikali] 100 Persen = 2,93 persen)	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	254,128,520,-	225,516,576	1 Laporan	1 Laporan	16 % Persentase perusahaan yang telah memiliki PP	14,88 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 32 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 215 Perusahaan [dikali] 100 persen	
							100 % Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	100 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	153,952,000,-	140,070,000,-	1 Laporan	1 Laporan	75 % Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	71,43 % (Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit [dibagi] Jumlah perselisihan yang tercatat [dikali] 100 persen)	
							1,75 % Persentase Perusahaan yang Berselisih	1,58 % (Jumlah perusahaan yang berselisih (9 Perusahaan) [dibagi] Jumlah Perusahaan Wajib Laport tahun 2022 (307 Perusahaan) [dikali] 100 Persen = 2,93 persen)	

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	254,128,520,-	225,516,576	1 Laporan	1 Laporan	16 % Persentase perusahaan yang telah memiliki PP	14,88 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP : 32 Perusahaan [dibagi] Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih : 215 Perusahaan [dikali] 100 persen	
							100 % Persentase perusahaan telah memiliki PKB.	100 % Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n : 6 Perusahaan [dibagi] jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB : 6 Perusahaan [dikali] 100 persen	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	153,952,000,-	140,070,000,-	1 Laporan	1 Laporan	75 % Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	71,43 % (Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit [dibagi] Jumlah perselisihan yang tercatat [dikali] 100 persen)	
							1,75 % Persentase Perusahaan yang Berselisih	1,58 % (Jumlah perusahaan yang berselisih (9 Perusahaan) [dibagi] Jumlah Perusahaan Wajib Laport tahun 2022 (307 Perusahaan) [dikali] 100 Persen = 2,93 persen	
<b>Total 2024</b>			<b>9.750.188.866</b>	<b>8.503.834.886</b>					

**Sumber :** Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2025

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui 3(tiga) program yakni :

1. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja :  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sdm tenaga kerja yang berkualitas dengan memiliki keahlian sertifikat yang berkompetensi sehingga siap bersaing di pasar kerja serta kepemilikan sertifikat tersebut maka produktivitas pada perusahaan tersebut

akan meningkat.

2. Program Penempatan Tenga Kerja :  
Program ini bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi atau yang sesuai dengan keahlian /lowongan yang di buka oleh perusahaan-perusahaan, dengan dibukanya lowongan pekerjaan oleh perusahaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, para pencari akan mengikuti

kesempatan kerja pada perusahaan tersebut.

3. Program Hubungan Industrial :  
Program ini bertujuan menjalin hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dengan memberikan

v. **Sasaran Strategis Meningkatkan Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup.**

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan

bimbingan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, dengan demikian kasus-kasus perselisihan tidak begitu berdampak sehingga keadaan pada perusahaan tersebut tetap kondusif.

masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan

kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam rangka pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap:

- a) para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup,
- b) masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
- c) kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- d) kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,

- e) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- f) memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan,
- g) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup,
- h) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat, dan
- i) memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan 2 (dua) indikator kinerjautama yang menjadi fokus dalam pelaksanaan arah kebijakan terhadap peningkatan pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup yaitu Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Adapun capaian dari indikator kinerja pada sasaran “Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup” tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.82.  
Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	69,58	70,35	101,10%
		- Indeks Kualitas Air (IKA)*	56,90	54,44	95,67%
		- Indeks Kualitas Udara (IKU)*	90,51	95,14	105,11%
		- Indeks Kualitas Lahan (IKL)*	52,62	51,83	98,49%
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup	2 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	25,94 Ha	25,40 Ha	97,92%
		3 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)*	60,00	45,01	75,02%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun 2024

Keterangan :

\*) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

\*\*\*) Indikator Kinerja Pendukung dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026

Gambaran capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2023 sebagaimana yang disajikan dalam Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Capaian kinerja pada tingkat Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air” dengan indikator kinerja ; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 101,10%, Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 95,67%, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah 105,11% dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah 98,49%
2. Capaian kinerja pada tingkat Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup” dengan indikator kinerja ; Luas Ruang Terbuka

Hijau (RTH) adalah 97,92%, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah 75,02%.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang

digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berpijak pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pada Pasal 25 Ayat 3 bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi; kebun raya, taman kehati, taman kota, hutan kota, taman hutan raya, sabuk hijau (green belt), median jalan, jalur dibawah

tegangan listrik, sempadan sungai, daerah penyangga, kebun binatang, arboretum, taman rekreasi dan pepohonan lainnya yang relevan. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

**Tabel 3.83**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Ha)	25,40	29,90	26,75	89,46%	38,45	69,57%

Target kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2024 berada pada nilai 29,90 Ha, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai pada nilai 26,75 Ha dan persentase capaian kinerjanya sebesar 89,46% dengan kriteria **“TINGGI”**. Pada tahun sebelumnya Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) berada pada nilai 25,40 Ha

sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya senilai 1,35 point. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RPJMD, Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) berada pada angka 38,45 Ha sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2024 adalah 26,75 Ha sehingga capaian kinerja yaitu 69,57%.

## SASARAN STRATEGIS 14 :

### Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

#### 1) LUAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAHUN 2024



#### Rumusan :

#### Jumlah Luasan RTH Terkelola

Gambaran infografis diatas menunjukkan bahwa Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari tahun 2024 masih kurang 0,54 Ha dari target yang ditetapkan sebesar 29,90 Ha atau setara dengan 2,18%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan penghijauan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta evaluasi dan validasi pendataan lahan yang semakin baik disamping penggunaan lahan untuk keperluan lainnya di Kabupaten Karimun, ditandai dengan banyaknya perumahan-perumahan yang terbangun dari proses perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama Tahun 2024.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Kinerja pengelolaan

sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Haryono (2004:41), untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran pengelolaan sampah dapat diukur dengan menghitung melalui:

- 1) Perbandingan antara keterangutan sampah dengan jumlah timbulan yang dihasilkan oleh suatu kota berdasarkan kondisi wilayah dan kepadatan penduduk;
- 2) Perbandingan antara daerah yang dilayani dengan luas daerah yang seharusnya dilayani;

3) Jumlah penduduk yang dilayani harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana, personil dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah.

Seiring dengan definisi sampah yang memiliki sifat membahayakan lingkungan, maka salah satu tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah mengelola sampah supaya tidak membahayakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana yang mengemban tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah. Dalam

rangka pemenuhan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan sebuah instrumen standar penilaian pengelolaan sampah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment) bagi daerah. Dengan adanya instrumen ini, maka hasil penilaian diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam upaya untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan nilai kinerja pengelolaan sampah.

Tabel 3.84

Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)  
Kabupaten Karimun Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	45,01	63,00	45,39	72,05%	66,00	68,77%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karimun Tahun 2024

Target kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada tahun 2024 berada pada nilai 63,00, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai pada nilai 45,39 dan persentase capaian kinerjanya sebesar 72,05% dengan kriteria “**SEDANG**”. Pada tahun sebelumnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) berada pada nilai 45,01

sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai 0,38 point. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) berada pada angka 66,00 sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2024 adalah 45,39 sehingga capaian kinerja yaitu 68,77%.

## SASARAN STRATEGIS 14 :

### Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup

#### 2) INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS) 2024



#### Rumusan :

Jumlah Indeks Pengelolaan + Indeks Efektivitas dan Efisiensi

Indikator kinerja pendukung dalam melakukan analisis perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah capaian volume penanganan dan pengurangan sampah. Target kinerja capaian penanganan sampah pada tahun 2024 berada pada nilai 72,05%, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai pada nilai 45,39% dan dengan kriteria "RENDAH". Pada tahun sebelumnya capaian penanganan sampah berada pada nilai 72,05% sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai 0,38 point. Selanjutnya target kinerja capaian pengurangan sampah pada tahun 2023 berada pada nilai 27,00%, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai pada nilai 14,83% dan persentase capaian kinerjanya sebesar 54,93% dengan kriteria "RENDAH". Pada tahun sebelumnya capaian pengurangan sampah berada pada nilai 21,05 sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai 6,22 point.

Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA, capaian penanganan dan pengurangan sampah belum dilakukan penetapan, sehingga perlu dilakukan revisi perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026, disamping itu capaian pengelolaan dan pembatasan sampah juga perlu ditetapkan dalam perubahan RENSTRA yang akan datang.

Tabel 3.85

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya/Anggaran Terhadap Sasaran Strategis  
“Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024”

Tahun	Program	Indikator	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	target	realisasi	target	realisasi	
2024	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas Keanekaragaman Hayati	4.016.892.529,-	3.576.759.962,-	40 Lokasi	34 Lokasi	9,3 Ha	6,3 Ha	Efisiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 40 lokasi hanya 34 lokasi yang terealisasi. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 6,3 Ha dengan realisasinya hanya 3 Ha pada pelaksanaannya belum optimal, karena belum adanyapenetapan terkait RTH yang akan di kelola.
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Lingkungan	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan,	23.383.000,-	9.019.000,-	16 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	85%	75%	Efisiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 16 Pelaku Usaha/ Kegiatan/ Perusahaan dengan

	<b>Hidup (PPLH)</b>	<i>izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</i>							realisasinya 12 Pelaku Usaha/ Kegiatan/ Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan LH dan tepat waktu. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 85% dengan realisasinya 75% bahwa pelaksanaan efisiensi program belum optimal.
	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<i>Persentase Pengurangan Sampah Persentase Penanganan Sampah</i>	11.989.531.499, -	10.113.508.438, -	17.200 Ton  44.800 Ton	14.194,43 Ton  50.607,25 Ton	28%  71%	12,44%  45,33%	Efisiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 17.200 Ton untuk pengurangan sampah dan 44.800 Ton untuk penanganan sampah, dengan realisasinya pengurangan sampah sebanyak 2.139,68 Ton dan Penanganan Sampah sebanyak 20.307,84 Ton. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 28% pengurangan sampah dan 71% penanganan sampah dengan realisasinya 12,44% untuk pelaksanaan pengurangan sampah dan

									45,33% untuk pencapaian penanganan sampah, capaian efisiensi masih belum optimal.
	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<i>Jumlah Piagam Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan Kepada Masyarakat</i>	84.056.000,-	64.210.200,-	1 Laporan	1 Laporan	70	63	Efisiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 1 laporan dengan realisasi pencapaian output 1 lapora untuk dalam 1 dokumen tindak lanjut pelaporan. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan sebanyak 70 dengan realisasinya hanya 63 piagam penghargaan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga belum optimalnya efisiensi program dengan minimnya ketersediaan anggaran.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karimun Tahun 2024

## ANALISIS

## PENYEBAB

### KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dalam pemenuhan sasaran tersebut selama Tahun 2024, beberapa gambaran isu-isu strategis penting berupa kelemahan, tantangan, kekuatan dan peluang yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut yang menyebabkan kegagalan, keberhasilan dan alternative solusi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024. dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### Analisis Faktor Penyebab Kegagalan terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan

Secara umum dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama tahun 2024, terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan/permasalahan masih dijumpai yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Beberapa lokasi di sekitar taman digunakan sebagai tempat berjualan dan kurangnya ketertiban serta kedisiplinan tenaga pemelihara dalam bekerja, selain itu keterbatasan armada (*crane*) untuk menjangkau pohon-pohon tinggi.
2. Terbatasnya jumlah tenaga pemelihara RTHP dan taman seiring dengan meningkatnya jumlah dan luasan RTH

Publik yang terbangun dan tajuk pohon perindang setiap tahunnya sehingga pemeliharaan kurang maksimal, disamping itu minimnya kesadaran pengunjung untuk ikut menjaga kebersihan dan keindahan RTH Publik.

3. Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
4. Fasilitas penanganan dan pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih serta dukungan anggaran yang kurang memadai.
5. Ketergantungan atas kondisi TPA Sememal karena tidak ada alternatif lain sebagai lokasi pembuangan sampah, disamping itu sarana dan prasarana pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai.

6. Penurunan motivasi dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R dan masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengelola sampah dengan cara yang benar, seperti dilakukannya pemilahan sampah sesuai jenisnya.

#### **Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Faktor penyebab keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan yang bersifat kecil seperti pembersihan di RTH Publik Permukiman dan adanya pengajuan usulan dari warga sekitar untuk melakukan renovasi RTH Publik serta optimalisasi fungsi RTH Publik berupa fungsi ekologis dan sosial.
2. Melaksanakan pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau selama 12 bulan dan pemeliharaan taman dan pohon perindang jalur hijau serta penyulaman tanaman semusim yang dilakukan secara berkala
3. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah yang tersebar di setiap kelurahan cukup berperan dalam rangka

pengurangan sampah.

4. Mengoptimalkan kinerja fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dengan menambah sarana dan prasarana serta tenaga pengelola yang telah terlatih serta pengembangan rumah kompos di beberapa titik setiap kelurahan, sehingga sesuai pengembangannya nanti, kapasitasnya akan bertambah dua kali lipatnya.
  5. Kapasitas Jumlah armada pada pengangkutan sampah masih mampu untuk melakukan penanganan dan pengangkutan sampah di setiap TPS/kontainer.
  6. Seluruh wilayah di Pulau Karimun mendapatkan layanan kebersihan, seperti pengangkutan sampah dan terdapat Fasilitas Pendaaurulangan di Kabupaten Karimun yaitu Bank Sampah Induk Al-Barokah dan Rumah Kompos.
- #### **Analisis Rencana Tindak Lanjut/Solusi terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2023, maka dapat disusun rencana tindak lanjut/solusi dari faktor-faktor tersebut, sehingga dapat dijadikan rekomendasi dalam pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.

Rencana tindak lanjut/solusi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembinaan, pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli penyelamatan sumber daya air.
2. Merubah cara pandang/*mindset* masyarakat terhadap sampah (penyadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengelola setiap sampah yang dihasilkan) dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan pemberian informasi dengan menyebarkan spanduk, reklame dan pamphlet/brosur kepada masyarakat.
3. Pembinaan dengan melakukan kegiatan penguatan kelembagaan kelompok pengelola sampah di setiap

desa/kelurahan dan peningkatan peran kelompok masyarakat dalam penanganan sampah.

4. Penguatan sinergitas antar pemangku wilayah dalam pengelolaan lingkungan.
5. Menambah luasan hutan kota, median jalan dan taman kota.

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain sebagai berikut :

1. Sinergitas pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup dengan stakeholder terkait.
2. Pemberian reward pada pelaku usaha/kegiatan/ stakeholder/ masyarakat dalam peran sertanya terhadap pengelolaan lingkungan
3. Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Karimun.
4. Penyusunan regulasi perlindungan lahan dan tanaman penghijauan khususnya penebangan dan pemangkasan pohon.

5. Penguatan peran kecamatan, kelurahan dan desa dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD).

Profil Indeks Respon diperoleh dari inventarisasi respon Pemerintah Daerah dalam mencapai target Kualitas Lingkungan Hidup melalui Program Langit Biru, Program Kali Bersih, Program Indonesia Hijau, Program Gambut Lestari dan Program Pantai Lestari. Inventarisasi respon Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan aspek manajemen, meliputi kebijakan dan peraturan, sumber daya manusia dan perencanaan perbaikan kualitas lingkungan, serta aspek teknis, meliputi implementasi kegiatan, pelibatan pemangku kepentingan, publikasi dan inovasi. Berdasarkan hasil analisis indeks respon tersebut, rata-rata alokasi anggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sekitar 0.01% - 1.19% dari APBD.

Penyusunan nilai Kualitas Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai Kualitas

Lingkungan Hidup digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang menjadi fokus dalam pelaksanaan arah kebijakan terhadap peningkatan kualitas udara, tanah dan air yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Adapun capaian dari indikator kinerja pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air" tahun 2024 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.86

Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	96,83	56,90	54,44	95,68%
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	102,92	93,10	95,14	102,19%
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	102,83	52,58	51,83	98,57%
<b>Re-rata Capaian</b>		<b>100,86</b>			<b>98,81%</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun 2024

Capaian kinerja tahun 2024 pada umumnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023. Penurunan terjadi pada semua indikator kinerja, dimana Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu dari 96,83% menjadi 95,68%, Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu dari 102,92% menjadi 102,19% dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu dari 102,83% menjadi 98,81%.

Target Indeks Kualitas Air (IKA) yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar 56,90, dengan realisasi sebesar 54,44 atau tercapai sebesar 95,68% dan skala nilai peringkat kinerja pada klasifikasi **Tinggi**, capaian kinerja ini juga mengalami penurunan lebih rendah 5,00 point dibandingkan dengan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2024 dengan nilai 50,00,. Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 93,10, realisasi sebesar 95,14 tercapai 102,19% atau skala nilai peringkat

kinerja pada klasifikasi **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,62 point dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara pada tahun sebelumnya sebesar 94,19. Untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 50,58 dengan realisasi sebesar 92,01 atau tercapai sebesar 102,83% atau skala nilai peringkat kinerja pada klasifikasi **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2022 tercapai 45,01, maka Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 7,00 point.

Penyebab terjadinya penurunan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah :

- 1) Menurunnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan belum mencapai target dan masih dibawah target nasional, disebabkan oleh :
  - Kenaikan nilai parameter BOD, COD dan

pH yang cukup drastis karena banyak warga yang masih melakukan aktivitas pembuangan limbah domestik (*detergent* dan sisa makanan).

- Masih banyak saluran limbah domestik yang langsung dialirkan ke danau tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.
- Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat dan kebiasaan masyarakat di era pandemic covid dalam penggunaan sabun/*detergen* untuk mandi dan cuci.

2) Menurunnya nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) karena :

- Hal ini disebabkan semakin meningkatnya penggunaan lahan untuk keperluan lainnya di Kabupaten Karimun, ditandai dengan banyaknya perumahan-perumahan yang terbangun dari proses perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun selama Tahun 2023. Disamping itu peningkatan ruas jalan dan bangunan yang memungkinkan semakin sempitnya ruang hijau disetiap kawasan.

### SASARAN STRATEGIS 15 :

#### Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air

##### 1) INDEKS KUALITAS AIR (IKA) 2024



**Rumusan :**  
Jumlah Nilai Indeks Mutu Air (PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021)

Telaah mendalam pada hasil ini menggambarkan bahwa kondisi kualitas air danau di Kabupaten Karimun masih lumayan memadai bahkan cenderung lebih baik dari kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau. Ketersediaan vegetasi terutama pada bagian *inlet* danau menjadi salah satu kunci tercapainya kondisi tersebut mengingat

vegetasi dapat pula berperan sebagai filter bagi air yang meresap ke dalam tanah. Nilai tersebut memberikan pula peringatan bahwa kondisi ini akan terancam oleh pencemaran dari peningkatan beragam aktivitas antropogenik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu; Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 37,6 %, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 40,5 % dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan bobot 21,9 %. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.



Pengambilan, penanganan dan pengujian kualitas sampel air danau urusan Lingkungan Hidup dilakukan 1 (satu) kali di tahun 2024 yaitu pada Bulan Maret Tahun 2024. Bulan Juni mewakili musim kemarau dan bulan Oktober mewakili musim penghujan. Air danau yang diambil sampelnya adalah danau-danau yang dijadikan sebagai sumber air baku Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Karimun yaitu Danau/Embung Bati, Danau Pongkar dan Danau Sentani. Jumlah titik pantau/titik pengambilan sampel terdapat 3 titik dari masing-masing danau (*Intake, Inlet* dan *Outlet*).

Data hasil pengujian kualitas air pada segmen (*intake, inlet* dan *outlet*) di setiap danau yang dijadikan lokasi pemantauan, selanjutnya ditabulasikan, dihitung dan dianalisis dengan maksud untuk memperoleh nilai indeks pencemaran (*PIj*). Hasil perhitungan Indeks Pencemaran (*PIj*) Air setiap danau di Kabupaten Karimun selama Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.87

Hasil Analisis Indeks Pencemaran (Pij) Air Tahun 2024

No	Nama Danau	Waktu Sampling	Titik Sampling	Titik Koordinat	Indeks Pencemaran (Pij)	Status Mutu Air	
1	Danau Bati	21 Maret 2024	Intake	N :	1.04518	2.55	Cemar Ringan
				E :	103.38227		
			Inlet	N :	1.04435	2.77	Cemar Ringan
				E :	103.38125		
			Outlet	N :	1.04726	2.54	Cemar Ringan
				E :	103.38286		
2	Danau Pongkar	21 Maret 2024	Intake	N :	1.07784	0.81	Memenuhi
				E :	103.37923		
			Inlet	N :	1.08026	1.03	Cemar Ringan
				E :	103.37693		
			Outlet	N :	1.07952	0.86	Memenuhi
				E :	103.37946		
3	Danau Sentani	21 Maret 2024	Intake	N :	1.02511	1.83	Cemar Ringan
				E :	103.39616		
			Inlet	N :	1.02503	2.97	Cemar Ringan
				E :	103.39524		
			Outlet	N :	1.0247	2.57	Cemar Ringan
				E :	103.39698		

Sumber : Hasil Analisis Indeks Pencemaran (Pij) DLH Kab. Karimun Tahun 2024

Dari hasil tabulasi Indeks Pencemaran (Pij) Air pada segmen (*intake*, *inlet* dan *outlet*) setiap danau yang dijadikan lokasi pemantauan di Kabupaten Karimun selanjutnya dikonversikan dengan faktor

perkalian antara persentase pemenuhan mutu air dan bobot indek untuk perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA). Hasil analisis dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.88

Hasil Analisis Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Karimun Tahun 2024

Standar Mutu Air	Jlh Titik Sampling	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Mutu Air
Memenuhi Baku Mutu	2	22.22%	70	15.56
Tercemar Ringan	7	77.78%	50	38.89
Tercemar Sedang	0	0.00%	30	0.00

Tercemar Berat	0	0.00%	10	0.00
<b>Jumlah Total</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>		<b>54.44</b>
<b>Indeks Kualitas Air (IKA) Kab. Karimun Tahun 2024</b>				

Sumber : Hasil Analisis Indeks Pencemaran (Plj) DLH Kab. Karimun Tahun 2024  
 Hasil analisis pengukuran capaian kinerja terkait Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Karimun Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.89

**Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Karimun Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Capaian s/d 2023 terhadap Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kualitas Air(IKA)	55.00	56,90	54,44	95.68%	56,90%	96,66%

Target kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 berada pada angka indeks 56,90, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 54,44 dan persentase capaian kinerjanya sebesar 95,68%, dengan kriteria **“TINGGI”**. Pada tahun sebelumnya Indeks Kualitas Air



(IKA) berada pada angka indeks 55,00, sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai 0,56 point. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karimun, Indeks Kualitas Air berada pada angka 54,44 sehingga capaian kinerja tahun ini masih di atas target akhir RPJMD Kabupaten Karimun dengan pencapaian 56,90 di atas capaian target akhir yaitu 95,67%.

Telaah mendalam pada hasil ini menggambarkan bahwa kondisi kualitas air danau di Kabupaten Karimun masih lumayan memadai bahkan cenderung lebih baik dari kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau. Ketersediaan vegetasi terutama pada bagian *inlet* danau menjadi salah satu kunci tercapainya kondisi tersebut mengingat vegetasi dapat pula berperan sebagai filter bagi air yang meresap ke dalam tanah. Nilai tersebut memberikan pula peringatan bahwa kondisi ini akan terancam oleh pencemaran dari peningkatan beragam aktivitas antropogenik.

Peningkatan pengelolaan terhadap pencemaran danau dari limbah



domestic dan sampah menjadi salah satu kunci perbaikan kualitas air. Pemerintah Kabupaten Karimun terus meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pembuangan limbah domestic dan industri ke badan air, termasuk dengan kewajiban pembangunan IPAL untuk kawasan perumahan. Hasil upaya tersebut tampak pada nilai fecal coliform yang rendah dan memenuhi baku mutu untuk keseluruhan segmen danau yang dievaluasi. Pada pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun terus meningkatkan jangkauan pelayanan melalui penambahan armada. Hal tersebut akan meminimalisasi



pembuangan sampah secara sembarangan termasuk ke badan air oleh masyarakat.

### SASARAN STRATEGIS 15 :

#### Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air

#### 2) INDEKS KUALITAS UDARA (IKU) 2024



#### Rumusan :

$$100 - (50/0.9 \times I_{eu} - 0.1)$$

Dengan hasil pemantauan NO2 dan SO2 paling tinggi di lokasi industri, kegiatan yang paling berkontribusi atas cemaran udara berasal dari perindustrian dan sektor transportasi. Secara fungsional, lokasi tersebut diperuntukan untuk kegiatan komersial dan perindustrian. Diperlukan pengawasan

dan pemantauan berkala untuk memastikan sektor-sektor terkait dapat memenuhi kriteria emisi. Sementara, dari sektor transportasi hendaknya dilakukan standarisasi kendaraan laik jalan yang harus dipenuhi berdasarkan kriteria baku mutu emisi gas buangan dari kendaraan.



Terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di tahun 2024 menjadi bahan evaluasi bagi Kabupaten Karimun untuk terus meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun-tahun berikutnya. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Karimun sudah melampaui target yang ditetapkan namun masih perlu adanya komitmen pada upaya-upaya pengendalian pencemaran udara

Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Karimun dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang didampingi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun dan dilaksanakan setiap tahun melalui kegiatan APBN dan APBD Kabupaten Karimun (pendampingan). Pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara melakukan pemasangan alat pemantauan kualitas udara (*passive*

dan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.

*sampler*) pada 4 (empat) lokasi yang telah ditetapkan yaitu kawasan perkantoran, perumahan/pemukiman, industri dan transportasi selama 14 hari, selanjutnya diambil dan dikirim kembali.

Data hasil tabulasi pemantauan kualitas udara di Kabupaten Karimun selama Tahun 2023, serta perhitungan dan analisis kualitas udara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.90

Hasil Perhitungan Kualitas Udara (Rata-rata Konsentrasi NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>) Tahun 2024

No	Klasifikasi Lokasi	Lokasi Sampling	Waktu Sampling	Koordinat		Kadar NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Kadar SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )
				X	Y		
1	Transportasi	Jln. Yos Sudarso, Perumahan Dinas Bupati Karimun	09– 23 Juli 2024	0.989194	103.436806	3.79	5.12
			03 – 17 September 2024			6.78	9.02
2	Industri	PT. SAIPEM, Jln R. Haji Fisabilillah Desa Pangke	09– 23 Juli 2024	1.046000	103.329222	4.08	7.25
			03 – 17 September 2024			6.60	7.14
3	Pemukiman	Jln. Paya Cincin, Kel. Teluk Uma, Kec. Tebing	09– 23 Juli 2024	1.038083	103.400222	1.98	2.65
			03 – 17 September 2024			1.65	2.90
4	Perkantoran	Komplek Perkantoran Poros, Jln. Jend. Sudirman	09– 23 Juli 2024	1.033277	103.376222	3.05	4.46
			03 – 17 September 2024			5.20	4.88
Rata-Rata Kadar NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub>						4.14	5.43

Sumber : Hasil Analisis Rata-rata Kadar NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> DLH Kab. Karimun Tahun 2024

Data perhitungannya rata-rata kadar

adalah Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dan



kinerja tahun ini masih diatas target akhir RPJMD Kabupaten Karimun dengan pencapaian 100,45% diatas capaian target

Dengan hasil pemantauan NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> paling tinggi di lokasi industri, kegiatan yang paling berkontribusi atas cemaran udara berasal dari perindustrian dan sektor transportasi. Secara fungsional, lokasi tersebut diperuntukan untuk kegiatan komersial dan perindustrian. Diperlukan pengawasan dan pemantauan berkala untuk memastikan sektor-sektor terkait dapat memenuhi kriteria emisi. Sementara, dari sektor transportasi hendaknya dilakukan standarisasi kendaraan laik jalan yang harus dipenuhi berdasarkan kriteria baku mutu emisi gas buangan dari kendaraan.

Data perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak hanya dibatasi pada luasan hutan namun akan meliputi Tutupan hutan yang terdiri dari hutran lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder (bekas terbangun), hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman Tutupan belukar dan belukar rawa pada hutan Tutupan belukar dan belukar rawa pada fungsi lindung (wilayah dengan ketererangan >25%, sempadan sungai, danau dan sempadan pantai). Tutupan berupa ruang terbuka hijau (hutan kota,

akhir RPJMD Kabupaten Karimun yaitu 98,25%

Terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di tahun 2022 menjadi bahan evaluasi bagi Kabupaten Karimun untuk terus meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun-tahun berikutnya. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Karimun sudah melampaui target yang ditetapkan namun masih perlu adanya komitmen pada upaya-upaya pengendalian pencemaran udara dan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.

taman kota, jalur hijau dll) kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Data yang digunakan sebagai dasar hitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) bersumber dari kombinasi data sekunder dan primer. Data untuk tutupan lahan berasal dari data sekunder (top down) interpretasi citra satelit tutupan lahan. Data primer berasal dari kegiatan survey luasan pada kawasan hijau di perkotaan dan pengumpulan data dari instansi terkait secara khusus untuk RTH mendetail pada kawasan perkotaan. Data tutupan lahan yang tersedia untuk perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Kabupaten Karimun Tahun 2022 telah mewakili keseluruhan wilayah administratif.

Data hasil tabulasi pemantauan kualitas lahan dan luasan tutupan hutan,

belukar dan tutupan lainnya di Kabupaten Karimun selama Tahun 2023, serta perhitungan dan analisis kualitas lahan yang bersumber dari data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.93

Hasil Analisis Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kab. Karimun Tahun 2023

No	Parameter Perhitungan IKL	Luas (Ha)	Faktor Konversi	Nilai
1	Luas Wilayah (Ha)	93.045,26	1	93.045,26
2	Luas Hutan (Ha)	25.051,74	1	25.051,74
3	Luas Belukar dalam Kawasan Hutan	4.492,30	0.6	2.695,38
4	Luas Belukar pada Fungsi Lindung)	779,18	0.6	467,51
5	Kebun Raya data LIPI	-	0.4	-
6	RTH (Ruang Terbuka Hijau)	26,75	0.6	16,05
7	Taman KEHATI	-	0.6	-
8	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya (Ha)	254,66	0.6	152,80
8	RHL	2.303,21	0.6	1.381,99
9	DKK	-	1	-
Luas Tutupan Lahan		125.953,20		29.765,46
Luas Wilayah		93.045,26		93.045,26
Nilai Tutupan Lahan (TL)				0.319903032811656
Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Karimun 2024				51.83

Sumber : Hasil Analisis Indeks Kualitas Lahan (IKL) DLH Kab. Karimun Tahun 2024

Hasil analisis pengukuran capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten

Karimun Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.94

Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Karimun Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Capaian s/d 2023 terhadap Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	52,01	52,58	51,83	98,57%	52,62	98,49%

Target kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2024 berada pada angka indeks 52,58, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 51,83 dan persentase capaian kinerjanya sebesar 98,57% dengan kriteria "SANGAT TINGGI". Pada tahun sebelumnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) berada pada angka indeks 52,01, sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya senilai 0,18 point. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karimun, Indeks Kualitas Lahan berada pada angka 52,62 sehingga capaian kinerja tahun ini masih dibawah target akhir RPJMD Kabupaten Karimun dengan pencapaian 98,49%

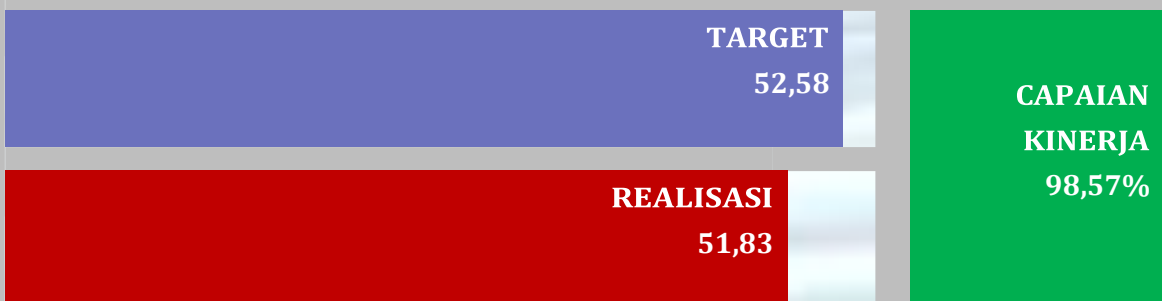
dibawah capaian target akhir RPJMD Kabupaten Karimun yaitu 98,84%.

Penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,18 point yang setara dengan 0,346%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegiatan penghijauan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta evaluasi dan validasi pendataan lahan yang semakin baik disamping penggunaan lahan untuk keperluan lainnya di Kabupaten Karimun, ditandai dengan banyaknya perumahan-perumahan yang terbangun dari proses perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah pada Tahun 2024.

**SASARAN STRATEGIS 15 :**

**Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air**

**2) INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL) 2024**



**Rumusan :**  
 $100 - (50/0.9 \times I_{eu} - 0.1)$

Tabel 3.95

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya/Anggaran Terhadap Sasaran Strategis  
"Meningkatnya Pengelolaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2024"

Tahun	Program	Indikator	Input		Output		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	target	realisasi	target	realisasi	
2024	Program Pengendalian Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Standar Baku Mutu Kualitas Air yang tercemar	69.443.000,-	66.179.600,-	9 Sampel yang tidak memenuhi baku mutu	7 Sampel yang tidak memenuhi baku mutu	66,67%	77,78%	Efisiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 9 sampel saja yang tidak memenuhi baku mutu namun realisasinya 7 sampel yang tidak memenuhi baku mutu. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 66,67% dengan

									realisasinya 77,78% pada pelaksanaannya belum optimal, karena belum adanya pemeliharaan lingkungan terkait titik lokasi pengambilan sampel air untuk peningkatan mutu air.
	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<i>Jumlah Limbah B3 yang Tekelola (Ton)</i>	3.125.000,-	3.125.000,-	4 Laporan	4 laporan	5.800	5.600	Efisiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 4 Laporan dengan realisasinya 4 Laporan triwulan atas pemenuhan pengelolaan limbah B3. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 5.800 ton dengan realisasinya 5.600 ton, bahwa pelaksanaan efisiensi program optimal.
	<b>Program Penanganan Pengaduan</b>	<i>Persentase Pengaduan Masyarakat</i>	9.823.000,-	6.257.000,-	1 Laporan	1 laporan	100%	100%	Efisiensi penggunaan sumberdaya biaya dapat

Lingkungan Hidup		kat Bidang LH yang ditangani						dilihat dari Penggunaan anggaran yang tersedia 2024, dari output keluaran target sebanyak 1 Laporan dengan realisasinya 1 Laporan triwulan atas pemenuhan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang teregistrasi. Sehingga outcome yang di dapatkan dari target yang ditetapkan 100% tindak lanjut Penanganan pengaduan yang Teregistrasi Dengan Realisasinya 100% pengaduan Yang terselesaikan dan Mendapatkan hasil capaian efisiensi yang optimal.
------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	---

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karimun Tahun 2024

**ANALISIS PENYEBAB  
KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN  
SOLUSI**

Dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dalam pemenuhan sasaran tersebut selama Tahun 2024, beberapa gambaran isu-isu strategis penting berupa kelemahan, tantangan, kekuatan dan peluang yang timbul dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut yang menyebabkan kegagalan, keberhasilan dan alternative solusi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024. dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Analisis Faktor Penyebab Kegagalan terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Secara umum dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun pada Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2023, terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan/permasalahan masih dijumpai yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di danau) sehingga hal ini dapat menurunkan kualitas air danau di Kabupaten Karimun.
2. Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kabupaten Karimun, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat memproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan, selain itu juga mengurangi polusi udara perkotaan.
3. Pelayanan melalui OSS-RBA belum semuanya berlangsung dengan baik karena masih terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkannya, selain itu sebagian masyarakat masih mempunyai persepsi yang kurang tepat mengenai Dokumen Lingkungan, karena selama ini masyarakat menganggap dalam mengurus dokumen lingkungan sulit padahal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun siap melaksanakan pelayanan asistensi dan membuka konsultasi.
4. Pengetahuan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 dan air limbah belum maksimal dan masih banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum familiar terkait syarat dan peraturan yang baru.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) belum memiliki kompetensi, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan terhadap usaha/kegiatan dengan peninjauan lapangan secara langsung hanya bersifat monitoring dan hasil analisa tidak dapat maksimal.

### **Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Faktor penyebab keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun pada Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran terkait pengujian kualitas air pada laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kabupaten Karimun. Pemantauan kualitas air dilakukan dari 3 danau yang ada di wilayah Kabupaten Karimun, yaitu Danau Bati, Pongkar dan Sentani.
2. Kebutuhan data kualitas air, udara dan lahan yang terus meningkat seiring dengan formula baru perhitungan IKA, IKU dan IKL dari KLHK, sehingga mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk terus meningkatkan jumlah lokasi pemantauan.
3. Permohonan dokumen lingkungan melalui aplikasi yang disediakan DPMPTSP sudah dapat diakses oleh masyarakat dan berjalan dengan baik, sehingga dampak diberlakukannya OSS perizinan perusahaan tidak membutuhkan waktu yang lama dan adanya kepastian waktu serta tingginya kesadaran instansi pemerintah dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga banyak kegiatan/usaha pemerintah yang sudah berjalan mengajukan dokumen lingkungan.

4. Dengan adanya Permen LHK NO. 5 Tahun 2021 dan Permen LHK NO. 6 Tahun 2021 tentang persyaratan Persetujuan Teknis (PERTEK) terkait Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3 dari perizinan menjadi rincian teknis sehingga memudahkan pelaku usaha/kegiatan mengurus persetujuan lingkungan.
5. Keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman dengan adanya dukungan anggaran terkait pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 yang diadakan rutin setiap tahun dan visitasi ke lokasi.
6. Adanya kewajiban dari perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam izin lingkungan.

#### **Analisis Rencana Tindak Lanjut/Solusi terhadap Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan terhadap pelaksanaan program/kegiatan

Pemerintah Kabupaten Karimun pada Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2022, maka dapat disusun rencana tindak

lanjut/solusi dari faktor-faktor tersebut, sehingga dapat dijadikan rekomendasi dalam pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.

Rencana tindak lanjut/solusi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap penataan izin usaha/kegiatan yang berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti; usaha/kegiatan yang menjadi sumber penghasil air limbah baik yang domestik maupun industri dan sampah serta limbah B3/medis yang dihasilkan oleh pemerintah/industri/pelakuusaha.
2. Pembinaan, pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli penyelamatan sumber daya air.
3. Merubah cara pandang/*mindset* masyarakat terhadap sampah (penyadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengelola setiap sampah yang dihasilkan) dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi

terkait pengelolaan sampah dan pemberian informasi dengan menyebarkan spanduk, reklame dan pamphlet/brosur kepada masyarakat.

4. Pembinaan dengan melakukan kegiatan penguatan kelembagaan kelompok pengelola sampah di setiap desa/kelurahan dan peninggkatan peran kelompok masyarakat dalam penanganan sampah.
5. Penguatan sinergitas antar pemangku wilayah dalam pengelolaan lingkungan.
6. Reklamasi kawasan (penanaman tanaman di bekas tambang, mangrove).

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu.
2. Pemberian reward pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta punishment pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan

baik.

3. Penguatan peran kecamatan, kelurahan dan desa dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD).

vi. **Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel**

Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi birokrasi juga mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan

*mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan reformasi birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh pemerintah daerah.

Adapun indikator pendukung sebagai ukuran keberhasilan dari capaian sasaran ini terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel adalah indikator nilai LPPD dan Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.96**  
**Capaian Indikator**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai LPPD	4,75	-	-
2	Indeks Reformasi Birokrasi	71,15	77,85	109,42

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks	3,00	3,041	101,36
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian</b>				<b>70,26</b>

*Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Karimun, 2024*

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karimun capaian indikator kinerja belum dapat diukur karena belum keluar nilai evaluasi dari Kemendagri. Namun terakhir nilai LPPD Kabupaten Karimun diperoleh pada tahun 2023 di skor 3.23 dengan prestasi sedang. Dalam LPPD ini tertuang deskripsi pelaksanaan dan hasil-hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Tahun yang meliputi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diantaranya Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 di

Kabupaten Karimun secara umum telah dilaksanakan dengan baik melalui upaya optimalisasi di berbagai sektor pembangunan yang berpedoman pada RPJMD 2021 – 2026 serta selaras dengan kebijakan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Dalam capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilihat dari capaian kinerja makro yang merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Untuk mengetahui dengan jelas tentang capaian kinerja makro dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.97

Capaian Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Karimun

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,44	71,70	0,36
2	Angka Kemiskinan	6,83	6,85	0,29
3	Angka Pengangguran	8,36	7,20	-13,87
4	Pertumbuhan Ekonomi	-3,59	2,37	166,02
5	Pendapatan Perkapita	11,879	11,885	-0,05
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,315	0,370	-2,54

Sumber: BPS Kabupaten Karimun 2024

Data diatas menunjukkan bahwa capaian laju kinerja dari indikator kinerja makro masih banyak yang peningkatan lambat sehingga perlu perhatian yang optimal dari pemerintah. Namun dari indikator pertumbuhan ekonomi saja yang cukup signifikan naik yakni 166,02%. Kemudian dari data diatas juga diketahui bahwa secara fisik kegiatan pembangunan telah dapat meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan publik, seperti peningkatan jalan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan, air bersih dan kesehatan yang secara tidak langsung turut serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan

Pemerintah Pusat melalui Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Selanjutnya Indeks Reformasi Birokrasi merupakan skor pengukuran capaian reformasi birokrasi, dimana pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 61 dengan realisasi 58.10. Dari angka ini terlihat bahwa target daripada indeks reformasi birokrasi belum tercapai. Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2022 memperoleh kategori CC (58.10) untuk indeks reformasi birokrasi. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada aspek pemenuhan dan reform serta diikuti

dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Untuk mengetahui dengan jelas hasil komponen penilaian

dari komponen pengungkit dan komponen hasil dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.98.**  
**Komponen Penilaian Pengungkit dan Hasil Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024**

No	Komponen Penilaian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Komponen Pengungkit		
	a. Pemenuhan	8,22	8,38
	b. Hasil Antara Area Perubahan	5,61	5,84
	c. Reform	13,32	13,40
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>27,15</b>	<b>27,62</b>
2	Komponen Hasil		
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	8,05	8,16
	b. Kualitas Pelayanan Publik	8,73	8,06
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	7,70	8,10
	d. Kinerja Organisasi	5,02	6,16
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>29,50</b>	<b>30,48</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>71,11</b>	<b>77,85</b>

**Sumber :** Kemenpan-RB RI, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya dengan melakukan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana aksi di level

perangkat daerah. Kemudian Pemerintah Kabupaten Karimun mendorong kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN pada setiap perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.99.**  
**Jumlah Pegawai yang Menyampaikan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024**

No	Laporan	Jumlah	Total
1	LKHPN		788
	a. Kepala Daerah	100	
	b. Pejabat Esselon I/II	43	
	c. Pejabat Esselon III/ Lainnya	744	
2	LKKASN		685
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>1.473</b>

**Sumber:** Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penyampaian laporan harta kekayaan, baik dari pejabat maupun ASN nya terlaporkan 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun patuh dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Mulai tahun 2024 Indikator "Nilai MRI" digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan sasaran kinerja daerah yaitu Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel. Penerapan Manajemen Risiko merupakan upaya pengelolaan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko bertujuan untuk melindungi aset organisasi, meminimalkan kerugian, memanfaatkan peluang baru, menjaga stabilitas dan keberlanjutan, mengurangi dampak negatif dari risiko serta mengubah risiko menjadi peluang. Pemerintah Kabupaten Karimun sudah memiliki pedoman dalam mengelola risiko yaitu tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Karimun dan turunannya yaitu SK Bupati nomor 363 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Risiko Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Pengelolaan risiko sudah dilakukan mulai level Strategis Pemda, Strategis Perangkat Daerah Maupun Operasional Perangkat Daerah.

Penilaian MRI Kabupaten Karimun Tahun 2024 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan disampaikan melalui surat Nomor PE.09.03/LHP-562/PW28/3/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2024.

Tahun 2024 Nilai MRI Kabupaten Karimun ditargetkan sebesar 3,00 dan terealisasi sebesar 3,041 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 101,36%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (Terdefenisi) yaitu Pemerintah Kabupaten Karimun telah mampu

mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, Pemda juga telah memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas dan penyelenggaraan manajemen risiko yang

konsisten secara menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional dan dapat diketahui efektivitas implementasinya.

Berikut adalah rincian penilaian MRI Kabupaten Karimun tahun 2024 :

Tabel 3.100.  
Nilai MRI Kabupaten Karimun Tahun 2024

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				3,041		
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
<b>PERENCANAAN</b>	<b>40,00%</b>		<b>1,400</b>			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,500	1,400			
<b>KAPABILITAS</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,731</b>			
KEPEMIMPINAN	5,00%	2,438	0,122			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	2,750	0,138			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,500	0,125			
KEMITRAAN	2,50%	2,250	0,056			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,325	0,291			
<b>HASIL</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,909</b>			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,750	0,516			
OUTCOMES	11,25%	3,500	0,394			
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>		<b>3,041</b>			

Komponen penilaian MRI terdiri dari Kualitas Perencanaan Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko dan *Outcome*. Dari data pengukuran diatas dilakukan analisis penyebab keberhasilan pengelolaan MRI di Kabupaten Karimun yaitu semakin meningkatnya kesadaran setiap perangkat daerah sebagai Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam mengelola risiko di perangkat daerahnya masing-masing, pelaksanaan penilaian risiko di reviu oleh Inspektorat, pengelolaan risiko juga di

*monitor* secara berkala setiap triwulannya serta melaporkan hasil monitoring tersebut kepada Bupati Karimun melalui Unit Manajemen Risiko Kabupaten, hal-hal tersebut cukup mempengaruhi pencapaian di level Kabupaten. Agar pengelolaan risiko perangkat daerah terus mengalami peningkatan, mulai tahun 2024 Inspektorat Daerah juga telah melakukan evaluasi kematangan manajemen risiko perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Karimun. Perbandingan dengan nilai tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena

penilaian MRI Kabupaten baru dimulai di

tahun 2024 ini.

Tabel 3.101.  
Nilai MRI Kabupaten Karimun Tahun 2022 s/d 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai MRI	3,00	3,041	101,36

Selain faktor penyebab keberhasilan adapula penyebab kegagalan yang masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Daerah Karimun. Berdasarkan evaluasi tahun 2024 permasalahan yang masih terjadi menjadi penyebab kegagalan yaitu :

1. Masih rendahnya kesadaran pegawai akan manajemen risiko;
2. Struktur Manajemen Risiko belum berjalan optimal dan masih bergantung pada peran Inspektorat Daerah, hal ini antara lain karena belum optimalnya fungsi UPR di tiap OPD, dan sekretariat di level Koordinator Manajemen Risiko, Komite Risiko, dan Unit Kepatuhan;
3. Proses Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara utuh, di antaranya belum melekatkan pada proses bisnis;
4. Peningkatan pembinaan manajemen risiko belum menjangkau pada SDM teknis serta masih minimnya SDM yang bersertifikasi manajemen risiko;

5. Belum seluruh perangkat daerah melakukan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja;

6. Belum seluruh Perangkat Daerah mengelola risiko terkait fraud dan kemitraan secara memadai.

Dalam rangka perbaikan kedepan, berikut Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun agar kualitas pengelolaan risiko semakin meningkat yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan manajemen risiko untuk meningkatkan kesadaran pegawai;
2. Mengoptimalkan fungsi UPR di tiap Perangkat Daerah termasuk Kecamatan, dan sekretariat di level Koordinator Manajemen Risiko, Komite Risiko, dan Unit Kepatuhan;
3. Mengoptimalkan proses manajemen risiko dalam proses bisnis;
4. Melaksanakan pembinaan manajemen risiko untuk menjangkau SDM teknis bersertifikasi manajemen risiko;

5. Seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan melakukan penerapan manajemen risiko melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;

Selanjutnya upaya lain yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam mengoptimalisasikan penguatan reformasi birokrasi Melaksanakan *Benchmarking Reformasi Birokrasi* ke Provinsi Jawa Barat yang didampingi Tim dari Menpan RB RI yang diikuti oleh sebagian Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan serta adanya adanya komitmen kepada OPD

Dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi, upaya pembangunan budaya kerja BerAKHLAK menjadi aspek utama penguatan manajemen



Pemerintah Kabupaten Karimun

6. Seluruh Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi risiko terkait dengan kemitraan;

7. Mengoptimalkan monitoring pengelolaan risiko secara berkala setiap triwulannya.



perubahan. Penguatan peran agen perubahan (*agent of change*) dalam aktivasi budaya kerja ASN menjadi sorotan penting.

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan setiap unsur organisasi dalam mendorong perubahan dari berbagai aspek pelaksanaan reformasi birokrasi dapat mentransformasi sistem kerja organisasi, pola pikir, dan *culture set* ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, dan berintegritas selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan *stakeholder* yang semakin meningkat.

telah melaksanakan launching &

internalisasi *core values* berakhlak dan *employer branding* ASN di lingkungan pemerintah daerah kab.karimun pada tanggal 23 s.d 24 april 2022 dengan pembicara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Dr. Suhajar Diantoro, M.Si dan Bapak Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian sebagai motivator ESQ. Sebagai peserta dalam acara tersebut adalah pejabat tinggi pratama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karimun, kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Kepala Puskesmas di lingkungan pemerintah daerah Kab. Karimun. Sosialisasi itu

hanya sampai level pengetahuan atau *knowledge*, sementara internalisasi menempatkan BerAKHLAK sebagai nilai dan keyakinan di hati ASN. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung indikator ini dapat dilihat dari program dan kegiatan selama tahun 2024 yang terlaksana dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 dengan ukuran efisiensi berdasarkan input/ dana, out put / keluaran dan outcome / hasil yang realisasikan. Data pendukung efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.102.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang mendukung Indikator Indeks Reformasi Birokrasi**

Tahun	Program	Kegiatan	Input		Out put		Outcome		Efisiensi
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	realisasi	target	realisasi	
2022	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Kinerja dan Reforasi Birokrasi	451.090.000,-	420.635.530,-	2 Dokumen	4 Dokumen	100% 100% Dokumen disiapkan tepat waktu	100% / 4 100% Dokumen disiaokan tepat waktu	Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang tersedia 2022 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021 cukup efisiensi dan dari output keluaran target sebanyak 4 dokumen lebih banyak realisasinya dibandingkan dengan tahun 2021 hanya sebanyak 3 Dokumen, dan dari outcome pencapaian realisasi 2022 lebih tinggi dibandingkan 2021 sehingga dapat dikatakan efisiensi penggunaan sumber daya tercapai
2023	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Kinerja dan Reforasi Birokrasi	470.550.000,-	373.679.098,-	2 Dokumen	4 Dokumen	100% 100% Dokumen disiapkan tepat waktu	100% / 4 100% Dokumen disiaokan tepat waktu	
2024	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Kinerja dan Reforasi Birokrasi	171.851.000	131.489.949	2 Dokumen	4 Dokumen	100% 100% Dokumen disiapkan tepat waktu	100% / 4 100% Dokumen disiaokan tepat waktu	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Karimun, 2025

vii. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat berupa pelayanan administratif, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Karimun. Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya.

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan internet. Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online. Disamping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat Kabupaten Karimun. Untuk hal ini dibutuhkan pemerintah yang melayani secara prima. Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas Pelayanan publik dengan memperhatikan indikator indeks pelayanan publik atau kualitas pelayanan public. Pemerintah Kabupaten Karimun pada Tahun 2024 telah menargetkan Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,51 Adapun dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.103  
Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
		Target	Realisasi	
Indeks Pelayanan Publik	2,74	3,51	4,37	124,50

Sumber : Menpan RB, Tahun 2025

Pada table diatas menunjukkan bahwa Indeks Pelayanan Publik pada tahun

2023 berada pada angka 2,74 sementara pada tahun 2024 realisasi Indeks Pelayanan

Publik Mencapai angka 4,37 dengan Katogori "A-" Dalam hal ini Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan ini pada tahun 2024 kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karimun meningkat secara signifikan, dengan memenuhi harapan masyarakat, dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga. Dengan

fokus pada inovasi, keterlibatan masyarakat, dan pengembangan SDM, pemerintah daerah dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya untuk mengetahui dengan jelas hasil penyelenggaraan pelayanan publik di masing-masing lokusnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.104.**  
**Nilai indeks Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Oleh Kementrian PAN RB Tahun 2024**

NO	KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP SAMSAT/ BAPPENDA	IPP KABUPATEN	KATEGORI
1	Kabupaten Karimun	4.39	4.30	4,42	-	4.37	A-

Sumber : Mempan RB, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai indeks pelayanan publik dinas sosial sebesar 4,39, RSUD sebesar 4,30 dan disdukcapil sebesar 4,42 serta untuk Samsat/Bapenda nol. Indeks pelayanan publik kabupaten mendapatkan nilai sebesar 4,37 dengan kategori A.

- a. **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**  
Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, adapun realisasi dan capaian yang mendukung sasaran 17 (tujuh belas) dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.79 dibawah ini:

**Tabel 3.105**  
**Data Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 16 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024**

	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	90.86	115.075 %

Dari tabel 3.87 diatas dapat dilihat bahwa untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam hal pelayanan kependudukan didapat dengan hasil realisasi sebesar 90.86%. Hasil ini menggambarkan bahwa realisasi capaian yang didapat bermakna baik sekali dengan capaian 115.075 %. Pencapaian

realisasi nilai IKM ini didapat dengan melakukan survey kepuasan masyarakat dengan cara memberikan kuesioner terhadap masyarakat pengguna jasa layanan.

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan Indeks adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.106**  
**Kategori Mutu Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	65,00-78,60	C	Cukup
3	2,51 - 3,25	78,61-88,30	B	Baik
4	3,26 - 4,00	88,31-100	A	Sangat Baik

Adapun kuesioner yang diberikan adalah berisi pertanyaan yang terkait 9 (unsur) pelayanan dengan hasil kuesioner

dari masing-masing unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.89 dibawah ini :

**Tabel 3.107**  
**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan berdasarkan masing-masing Unsur Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Kinerja Baik	Peringkat
U1	Persyaratan	3,60	Sangat Baik	8
U2	Prosedur Pelayanan	3,63	Sangat Baik	5
U3	Waktu Pelayanan	3,617	Sangat Baik	6
U4	Biaya/Tarif	3,913	Sangat Baik	1
U5	Produk Layanan	3,62	Sangat Baik	7

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Kinerja Baik	Peringkat
U6	Kompetensi Pelaksana	3,643	Sangat Baik	4
U7	Prilaku pelaksana	3,59	Sangat Baik	9
U8	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	3,75	Sangat Baik	2
U9	Sarana dan Prasarana	3,677	Sangat Baik	3

**Sumber :** Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2025

Rata-rata dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata interval IKM 3,63 atau Sangat Baik merupakan Unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan.

Dari tabel 3.81 diatas dapat dilihat bahwa terdapat unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah Biaya/Tarif, Penanganan, Pengaduan, sarana dan masukan serta Sarana dan Prasarana (rata-rata 37,8 ) sedangkan unsur dengan nilai rata-rata (NRR) terendah adalah Produk layanan, Persyaratan dan Prilaku pelaksana ( rata-rata 36,03). Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karimun umumnya sangat Baik dan merasa sangat

puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. akan tetapi unsur-unsur dengan NRR posisi 3 terendah perlu ditingkatkan Kembali kualitas pelayanannya

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan dari 9 (Sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diatas 3,63 mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Proses menciptakan pelayanan public yang berkualitas maka ke-9 unsur pelayanan diatas harus ditingkatkan Kembali khususnya Waktu Pelayanan selain itu ada 3 (tiga) unsur lainnya yang juga harus ditingkatkan pada unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun yang langsung berhubungan dengan Masyarakat antara Lain:

- a Sarana Prasarana (NRR 3,62)
- b Persyaratan ( NRR 3,60)
- c Prosedur Pelayanan (NRR 3,63)

Segi lama waktu pelayanan

menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu pelayanan dalam hal kependudukan di Kabupaten Karimun menunjukkan nilai baik. Hal ini dapat dilihat pada Capaian Rata-rata Lama Waktu Pelayanan pada tabel 3.82 dibawah ini :

**Tabel 3.108**  
**Capaian Rata-rata Lama Waktu Pelayanan Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024**

INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rata –rata lama waktu pelayanan	3 hari	3 hari	100%

Dari tabel 3.90 diatas dapat dilihat bahwa capaian IKM dalam hal pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun yang bernilai baik didukung pula dengan rata-rata lama waktu pelayanan kependudukan dengan realisasi selama 3 (Tiga) hari dari target yang telah ditentukan selama 3 (tiga) hari.

Dari realisasi rata-rata lama waktu pelayanan Kependudukan yang diberikan

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun selama 3 (tiga) hari, berdasarkan nilai interval lama pelayanan berada pada interval 2-5. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan berdasarkan rata-rata lama waktu pelayanan adalah baik dengan kinerja unit pelayanan baik. Adapun interval nilai kinerja unit pelayanan berdasarkan lama waktu pelayanan dapat dilihat pada tabel 3.91 dibawah ini :

Tabel 3.109

Interval Nilai Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Lama Waktu Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL LAMA PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	0-1	A	Sangat Baik
2	2-5	B	Baik
3	6-14	C	Kurang Baik
4	> 15	D	Tidak Baik

Tabel 3.110

Capaian Rata-rata Lama Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2024.

NOMOR	DOKUMEN KEPENDUDUKAN	TARGET ( HARI )	RATA-RATA LAMA PELAYANAN ( HARI )	CAPAIAN (%)
1	Akta Kelahiran	3	3	100%
2	Akta Perkawinan	3	3	100%
3	Akta Perceraian	3	3	100%
4	Akta Kematian	2	3	66.66%
5	Akta Pengesahan Anak	3	3	100%
6	Kartu Keluarga	3	3	100%
JUMLAH	1+2+3+4+5+6		18	566.66%
RATA-RATA	$(1+2+3+4+5+6)/6$		3	94.44%

Baiknya pelayanan kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun pada tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun serta pengawasan dari masyarakat. Semakin ketatnya aturan yang mewajibkan seluruh aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat membuat

aparatur semakin sadar akan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat yang profesional. Agar kualitas pelayanan bisa tetap terjaga atau agar lebih baik lagi, Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memikirkan untuk memberikan penghargaan (reward) bagi aparatur pemerintah yang berprestasi agar menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

**b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia antara lain adalah peningkatan sumber daya manusia, inovasi dalam bidang pelayanan publik, perbaikan regulasi tentang pelayanan publik, perbaikan sistem pelayanan publik, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas pelayanan berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam cara suatu layanan diberikan kepada pelanggan, pengguna, atau masyarakat. Hal ini mencakup

berbagai aspek seperti:

1. Efisiensi : Layanan diberikan dengan cepat dan tepat waktu.
2. Efektivitas : Layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
3. Kepuasan Pelanggan : Pelanggan merasa puas dengan proses dan hasil layanan.
4. Profesionalisme : Penyedia layanan bertindak dengan kompeten, ramah, dan penuh tanggung jawab.
5. Inovasi : Adanya penggunaan teknologi atau metode baru untuk mempermudah dan meningkatkan mutu layanan.
6. Aksesibilitas : Layanan lebih mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
7. Konsistensi : Kualitas layanan tetap terjaga, tidak bergantung pada situasi tertentu.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun capaian realisasi yang mendukung sasaran 17 (tujuh belas) dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.79 dibawah ini:

Tabel 3.111

Data Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 17 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2024

INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.55	3.52	99,15 %

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan publik telah mencapai target. Untuk rata-rata tingkat capaian sasaran sebesar 99,15 % yang bermakna bahwa indikator tersebut menunjang tercapainya misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Selengkapnya nilai capaian sasaran indikator sesuai hasil pengukuran kinerja diuraikan sebagai berikut :

**1. Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal**

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

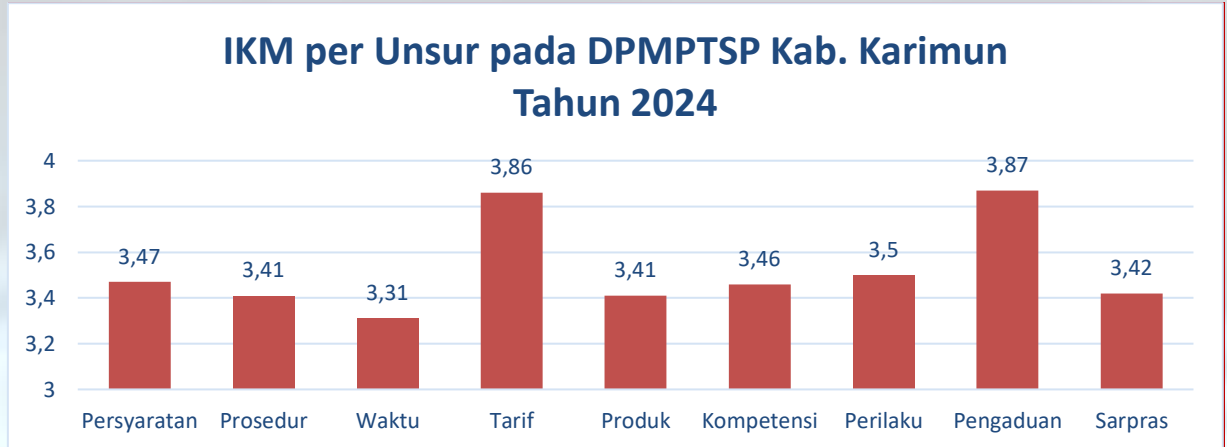
- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3.52, setelah dikonversi dengan nilai dasar 25 maka indeks sebesar 88,10 sehingga mutu layanan masuk kategori “ BAIK (B)”.

- b. Survei dilaksanakan terhadap 550 (lima ratus lima puluh) responden yang telah mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan. Mayoritas responden yang mengisi kuesioner berdasarkan karakteristik umur adalah masyarakat berusia di antara umur 20 tahun sampai dengan 30 tahun (54,72%), jenis kelamin perempuan (75,81%), pendidikan terakhir S1 (50%) dan pekerjaan utama PNS (27,63%).
- c. Unsur Penanganan Pengaduan (U8) memperoleh nilai tertinggi (3,87) menurut masyarakat yang telah disurvei. Hal ini merupakan hasil dari kecepatan dan ketepatan respon dari petugas pelayanan terhadap kebutuhan bantuan dan jawaban terkait permasalahan yang diajukan oleh pengguna layanan.
- d. Unsur Waktu Penyelesaian (U3) memperoleh nilai terendah (3,31). Hal ini disebabkan oleh penerbitan izin yang harus menunggu rekomendasi dari OPD teknis sehingga waktu penerbitan

menjadi lebih lama.

Grafik 3.13

Jawaban Responden per Unsur Pelayanan



Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik dari masyarakat/pengguna layanan, sebagian besar memberikan respon positif terhadap pelayanan yang telah diberikan dan berharap kualitas pelayanan akan terus ditingkatkan. Adapun kritik yang diberikan adalah terkait aplikasi yang sering terjadi gangguan sehingga membuat proses pengajuan perizinan menjadi terkendala. Hal ini diharapkan untuk menjadi catatan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan tindak lanjut.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan antara lain :

1. Memperbaiki sistem pelayanan agar dapat mempercepat proses pengurusan dokumen perizinan dan nonperizinan dan memastikan bahwa petugas menyelesaikan

pembuatan dokumen tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan.

2. Memperbaiki prosedur pelayanan dan koordinasi antar unit pelayanan agar proses pembuatan dokumen menjadi lebih cepat dan tidak berbelit-belit.
3. Meningkatkan kompetensi petugas dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pelayanan publik.
4. Menginformasikan kepada masyarakat terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dengan menambah jumlah banner/spanduk/leaflet/ brosur serta menggunakan media sosial, seperti Website, FB, Instagram, WhatsApp, sehingga informasinya dapat dibaca jelas oleh masyarakat.
5. Memastikan kemudahan proses pengurusan izin sehingga pengguna layanan tidak perlu mengurus izin melalui

calo yang menyebabkan pengguna layanan membayar biaya/tarif yang seharusnya tidak diperlukan.

6. Terus memperbaiki dan mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan.
7. Responden yang mengisi kuesioner sebagian besar adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah mengurus surat izin praktik, sehingga untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat sebaiknya karakteristik responden lebih beragam terutama masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha atau wiraswasta yang mengurus dokumen perizinan usaha dan lain-lain.
8. Memprioritaskan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terutama fasilitas jaringan internet melalui Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dilihat melalui grafik berikut :

Grafik 3.14



Fluktuasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat sangat bergantung pada konsistensi layanan, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi rutin, inovasi berkelanjutan, serta keterbukaan terhadap masukan adalah kunci untuk menjaga tren tetap positif.

Kenaikan nilai IKM ini disebabkan oleh beberapa alasan di antaranya :

- ✓ Penerbitan rekomendasi dari OPD teknis sudah semakin cepat, proses penerbitan rekomendasi teknis oleh OPD teknis sudah menggunakan system online dengan SOP Pelayanan yang baku, sehingga batas waktu pengurusan rekomendasi teknis telah ditetapkan standardnya:
- ✓ Pemahaman Masyarakat tentang alur proses perizinan pada aplikasi OSS maupun Aplikasi si Cantik Clouds semakin meningkat, hal ini merupakan dampak dari gencarnya sosialisasi terhadap pelaku usaha sebagai pembinaan bagi pelaku usaha

- ✓ Petugas layanan lebih responsive dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan inovasi pelayanan yakni pantau sicutik mami, dimana petugas layanan turun ke pulau pulau untuk mensosialisasikan maupun membantu Masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengalami penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya (2021) namun masih dalam kategori Baik.

**c. RSUD Muhammad Sani**

Pada RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun capaian realisasi yang mendukung sasaran 17 (tujuh belas) dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.79 dibawah ini:

Tabel 3.112

Data Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran 17 pada RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun Tahun 2023

INDIKATOR		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	87,65	109,456%

Selanjutnya Ombudsman RI sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik mendorong Pemerintah untuk

meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang diberikan kepada masyarakat dengan melaksanakan penilaian

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintahan Kabupaten Karimun pada Tahun 2023 telah

mendapat opini kualitas tertinggi se Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 90,92 (Kategori A).

Gambar 3.3

**Bupati Karimun Menerima Penghargaan Hasil Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau**



Penilaian penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan opini pengawasan pelayanan publik yang dijadikan acuan kualitas. Maksud dari penilaian

penyelenggaraan pelayanan publik untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun telah menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan teknis anggaran berbasis kinerja tahun 2024 digunakan yaitu RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah adalah

sebagai berikut:

#### a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022. Bahwa Pendapatan sebesar Rp. 1.310.685.824.427,47 dan Belanja Daerah Sebesar Rp. 1.300.498.605.017,47. Berpedoman pada Proyeksi indikator Makro LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2022 ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi, maka staretegi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 diarahkan :

1. Meningkatkan Sumber Penerimaan daerah melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proposional.

2. Meningkatkan efesiensi pengelola APBD dari sisi belanja;
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.113

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.143.231.543.789,00</b>	<b>1.310.685.824.427,47</b>	<b>92,74</b>	<b>1.348.239.567.434,36</b>
	Pendapatan Asli Daerah	403.112.004.485,00	366.339.060.730,47	90,88	408.164.517.579,36
	Transfer Pemerintah Pusat	899.465.312.999,00	867.532.350.521,00	96,45	66.201.231.000,00
	Transfer Dana Perimbangan	840.547.495.999,00	807.313.889.521,00	96,05	787.833.824.796,00
	Transfer Pemerintahan Antar Daerah	110.654.226.305,00	76.814.413.176,00	69,42	81.312.219.220,00
	Bantuan Keuangan	1.757.500.000,00	00,00	00,00	0,00
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	00,00	00,00	00,00	4.727.774.839,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Pemerintah Kab. Karimun, 2025

#### b. Pengelolaan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah disusun

berdasarkan prestasi kerja. Hal tersebut untuk meningkatkan Akuntabilitas meningkatkan perencanaan anggaran

serta efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orinetasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok fungsi masing-masing opd.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proposi belanja untuk kepentingan publik eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya belanja tetap

memperhatikan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas program strategi daerah. Belanja Daerah dikelompokkan dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga dan Dana tranfer yang masing-masing Untuk meningkatkan Pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.114

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	1.200.234.204.178,30	1.071.499.011.649,47	89,27
2	Belanja Modal	172.663.941.700,91	140.986.800.790,00	81,65
3	Belanja Tak Terduga	2.819.806.828,79	697.401.200,00	24,73
4	Belanja Transfer	96.051.547.292,00	87.315.391.378,00	90,90
<b>Total</b>		<b>1.471.769.500.000,00</b>	<b>1.300.498.605.017,47</b>	<b>88,36</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Pemerintah Kab. Karimun, 2025

### c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan Transaksi Keuangan yang bertujuan Untuk menutupi Selisih Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun Kebijakan Daerah Sebagai Berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam Rangka Akurasi, Efisiensi, efektifitas dan Profitabilitas;

2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam Bentuk Giro/ Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah

memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja,

pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Tabel 3.115  
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 Per 31  
Desember 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	<b>Pembiayaan</b>			
1	Penerimaan Daerah	61.037.956.211,00	61.037.956.210,68	100,00
2	Pengeluaran Daerah	2.500.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>63.537.956.211,00</b>	<b>61.037.956.210,68</b>	<b>96,07</b>

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Pemerintah Kab. Karimun, 2025

Analisis Penyebab

Keberhasilan/Kegagalan Atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta

Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

a) Faktor-faktor Pendukung adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan perundangan yang bersifat dinamis sehingga perlu pengembangan;
- 2) Kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan OPD;
- 3) Adanya kepentingan bersama terhadap ketepatan waktu pengesahan anggaran;
- 4) Adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

b) Faktor-faktor Penghambat adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terjadi kesepahaman antara legislatif dan eksekutif;
- 2) SIPD belum sempurnanya

mengakomodir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

c) Solusi / Rekomendasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyusunan RKPD, dan KUA – PPAS perlu waktu yang lebih awal dibanding tahun ini supaya cukup waktu untuk pembahasan, evaluasi dan penyempurnaan;
- 2) Perlu diberikan kesamaan persepsi mengenai indikator kinerja, output, outcome dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara eksekutif dan legislatif;
- 3) Perlu adanya kebijakan dari Kabuapten Karimun terhadap seluruh OPD agar penyampaian Laporan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Karimun tepat pada waktunya.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Penggunaan Sumber daya dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program/Kegiatan terdiri atas dua yaitu, efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pengukuran efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan

Perbandingan Jika menurut kepada jumlah kucuran dana yang diberikan untuk tiap tahun anggaran, maka akan didapati kenaikan dan penurunan anggaran baik belanja Operasional maupun belanja Modal yang diberikan untuk menopang kinerja BPKAD Kabupaten Karimun sebagai mana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.116 Anggaran Belanja Operasional**

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2024	%
1.085.294.413.604,00	1.071.499.011.649,47	98,73

**Sumber :** Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Pemerintah Kab. Karimun, 2025

Dengan jumlah 45 orang ASN dan 36 orang Pegawai Kontrak yang 80 % latar belakang disiplin ilmunya adalah manajemen dan Ekonomi, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana penempatan personil yang mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan indikator kinerja utama harus benar- benar diperhitungkan. Namun naik turunnya anggaran yang diberikan tidak membuat kinerja ASN BPKAD Kabupaten Karimun menurun, hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan BPKAD Kabupaten Karimun dalam memenuhi target indikator kinerja

utama, dengan demikian penambahan dan pengurangan anggaran tidak serta merta membuat kondisi menjadi buruk, namun sebaliknya ada kecenderungan peningkatan atas kinerja. Ini berarti efisiensi penggunaan sumber daya manusia di BPKAD tidak terpengaruh dengan efisiensi sumber daya anggaran.

### Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai out come Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan regulasi, untuk Capaian

Kinerja Sasaran Strategis ke-17 (Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah) dibebani anggaran sebesar Rp. 1.413.231.543.789,00 dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 1.310.685.824.427,47 (92,74%). Program ini didukung oleh 3 Program dimana masing masing bidang pada BPKAD memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan dimaksud dalam rangka pencapaian target kinerja BPKAD. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari sekretariat yang mengampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebagai urat nadi administrasi secara umum yang menyokong sarana dan prasarana kerja pada masing- masing bidang yang mendukung terpenuhinya indikator program utama BPKAD.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan umum yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 beserta perubahannya dan peraturan yang berlaku lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 8).

Sementara itu, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, struktur Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada dokumen APBD tercantum besaran target pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai prediksi pendapatan yang terukur dan merupakan capaian minimal yang harus diperoleh. Sedangkan di akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah dimaksud. Berikut disajikan dalam tabel, target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024.

Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2024 Rp. 705.757.174.927,-

teralisasi Rp. 623.695.363.189 atau  
88,37% terdapat efisiensi sebesar Rp.  
82.061.811.738,- Disisi yang lain target  
Pendapatan Daerah Rp.  
403.112.004.485,00,- teralisasi Rp.  
341.870.142.537,47 atau 92.33 %



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab	
			Target	Realisasi	%		Target	Realisasi			
						<b>Program</b>					
3.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	1.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	30,30 %	28,27%	93,30	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	403.112.004.485,-	372.206.420.340,-	92.33.	Badan Pendapatan Daerah
					<b>93,30</b>	<b>Rata-Rata Capaian Program</b>	<b>403.112.004.485,-</b>	<b>372.206.420.340,-</b>	<b>95.35</b>		
4.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Insfrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata	1.	Rasio KK yang Terlayani Insfrastruktur Dasar	37,28 %	41,57%	111,51	1. Program Pengelolaan Sumber daya Air. 2. Pengelolaan dan Pengembangan Siste Drainase	1.101.723.974,-	1.042.069.274,-	94.59	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
					<b>111,51</b>	<b>Rata-Rata Capaian Program</b>	<b>1.101.723.974,-</b>	<b>1.042.069.274,-</b>	<b>94.06</b>		
5.	Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal	1.	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	68,19 %	39,75	58,29	1. Program PenyelenggaraanJalan	92.928.544.069,98,-	83.014.402.338,-	89,33	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
		2.	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,66	0,54	82,60	2. Program PengelolaanPelayaran	25.332.753.000,-	23.830.950.500,-	94,07	Dinas Perhubungan
		3	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,87	0,87	100	3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	907.178.000,-	803.793.320,-	88.60	
					<b>158,29</b>	<b>Rata-Rata Capaian Program</b>	<b>119.168.475.070,-</b>	<b>107.649.146.158,-</b>	<b>90,33</b>		
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	72,05 Tahun	72,20 Tahun	100,20	1. Program Pemenuhan UpayaKesehatan Perorangan dan	45.761.099.174,-	36.809.973.512,-	80.44	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab	
			Target	Realisasi	%		Target	Realisasi			
						<b>Program</b>					
8.	Terwujudnya Kesetaraan Gender	1.	Indeks Pembangunan Gender	91,5	91,33	99,81	1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.	250.000.000,-	55.956.700,-	22,38	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							2. Program Perlindungan Perempuan	389.047.000,-	199.830.645,-	51,36	
							3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	50.000.000,-	6.076.000,-	12,15	
							4. Program Perlindungan Khusus Anak	480.953.000,-	398.248.000,-	82,80	
						<b>Rata-Rata Capaian Program</b>	<b>1.170.000.000,-</b>	<b>594.629.700,-</b>	<b>50,82</b>		
9.	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,7%	0,84%	49,41	1. Program Pengendalian Penduduk	166.187.000,-	135.905.000,-	81,78	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.655.909.000	3.279.231.750,-	89,70	
							4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	638.340.000,-	624.915.000,-	97,90	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
					49,41	<b>Rata-Rata Capaian Program</b>	<b>4.460.436.000</b>	<b>4.040.051.750</b>	<b>90,58</b>	
10.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	1. Indeks Pembangunan Pemuda	70	69,23	98,90	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.027.874.971,-	1.671.677.401,-	162,63	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					98,90	<b>Rata-Rata Capaian Program</b>	<b>1.027.874.971,-</b>	<b>1.671.677.401,-</b>	162,63	
11.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	1. Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi	30,00 %	37,50 %	125,00	1. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 424.777.100	Rp 327.032.600	76,99 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	70.198.000,-	69.148.000,-	98,50 %	
						3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	-	
					125,00	<b>Rata-Rata Capaian Program</b>	<b>494.975.100</b>	<b>396.180.600</b>	<b>80,04</b>	
12.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	1. Persentase PPKS Mandiri	2,69 %	2,27 %	84,39	- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	90,069,038,-	51,677,513,-	57,38	Dinas Sosial
						- Program Rehabilitasi Sosial	149,999,681,-	68,232,116,-	45,49	
					84,39	<b>Rata-Rata Capaian Program</b>	<b>240.068.719,-</b>	<b>119.909.629,-</b>	<b>49,95</b>	





NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2024			PROGRAM	ANGGARAN 2024		%	Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	%		Target	Realisasi		
		2.	Indeks Reformasi Birokrasi	71,15	77,85	109,42	3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.851.000	131.489.949	76,51	
		3	Nilai Manajemen Risiko Indek	3,00	3.041	101,36	1. -	-	-	-	
						<b>210,78</b>	<b>Rata-Rata Capaian Program</b>			<b>90,12</b>	
17.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,37	124,50	1. Program Pelayanan Penanaman Modal	17.395.000,-	17.395.000,-	100,00	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. RSUD M. Sani
							2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.546.793.394,-	5.211.473.932,-	93,94	
							3. Program Pendaftaran Penduduk	411.750.208,-	301.666.000,-	73,26	
							4. Program Pencatatan Sipil	57.255.000,-	9.459.000,-	16,52	
							5. Program Pengelolaan Informasi Admin istrasi Kependudukan	70.978.000,-	23.819.000,-	33,55	
							6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	-	-	-	
						<b>124,50</b>	<b>Rata-Rata Capaian Program</b>	<b>6.104.171.602</b>	<b>5.563.812.932</b>	<b>91,15</b>	

## BAB 4

## PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik melalui pelaporan kinerja berbasis outcome. Laporan ini mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan pengukuran yang terstruktur, evaluasi dilakukan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Bupati Karimun untuk tahun 2024.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 25 IKU yang diukur, rata-rata capaian kinerja IKU Kabupaten Karimun telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi, yakni 96,94%, dengan rincian 72% masuk dalam kategori sangat tinggi, 16% dalam kategori tinggi, dan 12% dalam kategori sedang. Ini menandakan bahwa sebagian besar target yang telah direncanakan berhasil dicapai

dengan baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Secara lebih rinci, terdapat beberapa indikator yang berhasil melampaui target yang ditetapkan, seperti nilai investasi yang mencapai 162,38%, rasio Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan berprestasi sebesar 125%, dan indeks pelayanan publik sebesar 124,50%. Selain itu, beberapa indikator lain yang menunjukkan kinerja positif adalah rasio KK yang terlayani infrastruktur dasar (111,51%), indeks reformasi birokrasi (109,42%), serta indeks kualitas udara (102,19%).

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih berada di bawah target yang diharapkan. Misalnya, indeks kinerja pengelolaan sampah yang hanya mencapai 72,05%, laju pertumbuhan penduduk yang berada pada angka 69,41%, dan rasio panjang jalan dalam kondisi baik yang hanya mencapai 58,29%. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dan strategi yang lebih efektif

untuk meningkatkan pencapaian pada sektor-sektor tersebut.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2024 menunjukkan tren yang positif dengan mayoritas indikator berada dalam kategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja melalui reformasi birokrasi dan kebijakan strategis.

Dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik secara berkelanjutan, masih diperlukan perbaikan dalam aspek yang belum optimal. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala, perencanaan yang lebih matang, serta peningkatan koordinasi antar instansi perlu terus dilakukan guna memastikan pencapaian target pembangunan yang lebih baik di masa mendatang. Masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak juga diharapkan agar penyusunan LKjIP tahun berikutnya semakin akurat dan komprehensif.



**PERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Pemda Gedung C Lantai II  
TANJUNG BALAI KARIMUN

Website : <http://www.kab-karimun.go.id>

Email : itda\_karimun@yahoo.com

---

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Karimun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tg. Balai Karimun, 18 Maret 2025



**INSPEKTUR**

*Asep Zainal Arifin*  
**ASEP ZAINAL ARIFIN, SE, CGCAE**  
**PEMBINA Tk.I**

**NIP.19661102 199303 1 001**

